

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI KOTA CILEGON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh :
IKHWAN EFENDI
NIM. 6661103222

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, September 2014**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ikhwan Efendi**
NIM : 6661103222
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 01 November 1989
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi : Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CILEGON** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Oktober 2014



Ikhwan Efendi

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : IKHWAN EFENDI
NIM : 6661103222
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
KOTA CILEGON

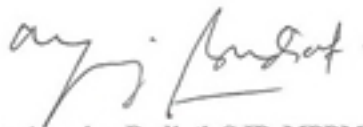
Serang, September 2014

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan

Menyetujui;

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Avuning Budiati, S.IP, MPPM
NIP. 196905022005012001



Gandung Ismanto, S.Sos, MM
NIP. 197408072005011001

Mengetahui;

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si
NIP. 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : IKHWAN EFENDI
NIM : 6661103222
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
KOTA CILEGON

Telah Diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 16
Oktober 2014 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 16 Oktober 2014

Ketua Penguji:
(Leo Agustino, Ph.D)
NIP. 197408032003121001



Anggota :
(Kandung Sapio Nugroho, S.Sos.,M.Si)
NIP. 197809182005011002



Anggota :
(Gandung Ismanto, S.Sos.,MM)
NIP. 197408072005011001



Mengetahui;

Dekan FISIP Untirta

(Dr. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si)
NIP. 197108242005011002

Ketua Prodi Ilmu
Administrasi Negara

(Rina Yulianti, S.IP.,M.Si)
NIP.197407052006042011

*“Dengan ridho dan atas seizin Allah SWT,
aku ingin selalu menjadi satu kebanggaan
bagi kedua orang tua dan keluarga”
(Ikhwan Efendi)*

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

*Kedua Orang Tua Ku (Sukanah Dan Kusnadi) Adik Ku (Agung Wijaya),
Paman Ku (Agus Suki), Teman Perempuan Ku (Nurul Fitri) Dan Keluarga
Besar Yang Tak Pernah Lelah Memotivasi Ku Disetiap Langkah Dan
Tulus Mencintaiku,,*

Terima Kasih Untuk Segalanya,,

ABSTRAK

Ikhwan Efendi. NIM. 6661103222. Skripsi. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon. Konsentrasi Kebijakan Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Ayuning Budiati S.IP, MPPM, Pembimbing II: Gandung Ismanto S.Sos, MM

Kata kunci : Implementasi, Peraturan pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dibuat untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Namun pada implementasinya peraturan pemerintah tersebut masih terdapat masalah-masalah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertitik tolak pada teori pendekatan kebijakan publik dari George Edward III. Teori ini memiliki 4 dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengukur dan menggambarkan seberapa tinggi implementasi peraturan pemerintah tentang keterbukaan informasi publik. Populasi penelitian ini adalah organisasi swasta di Kota Cilegon yang berjumlah 1619 organisasi. Sementara sampel yang diambil sebanyak 94 organisasi. Teknik sampling menggunakan teknik *Incidental Sampling*. Dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner, melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisa data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Hasil penelitian menunjukkan implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon kurang baik, karena t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($-6,813 < 1,289$) dan menunjukkan implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon mencapai angka 70,69% dari angka minimal 75% yang diharapkan. Dalam hal ini dikarenakan masalah implementasi dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum dapat diatasi sepenuhnya pada proses implementasi.

ABSTRAC

Ikhwan Efendi. NIM. 6661103222. Thesis. Implementation of Government Regulation No. 61 Year 2010 on Public Information Disclosure in Cilegon. Concentration in Public Policy, State Administration of Science Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Dr. Ayuning Budiati S.IP, MPPM, Advisor II: Gandung Ismanto S.Sos, MM

Keywords: Implementation, Government Regulation, Public Information Disclosure

Government Regulation No. 61 of 2010 made for the implementation of Law No. 14 of 2008 on Public Information, however the implementation of the regulations are still problems in implementing public information disclosure. This research adhering to the theory of public policy approach of George Edward III. This theory has four dimensions that can be used in measuring the success of a policy. The method used is descriptive method with a quantitative approach. The main objective of this research was to measure and describe how high the implementation of government regulations on public information disclosure. This research population is a private organization in 1619 totaling Cilegon organization. While samples taken at 94 organizations. Sampling techniques using incidental sampling technique. In collecting data using questionnaires, observation, interviews and documentation. To analyze the data using hypothesis testing one sample t-test. The results showed the implementation of Government Regulation No. 61 of 2010 on public information disclosure in Cilegon is not good, because t is smaller than the t table ($-6.813 < 1.289$) and showed the implementation of government regulation number 61 of 2010 on public information disclosure in Cilegon reached 70.69% of the rate of at least 75% is expected. In this case due to the implementation of the communication problems, resources, disposition and bureaucratic structures can not be addressed fully in the implementation process.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan syukur seluruhnya hanyalah milik Allah SWT, yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua. Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua yang selalu sabar dan senantiasa mencintai saya.

Hasil penelitian yang selanjutnya dinamakan skripsi ini diajukan untuk memenuhi satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dengan judul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon". Peneliti menyampaikan rasa terimakasih tak terhingga kepada pihak-pihak berikut:

1. Yth. Bapak Prof. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Yth. Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Yth. Bapak Kandung Spto Nugroho, S.Sos.,M.Si., Wakil Dekan I FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

4. Yth. Ibu Mia Dwiana W.M.Ikom., Wakil Dekan II Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Yth. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Wakil Dekan III FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Yth. Ibu Rina Yulianti, S.IP.,M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Yth. Bapak Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Untirta
8. Yth. Ibu Yeni Widyastuti, S.Sos., M.Si., Dosen pembimbing akademik peneliti selama 4 tahun perjalanan menimba ilmu di Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Untirta yang senantiasa memberikan saran dan motivasi.
9. Yth. Ibu Dr. Ayuning Budiati, S.IP., MPPM., Dosen Pembimbing I Skripsi
10. Yth. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Dosen Pembimbing II Skripsi
11. Yth. Bapak Abdul Apip, Bapak Abdul Hamid, Bapak Anis Fuad, Bapak Maulana Yusuf, Bapak Gandung Ismanto, Bapak Hasuri, Bapak Farid, Ibu Listyaningsih, IbuYeni, Ibu Titi Stiawati, Bapak Deden Haris, Bapak Julianis Cadith, Bapak Agus Sjafari, Ibu RinaYulianti, Ibu Ema, Bapak Suwaib Amirudin, Bapak Agus, Bapak Asnawi, Ibu Rahmawati, Bapak Beny, Bapak Hidayat, Ibu Rini, Pak Kris, Pak Leo, Ibu Arenawati, Bapak Eki, Bapak Hasni, Bapak Enjang, seluruh civitas akademika FISIP Untirta yang namanya tak dapat saya sebutkan satu persatu.

12. Yth. Bapak Zainal Musadad, S.Ag., M.Si., Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi Setda Kota Cilegon
13. Yth. Bapak Samsul Arif, S.Kom., Kepala Sub Bagian Data Elektronik, Dokumentasi dan Sanditel Bagian Kominfo Setda Kota Cilegon
14. Teman-teman kelas G NR Aat Syafaat, Dede Wahyudin, Syandi Negara, Anwar, Agus, Ismet, Yogi, Ibnu, dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya angkatan 2010/2011
15. Semua pihak yang telah membantu peneliti hingga selesainya skripsi ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dari apa yang telah coba peneliti paparkan dalam penelitian ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati dan juga kelapangan dada, peneliti bersedia menerima segala masukan. Saran dan kritik yang membangun dibutuhkan oleh peneliti supaya membuat karya dari peneliti dapat menjadi lebih baik lagi. Akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih atas saran dan kritik yang diberikan harapan besar peneliti semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan dan keilmuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Serang, September 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRAC</i>	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Perumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7

1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	16
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	18
2.1.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.1.4 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	21
2.1.5 Informasi Publik.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Berfikir.....	36
2.4 Hipotesis.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	39
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	40
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Variabel Penelitian.....	41
3.4.1. Definisi Konsep.....	41
3.4.2. Definisi Operasional.....	42
3.5 Instrumen Penelitian.....	44
3.6 Populasi dan Sampel Penelitian.....	46
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	49

3.8 Jadwal Penelitian.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	53
4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon.....	53
4.1.2 Sekretariat Daerah Kota Cilegon.....	57
4.1.3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon.....	61
4.2 Deskripsi Data.....	66
4.2.1 Identitas Responden.....	66
4.2.2 Analisis Data.....	70
4.2.2.1 Implementasi Berdasarkan Dimensi Komunikasi....	70
4.2.2.2 Implementasi Berdasarkan Dimensi Sumber Daya...	76
4.2.2.3 Implementasi Berdasarkan Dimensi Disposisi.....	87
4.2.2.4 Implementasi Berdasarkan Dimensi Struktur Birokrasi.....	91
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik.....	94
4.3.1 Uji Validitas Instrumen.....	94
4.3.2 Pengujian Reliabilitas Instrumen.....	97
4.4 Pengujian Hipotesis.....	99
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian.....	102
4.6 Pembahasan.....	104

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	120
5.2 Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Strategi PPID Polda Banten dalam Pelayanan Informasi Publik.....	34
Tabel 2.2. Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.....	35
Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	42
Tabel 3.2. Jadwal penelitian.....	51
Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas.....	96
Tabel 4.2. Hasil Uji Reliabilitas.....	98
Tabel 4.3. Reliability Statistic.....	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle	26
Gambar 2.2. Model Pendekatan <i>Direct and Indirect Impact On Implementation</i> George Edward III.....	28
Gambar 2.3. Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 4.1. Peta Kota Cilegon.....	54
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cilegon.....	61
Gambar 4.3. Struktur Organisasi PPID Kota Cilegon.....	63
Gambar 4.4. Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji Pihak Kiri.....	102

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 4.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
Diagram 4.2. Identitas Responden Berdasarkan Status Jabatan Dalam Organisasi...	68
Diagram 4.3. Identitas Berdasarkan Bentuk Organisasi Masing-masing Responden.	69
Diagram 4.4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Secara Cepat Oleh PPID.....	71
Diagram 4.5. Pelaksanaan Mekanisme berdasarkan Prinsip Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan Oleh PPID.....	72
Diagram 4.6. Pelaksanaan Pembuatan Pertimbangan Tertulis Oleh PPID.....	73
Diagram 4.7. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Sesuai Prosedur Oleh PPID.....	75
Diagram 4.8. Pelaksanaan Penunjukan Pejabat Sesuai Bidang Oleh PPID.....	76
Diagram 4.9. Pelaksanaan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Oleh PPID.....	78
Diagram 4.10. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Oleh PPID.....	79
Diagram 4.11. Pelaksanaan Penetapan Klasifikasi Dalam Bentuk Surat Klasifikasi Oleh PPID.....	81
Diagram 4.12. Pelaksanaan Penyediaan Informasi Publik Oleh PPID.....	82

Diagram 4.13. Pelaksanaan Penyimpanan informasi Publik Oleh PPID.....	83
Diagram 4.14. Pelaksanaan Pendokumentasian Informasi Publik Oleh PPID.....	84
Diagram 4.15. Pelaksanaan Pengamanan Informasi Publik Oleh PPID.....	86
Diagram 4.16. Pelaksanaan Pengangkatan Birokrat Oleh PPID.....	87
Diagram 4.17. Pelaksanaan Pemberian Anggaran Lebih Oleh PPID.....	89
Diagram 4.18. Pelaksanaan Penambahan Anggaran Operasional Oleh PPID.....	90
Diagram 4.19. Pelaksanaan Penetapan Prosedur Operasional Oleh PPID.....	92
Diagram 4.20. Pelaksanaan Penetapan Klasifikasi Informasi Disetiap Badan Publik Oleh PPID.....	93
Diagram 4.21. Capaian Tingkat Persetujuan Tiap-Tiap Indikator Penelitian.....	118
Diagram 4.22. Capaian Tingkat Keberhasilan Tiap-Tiap Dimensi.....	118

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon”
2. Tabel Skor Kuesioner
3. Tabel Penolong Penghitungan Hasil Kuesioner
4. Tabel Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas SPSS V.21
5. Tabel Distrbusi t
6. Tabel Product Moment
7. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara
8. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kesbanglinmas Kota Cilegon
9. Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cilegon
10. Struktur Organisasi Tata Kerja Bagian Kominfo Sekda Kota Cilegon
11. Data Seluruh Perusahaan Swasta Di Kota Cilegon 2013
12. Data Seluruh Koperasi Aktif Di Kota Cilegon
13. Data Perguruan Tinggi Swasta Di Kota Cilegon
14. Data Seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif Di Kota Cilegon
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
16. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.562-org/2012 Tentang Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Cilegon
17. Lembar Catatan Bimbingan Skripsi
18. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya ada suatu interaksi dalam bentuk komunikasi. Komunikasi baik antar masyarakat dengan masyarakat lainnya, masyarakat dengan organisasi, dan organisasi dengan organisasi lain. Komunikasi dapat dilakukan oleh individu dengan individu lainnya dalam masyarakat, maupun individu dengan kelompok/organisasi. Dengan adanya komunikasi, maka suatu individu atau organisasi akan mendapatkan informasi dari interaksi yang telah dilakukan. Dari informasi tersebut suatu individu/kelompok organisasi dapat mengetahui suatu hal yang baru yang belum diketahui oleh individu/kelompok organisasi sebelumnya lewat interaksi yang menghasilkan suatu informasi.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu, karena informasi dibutuhkan dalam rangka pengembangan kualitas diri dan menjalankan kehidupan sosial. Informasi dapat diperoleh dalam berbagai cara, dapat diperoleh dengan tatap muka dan berinteraksi dengan individu lainnya maupun diperoleh melalui media komunikasi dan informasi baik itu secara elektronik maupun langsung yang bersifat lisan yang disampaikan oleh individu/kelompok

masyarakat dan organisasi. Dalam tingkat kebutuhannya terhadap suatu informasi tergantung pada individu dan latar belakang sesuai dengan kadarnya.

Indonesia adalah negara kesatuan yang sangat luas, dalam menyelenggarakan pemerintahan tentunya tidaklah mudah dengan latar belakang Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi, salah satu provinsi tersebut adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten dengan ibu Kota Serang terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan empat (4) lainnya adalah kota yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, transparansi harus dilakukan dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu transparansi juga dapat dijadikan sebuah tolak ukur dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan yang terbuka dalam pengertian di sini adalah pemerintah yang transparan, partisipatoris, dan terbuka. Dengan transparansi oleh pemerintah maka akan menarik partisipasi masyarakat dalam tata kelola dan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi bersama oleh publik. Salah satu transparansi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah tentang informasi publik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Banten tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan. Dari kedelapan kabupaten/kota di Banten, Kota Cilegon menjadi kota yang perlu dikaji karena menarik dengan

julukan Kota Industri di mana banyak perusahaan-perusahaan yang besar didirikan di Kota Cilegon. Oleh karena itu guna menunjang transparansi dalam pemerintahan dibuatlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di Indonesia sendiri dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan sejauh ini sudah dibentuk lembaga-lembaga informasi bagi pelayanan informasi publik yaitu PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Di Provinsi Banten dari 8 kabupaten/kota berdasarkan data yang didapat belum semua kabupaten/kota mempunyai instansi pengelola informasi padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Bab VI Ketentuan penutup Pasal 21 bahwa PPID harus ditunjuk paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah diundangkan.

Dalam Pasal 21 Ayat 2 memang disebutkan bahwa dalam hal apabila PPID belum ditunjuk, maka tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, maka peneliti melakukan observasi pada PPID Kota Cilegon tentang pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut.

Dalam observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada bagian komunikasi dan informasi, ternyata terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, terdapat permasalahan dalam segi kuantitas/jumlah sumber daya manusia. Pada bagian komunikasi dan informasi Sekretariat daerah Kota Cilegon, jumlah pelaksana dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi belum mencukupi sehingga menyebabkan belum optimalnya dalam pelaksanaan pelayanan. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan kasubag sanditel yang menyatakan bahwa jumlah pelaksana yang berkenaan dengan pelaksanaan dan pelayanan informasi publik yaitu hanya lima (5) pegawai dari dua belas (12) pegawai pada subbagian data elektronik, sanditel dan dokumentasi. Jumlah lima (5) pegawai yang melaksanakan pelayanan secara langsung dalam pelaksanaannya kurang mencukupi, menurut kasubag sanditel seharusnya pelaksana pelayanan lebih dari lima (5) mengingat tugas pelaksanaan pelayanan yang membutuhkan pelaksana yang mencukupi agar dalam pelaksanaan pelayanan secara langsung tidak menimbulkan masalah. kuantitas/jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan didapat langsung dari observasi lapangan dan wawancara pada tanggal 8 oktober 2013 dengan kasubag yang bersangkutan dalam proses pelaksanaan pelayanan informasi publik di Setda Kota Cilegon.

Kedua, dalam rangka mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon, Setda Kota Cilegon bagian komunikasi dan informasi

yang melaksanakan fungsi PPID kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Cilegon. Berdasarkan observasi lapangan pada tanggal 8 oktober 2013 didapati keterangan dari pelaksana yaitu PPID Kota Cilegon, bahwa sosialisasi yang pernah dilaksanakan hanya satu kali terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan Walikota tentang pembentukan organisasi PPID pada Tanggal 28 Desember 2012. Pihak PPID hanya melaksanakan sosialisasi tentang KIP pada tanggal 4 juli 2013 dan sampai sekarang belum melakukan sosialisasi kembali. Hal ini berdampak masih awamnya masyarakat Kota Cilegon tentang keterbukaan informasi publik.

Ketiga, berkaitan dengan penyediaan informasi dalam bentuk elektronik yaitu melalui website. Dalam rangka penyebarluasan informasi publik salah satu media yang digunakan adalah media elektronik salah satunya adalah *website*. Berdasarkan hasil observasi, *website* PPID Kota Cilegon yang dapat diakses pada <http://ppid.cilegon.go.id> jika dibandingkan dengan *website* PPID Kota Serang yang dapat diakses pada <http://ppid.serangkota.go.id> dari segi isi belum lengkap. Pada website PPID Kota Cilegon dari isi pengklasifikasian informasi belum dimuat berbeda dengan website PPID Kota Serang di mana isi pengklasifikasian informasi sudah dimuat. Pengklasifikasian yang dimaksud adalah pengklasifikasian dari informasi yang wajib disediakan untuk umum, informasi publik secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selain itu, berdasarkan hasil observasi peneliti dan keterangan yang didapat pada tanggal 8 oktober 2013, PPID Kota Cilegon belum lengkap karena informasi dalam bentuk

laporan keuangan terbaru dan laporan aset terbaru belum dimasukkan sesuai keterangan dari pihak PPID Kota Cilegon.

Keempat, berkaitan dengan adanya standar operasional prosedur sejak dikeluarkannya perwal tentang pembentukan PPID Kota Cilegon pada tahun 2012 dalam pelaksanaan selama ini diketahui bahwa belum dibuatnya SOP tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Kota Cilegon, keterangan tersebut didapati dari kasubag sanditel di PPID Kota Cilegon.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan pada PPID Kota Cilegon belum mencukupi dari segi kuantitas/jumlah aparatur, sehingga pelayanan informasi belum optimal.
2. Sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon masih kurang, terlihat dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan PPID Kota Cilegon hanya satu kali.
3. Penyediaan informasi publik dalam media elektronik yaitu melalui website dari segi isi belum lengkap dan terupdate dengan baik.
4. Belum dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam Pelaksanaan di PPID Kota Cilegon.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas agar penelitian lebih terstruktur, sistematis, dan untuk memperoleh data yang kongkrit di lapangan maka, penelitian dibatasi dan lebih difokuskan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Di Kota Cilegon.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan studi pendahuluan dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan dalam batasan masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa tinggi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentu saja mempunyai tujuan, karena tujuan penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dari kegiatan peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinggi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan studi administrasi negara, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang perlu

dijadikan bahan referensi dalam penelitian sosial lainnya yang saling berkaitan.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon yaitu sebagai gambaran yang terjadi dari pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut dan hasil dari penelitian dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi yaitu bagian komunikasi dan informasi Setda Kota Cilegon agar dalam pelaksanaan peraturan pemerintah yang sudah berjalan dapat diperbaiki dalam proses implementasinya supaya lebih efektif.

1.7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah menggambarkan situasi, kondisi, ruang lingkup, dan kedudukan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari ruang lingkup yang paling umum hingga menitik ke masalah yang lebih spesifik, yang relevan dengan judul penelitian. Pada bagian ini juga digambarkan apa yang diharapkan sebagai hasil penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah masalah-masalah yang muncul yang berkaitan dengan tema/topik/judul penelitian atau dengan variabel yang akan diteliti. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian diperlukan untuk lebih mempersempit masalah yang akan diteliti. Batasan masalah penelitian akan memuat objek penelitian, subjek penelitian, dan lokus penelitian secara jelas.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian menjawab pertanyaan “Apa yang akan diselesaikan peneliti dalam melakukan penelitian ini”. Dalam bagian ini, masalah penelitian dikemukakan dalam bentuk pertanyaan yang dirumuskan secara tajam yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada bagian ini dikemukakan apa yang menjadi kegunaan hasil penelitian, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis dari diadakannya penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat dan jelas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori mengkaji beberapa teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur untuk digunakan dalam merumuskan masalah sehingga akan diperoleh konsep penelitian yang jelas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengkaji penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber ilmiah.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi teori.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan observasi dan pengumpulan data di lapangan, kajian teori, dan kerangka berpikir peneliti. Hipotesis

penelitian merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti dan akan diuji kebenarannya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penelitian.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan

3.3 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat (*locus*) penelitian dilaksanakan, menjelaskan tempat penelitian serta alasan memilihnya.

3.4 Variabel Penelitian

Terdiri dari definisi konsep dan definisi operasional, definisi konsep memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan dan definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian).

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan kualitas instrumen.

3.6 Populasi dan Sampel

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai wilayah generalisasi atau populasi penelitian, penetapan besar sampel, dan teknik pengambilan sampel.

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sub bab ini menjelaskan teknik analisa beserta rasionalisasinya. Teknik analisis data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti.

3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan tentang jadwal penelitian tersebut dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Menjelaskan objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisa data kuantitatif yang relevan.

4.3 Pengujian Persyaratan Statistik

Melakukan pengujian terhadap persyaratan statistik dengan menggunakan uji statistik tertentu.

4.4 Pengujian Hipotesis

Melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisa statistik, dimana hasil analisa tersebut adalah teruji tidaknya hipotesis nol penelitian. Hasil perhitungan akhir statistik disajikan dalam diagram *pie*, sedangkan perhitungan selengkapnya disajikan dalam lampiran.

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Kendatipun hasil analisis statistik itu sendiri sudah merupakan suatu kesimpulan, namun belum memadai tanpa ada interpretasi yang dikaitkan dengan rumusan masalah.

4.6 Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Terhadap hipotesis yang diterima barangkali tidak ada persoalan, tetapi terhadap hipotesis yang ditolak harus diberikan berbagai dugaan yang menjadi penyebabnya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menyimpulkan hasil penelitian secara jelas, singkat, mudah dipahami, dan harus sejalan dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

5.2 Saran

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti, baik secara teoritis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian skripsi.

LAMPIRAN

Berisi daftar dokumen-dokumen yang menunjang data penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

Untuk mendukung permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan. Tetapi sebelum masuk pada teori yang berkaitan, terlebih dahulu harus dipahami definisi dari teori.

Snelbecker (dalam Moleong, 2013:57), mendefinisikan teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Sedangkan Marx & Goodson (dalam Moleong, 2013:57), menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (i) hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat diukur), (ii) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian, dan (iii) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.

Setelah memahami definisi teori, selanjutnya yang perlu dipahami adalah fungsi dari teori. Glasser & Strauss (dalam Moleong, 2013:58), walaupun mengkhususkan fungsi teorinya pada sosiologi, berlaku juga pada disiplin lainnya, menyatakan seperti berikut. Tugas yang saling berkaitan dalam sosiologi adalah: (i) memberikan kesempatan untuk meramalkan dan menerangkan perilaku, (ii) bermanfaat dalam menemukan teori sosiologi, (iii) digunakan dalam aplikasi praktis-peramalan dan penjelasannya harus memberikan pengertian kepada para praktisi dan beberapa pengawasan terhadap situasi, (iv) memberikan persepektif bagi perilaku, yaitu pandangan yang harus dijaring dari data, dan (v) membimbing serta menyajikan gaya bagi penelitian dalam beberapa bidang perilaku.

Sedangkan menurut Snelbecker (dalam Moleong, 2013: 57-58), ada empat fungsi suatu teori, yaitu (i) mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, (ii) menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban, (iii) membuat ramalan atas dasar penemuan, dan (iv) menyajikan penjelasan dan, dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan mengapa.

Dari keterangan di atas terdapat persamaan dalam fungsi teori yang telah dikemukakan, bahwa teori digunakan untuk menyajikan penjelasan, menjawab pertanyaan mengapa dan meramalkan fenomena.

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Menurut Dunn (2003:51), Kebijakan didefinisikan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah *policy* atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani,

Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu *polis* (Negara-Kota) dan *pur* (Kota).

Sedangkan Hogwood & Gunn (dalam Wicaksana, 2006:53), menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, diantaranya:

- a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (*as a label for a field of activity*)
Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban.
- b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (*as expression of general purpose or desired state of affairs*)
Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pengembangan demokrasi melalui desentralisasi.
- c. Sebagai proposal spesifik (*as specific proposal*)
Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar.
- d. Sebagai keputusan pemerintah (*as decisions of government*)
Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden.
- e. Sebagai otorisasi formal (*as formal authorization*)
Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebijakan lainnya.
- f. Sebagai sebuah program (*as a programe*)
Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan.
- g. Sebagai output (*as output*)
Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang didistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya.
- h. Sebagai hasil (*as outcome*)

Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agrikultural dari program reformasi agraria.

- i. Sebagai teori atau model (*as a theory or model*)
Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka output industry akan berkembang.
- j. Sebagai sebuah proses (*as a process*)
Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan *issues* lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (*setting*), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.

2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik

Setelah memahami definisi dari kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, yang selanjutnya akan dijelaskan adalah pengertian dari kebijakan publik. Eulau & Prewitt (dalam Agustino, 2012: 6-7), dalam persepektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.”

Definisi lain dikemukakan oleh Dye (dalam Agustino, 2012:7), bahwa “kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” seperti ungkapannya (dalam Subarsono, 2005:2) *public policy is whatever governments choose to do or not to do*.

Sedangkan menurut Dunn (dalam Wicaksana, 2006:64), Kebijakan publik ialah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif

yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau Kantor pemerintah.

Rose berupaya mengemukakan definisi lain (dalam Agustino, 2012:7), yaitu kebijakan publik sebagai, ”sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”

Widodo (2007:12) mendefinisikan kebijakan publik adalah “serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”. Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.

Selain definisi di atas Hogwood dan Gunn (dalam Suharto, 2007:4), menyatakan arti dari kebijakan publik adalah sebagai seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik

Pada tahap selanjutnya dalam deskripsi teori ini akan dikemukakan definisi implementasi kebijakan publik, setelah sebelumnya diuraikan tentang definisi kebijakan publik. Menurut Meter & Horn (dalam Wibawa, 1994:21), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Sedangkan Mazmanian & Sabatier (dalam Agustino, 2012:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan-keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Dari kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan/pelaksanaan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dalam kegiatan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari proses dan capaian tujuan berupa hasil akhir. Ini sesuai dengan yang kemukakan oleh Lester & Stewart (dalam Agustino, 2012:139), di mana mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan pencapaian suatu hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Grindle pun berpendapat hampir serupa dengan pernyataan sebelumnya (dalam Agustino, 2012:139), bahwa:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari

individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”

Definisi lain dikemukakan Pressman & Wildavsky (dalam Parsons, 2001:468), yaitu:

”Implementasi menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem dan implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang ditetapkan oleh hipotesis kebijakan”.

2.1.4. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Setelah mengetahui pengertian dari implementasi kebijakan publik, berikutnya akan diuraikan beberapa model implementasi kebijakan publik menurut beberapa ahli diantaranya yaitu :

1) Model Van Meter dan Van Horn

Meter & Horn (dalam Nugroho, 2011:627), menjelaskan bahwa model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor.

2) Model Mazmanian dan Sabatier

Dalam Nugroho (2011:629), dijelaskan bahwa model ini dikembangkan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian & Sabatier disebut model *Kerangka Analisis implementasi (A framework for implementation Analysis)*. Duet Mazmanian & Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan respons konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atau kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3) Model Hogwood dan Gunn

Model yang selanjutnya atau model yang ketiga adalah model Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (dalam Nugroho, 2011:630). Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat.

Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausalyang andal. Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Syarat keenam, apakah hubungan saling kebergantungan kecil. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Syarat kesembilan, koordinasi dan komunikasi yang

sempurna. Syarat kesepuluh, bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

4) Model Goggin, Bowman, dan Lester

Dalam Nugroho (2011:633), Malcolm Goggin, Ann Bowman, & James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “*communication model*” untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan” (1990). Goggin, dkk. Bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

5) Model Grindle

Menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994:22), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

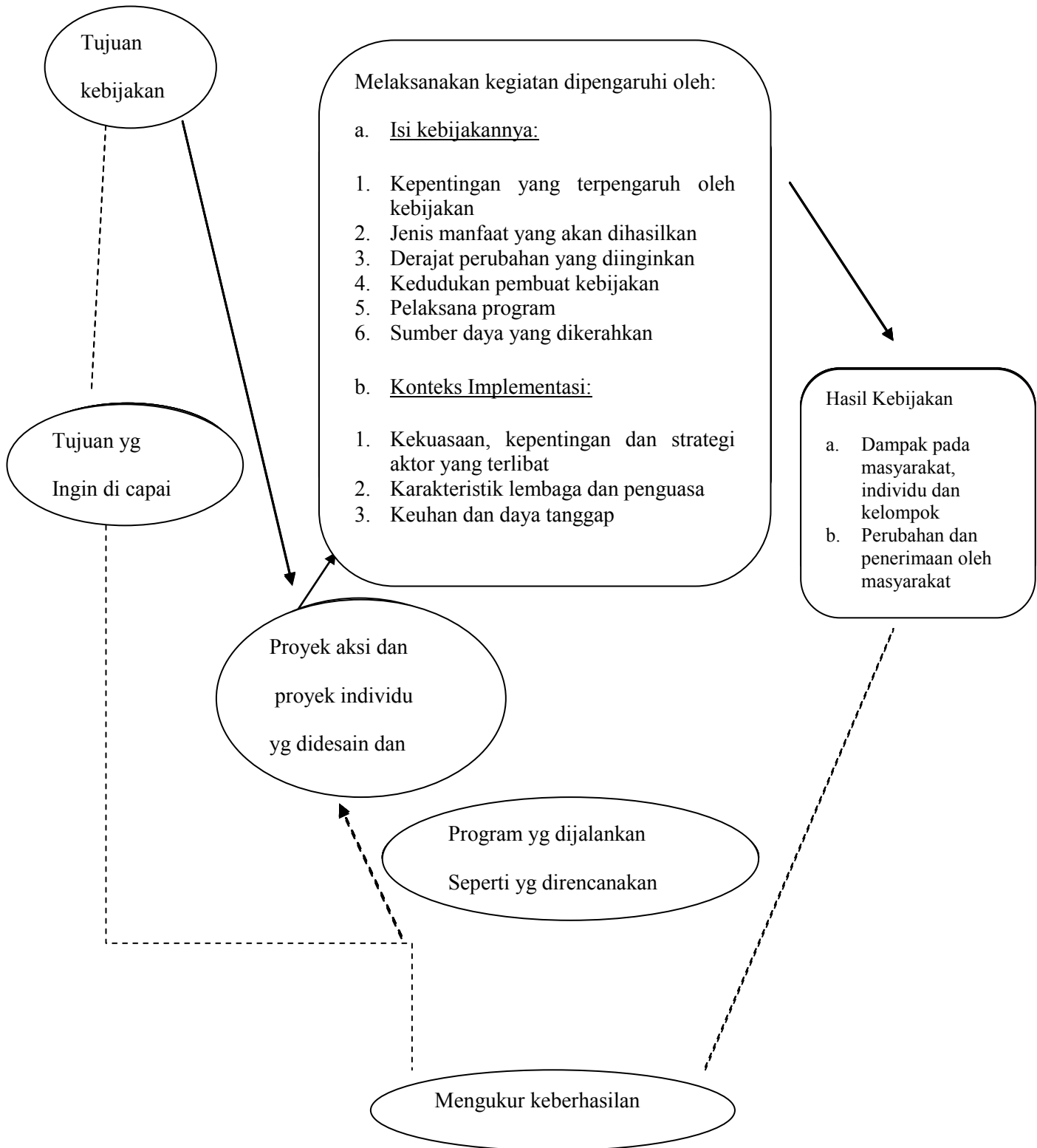
- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan

- 5) Pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, dari isi yang mencakup hal-hal yang di atas terdapat konteks implementasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle

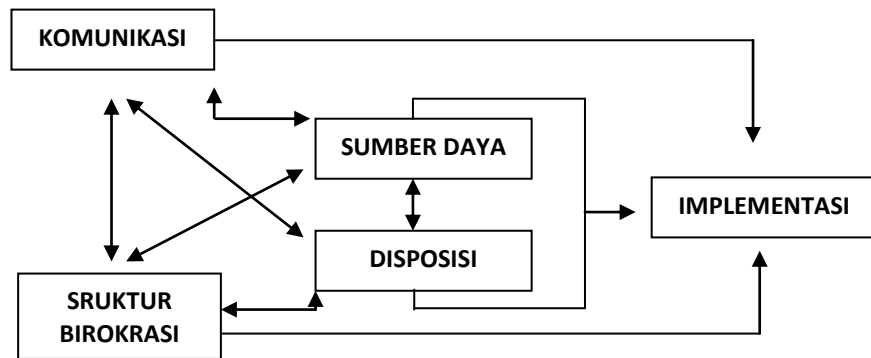


6) Model Elmore, dkk.

Model ini disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern & David O'Porter dikemukakan (dalam Nugroho, 2011:635-636), bahwa dalam model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah.

7) Model George C. Edward III

Dalam Agustino (2012:150-153), dijelaskan bahwa model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III bersifat *top down*. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumberdaya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.



Gambar 2.2 Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation* (George Edward III)

Variabel *pertama* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- 1) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- 2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada

tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- 3) Konsistinsi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Krena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- 3) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- 4) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George Edward III, adalah:

- 1) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu,

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi bagi kepentingan warga.

- 2) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam suatu struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dari beberapa teori yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti mengambil salah satu teori yang peneliti anggap paling cocok untuk menyelesaikan masalah penelitian yaitu Teori George Edward III. Dalam pendekatan yang diteoremdakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumberdaya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

2.1.5. Informasi Publik

Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan informasi ialah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Dan berdasarkan undang-undang tersebut juga pada Pasal 1 Ayat 2, bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai

dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang pertama adalah penelitian yang berjudul “Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik”, pada tahun 2013 yang diteliti oleh Neng Lasmy Liesmaya dengan Nim 092191, program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Strategi PPID Polda Banten dalam Pelayanan Informasi Publik

No	ITEM	Peneliti : NENG LASMY LIESMAYA Nim : 092191
1	Judul	Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Banten dalam Pelayanan Informasi Publik
2	Tahun	2013
3	Tujuan Penelitian	1) Menjelaskan proses <i>planning</i> Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Banten dalam pelayanan Informasi Publik 2) Membahas proses <i>Organizing</i> Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Banten dalam pelayanan Informasi Publik 3) Mengkaji proses <i>Actuating</i> Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Banten dalam pelayanan Informasi Publik 4) Menganalisis <i>Controlling</i> Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Banten dalam pelayanan Informasi Publik
4	Teori	Menggunakan Teori Sistem 1) Objek-objek 2) Atribut 3) Hubungan internal 4) Lingkungan
5	Metode/Paradigma	Metode Kualitatif Paradigma interpretatif
7	Hasil Penelitian / Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses <i>planning</i> dalam program pelayanan informasi publik di Polda Banten dirumsukan oleh bidang Humas Polda Banten meliputi persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan media penunjang program; proses <i>organizing</i> dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada anggota PPID; <i>actuating</i> yaitu menyajikan informasi serta merta, berkala dan setiap saat pada web pelayanan dan menanggapi permintaan informasi publik secara manual; proses <i>controlling</i> dilakukan dengan cara menyaring informasi yang akan diberikan atau dipublikasikan sesuai ketentuan dalam UU KIP
8	Persamaan	Mengkaji tentang informasi publik
9	Perbedaan	Perbedaan pada lokasi, fokus dan metode penelitian
10	Sumber	Repository fisip untirta

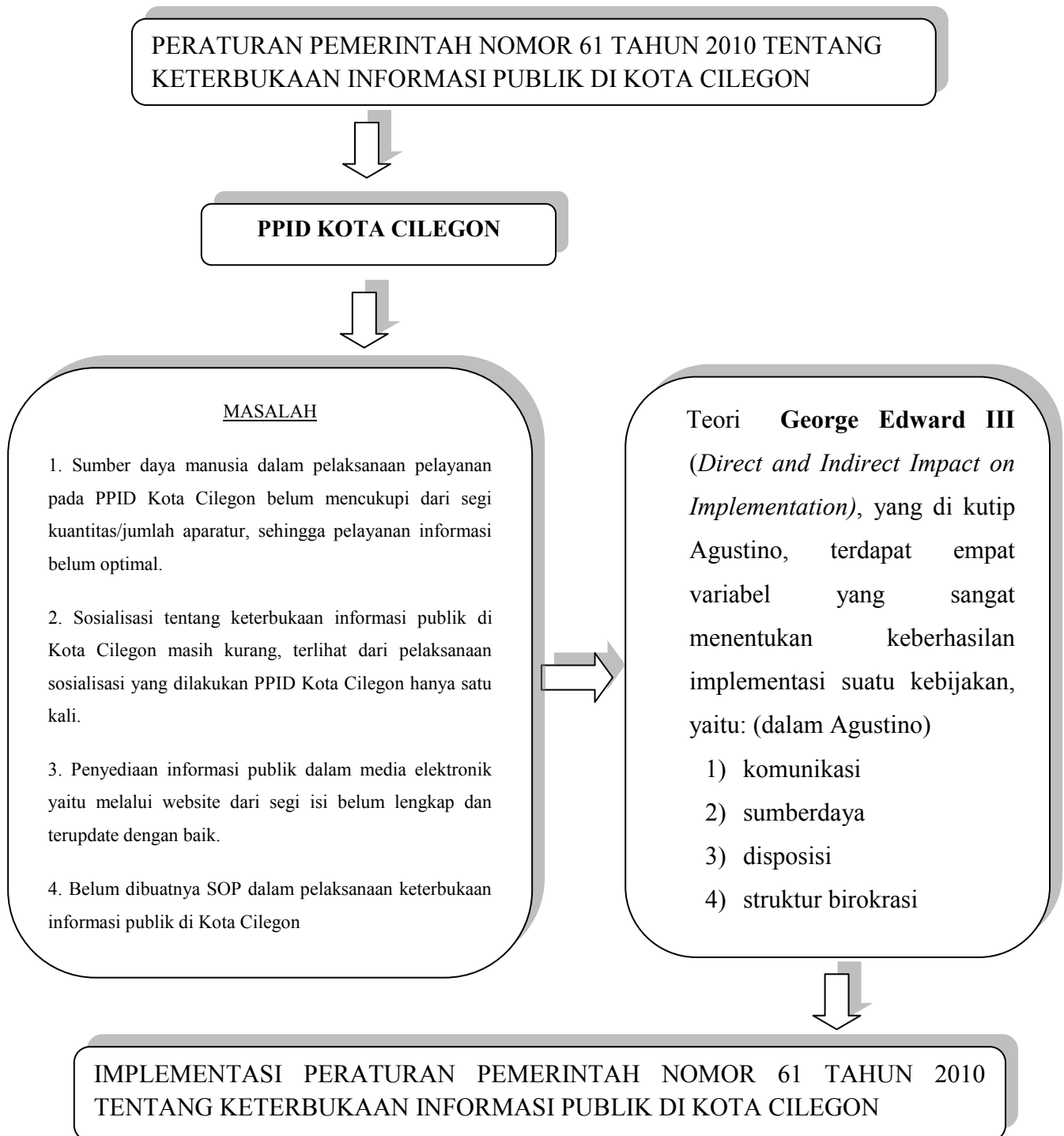
Kemudian penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu berjudul “Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam Melaksanakan Undang-undang Keterbukaan informasi publik” oleh Fajar Hari Mulya dengan Nim 072705 prodi ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2013. Berikut diuraikan pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

No	ITEM	Peneliti : FAJAR HARI MULYA Nim : 072705
1	Judul	Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
2	Tahun	2013
3	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah kabupaten Lebak dalam melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi publik
4	Teori	Idi Dimiyati, tentang realitas sosial, yaitu modal sosial, <i>supporting system</i> sinergi, dan harmonisasi
5	Metode/Paradigma	Metode Kualitatif
7	Hasil Penelitian / Kesimpulan	Pemerintah Kabupaten Lebak belum siap melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi publik karena ketiadaan anggaran dalam tata kelola pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
8	Persamaan	Sama sama membahas pelaksanaan suatu kebijakan informasi publik
9	Perbedaan	Berbeda lokasi penelitian dan metode yang di gunakan yaitu kualitatif
10	Sumber	Repository fisip untirta

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir



2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dibuat hipotesis dari penelitian. Menurut Sugiyono (2013:64) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan dalam Hipotesis ini digunakan Hipotesis Deskriptif, masih dikemukakan oleh Sugiyono (2013:67), bahwa Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu sebagai berikut:

$$H_0 : \mu \geq 75\%$$

H_0 : “Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon paling rendah 75% dari nilai idealnya 100%”.

$$H_a : \mu < 75\%$$

H_a : “Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon tercapai kurang dari 75% dari nilai idealnya 100%”.

Melihat dari dua hipotesis tersebut, maka peneliti mengambil salah satu hipotesis untuk penelitian ini bahwa:

Ha : $\mu < 75\%$

Ha : "Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon tercapai kurang dari 75% dari nilai idealnya 100%".

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Usman & Setiadi Akbar (2011:41), mendefinisikan metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. Sedangkan oleh Mikkelsen (1999:313), didefinisikan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu atau praktis.

Pada penelitian “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon” menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2013:8) menjelaskan bahwa, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data berupa kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Irawan (2006:108) menjelaskan bahwa, metode deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan

(korelasional) antara dua atau lebih variabel. Sedangkan menurut Suryabrata (1992:24), metode penelitian deskriptif adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi mengenai unit tersebut.

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian difokuskan pada implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Jadi, penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik dengan lingkup Kota Cilegon.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Bagian Komunikasi dan Informasi. Di Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Bagian komunikasi dan informasi terdapat tempat pelayanan informasi publik atau di kenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Daerah Kota Cilegon. Mengapa dipilih di PPID Kota Cilegon karena peneliti ingin mengetahui tinggi Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.

3.4. Variabel Penelitian

3.4.1. Definisi Konsep

Variabel dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik, kebijakan publik yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan lokus penelitian yaitu Kota Cilegon. Menurut peneliti teori yang dapat diujikan untuk mengetahui implementasi dari peraturan pemerintah tersebut adalah teori George Edward III, peneliti menggunakan teori tersebut berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada tahap observasi lapangan. Berdasarkan permasalahan di lapangan maka peneliti memutuskan untuk menggunakan teori dari George Edward III untuk mengetahui implementasi dari peraturan pemerintah no 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. Teori implementasi George Edward III mempunyai empat dimensi dalam mengukur pelaksanaan suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Keempat dimensi tersebut diatas dijabarkan melalui indikator-indikator yang kemudian dijadikan pertanyaan-pertanyaan pada instrumen

penelitian untuk mengukur implementasi peraturan pemerintah no 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.

3.4.2. Definisi Operasional

Pada penelitian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon yang menjadi variabel adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Teori yang digunakan adalah teori implementasi George Edward III, berikut rincian dari dimensi dan indikator yang digunakan pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Nomor Butir Pertanyaan pada Instrumen
Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon	Komunikasi	Transmisi	1,2
		Kejelasan	3
		Konsistensi	4
	Sumber Daya	Staff	5
		Informasi	6,7
		Wewenang	8
		Fasilitas	9, 10, 11, 12
	Disposisi	Pengangkatan Birokrat	13
		Insentif	14, 15
	Struktur Birokrasi	SOP	16
Fragmentasi		17	

Sumber : George Edward III (dalam Agustino, 2012:150-153)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan teori George Edward III memiliki empat dimensi yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Pada dimensi komunikasi dijabarkan dengan 3 (tiga) indikator yaitu, transmisi, kejelasan dan konsistensi dengan nomor pertanyaan pada instrumen pertanyaan nomor 1 dan 2 untuk indikator transmisi, pertanyaan nomor 3 untuk indikator kejelasan, dan pertanyaan nomor 4 untuk indikator konsistensi.

Dimensi yang kedua, yaitu sumber daya dijabarkan dengan 4 indikator yaitu staff, informasi, wewenang dan fasilitas dengan nomor pertanyaan pada instrumen pertanyaan nomor 5 untuk indikator staff, pertanyaan nomor 6 dan 7 untuk indikator informasi, pertanyaan nomor 8 untuk indikator wewenang dan pertanyaan nomor 9, 10, 11, dan 12 untuk indikator fasilitas.

Selanjutnya dimensi yang ketiga yaitu disposisi dijabarkan dengan 2 indikator yaitu pengangkatan birokrat dan insentif dengan nomor pertanyaan pada instrumen pertanyaan nomor 13 untuk indikator pengangkatan birokrat dan pertanyaan nomor 14 dan 15 untuk indikator insentif.

Dimensi yang keempat yaitu struktur birokrasi, dijabarkan dengan 2 indikator yaitu standar operasional prosedur dan fragmentasi dengan nomor pertanyaan pada instrumen, pertanyaan nomor 16 untuk indikator standar operasional prosedur dan pertanyaan nomor 17 untuk indikator fragmentasi.

3.5. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2013:102) mengemukakan bahwa, pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian.

Sugiyono (2013:102) melanjutkan penjelasannya, karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.

Dijelaskan oleh Bungin (2009:123), bahwa pada penelitian kuantitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data, antara lain metode angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini selain kuesioner, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Peneliti menggunakan teknik pengumpul data yang terdiri dari beberapa teknik yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Menurut Denzin (dalam Chaedar, 2006:154), wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Sugiyono (2013:138) menjelaskan bahwa wawancara terstruktur, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2013:145), bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Sedangkan menurut Guba & Lincoln (dalam Moleong, 2013:175), jika diikhtisarkan alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah : pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya;

Observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non-participant observation* (observasi non partisipan) dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *non-participant observation* atau observasi non partisipan. Moleong (2013:177) mengemukakan, bahwa peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:145), kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

c. Dokumentasi

Menurut Bungin (2009:144), Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, laporan dan sebagainya.

3.6. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Irawan (2006:113), populasi (validitas eksternal) adalah keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran generalisasi. Maka peneliti mengambil sampel kemudian menelitinya sebagai generalisasi populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel adalah karena satu dan lain alasan tidak dapat meneliti seluruh populasi.

Populasi penelitian ini difokuskan pada pengguna informasi publik di Kota Cilegon pada tahun 2013 hingga 2014. Peneliti mengambil populasi dari populasi yang paling mungkin menggunakan informasi publik di Kota Cilegon yaitu populasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Cilegon, populasi koperasi Kota Cilegon, populasi perusahaan Kota Cilegon dan populasi perguruan tinggi swasta Kota Cilegon. Data dari 4 populasi yang telah disebutkan didapatkan dari masing-masing sumber yaitu koperasi dan perusahaan didapatkan dari Dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kota Cilegon kemudian data populasi perguruan tinggi swasta diperoleh dari Cilegon dalam angka 2013 dan data lembaga swadaya masyarakat diperoleh dari Kesbanglinmas Kota Cilegon. Jumlah dari keseluruhan *stakeholder* yang diperoleh adalah 1619.

Karena alasan keterbatasan peneliti yaitu alasan luas wilayah, biaya dan waktu penelitian merujuk justifikasi di atas, maka untuk mendapatkan sampel yang representatif peneliti menggunakan rumus untuk mencari data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% yang dikutip oleh Prasetyo (2008:137-138) yaitu:

Rumus 3.1
Slovin

$$n \geq \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : ukuran sampel

N: ukuran populasi

e : *sampling error* (10%)

$$\begin{aligned} n &\geq \frac{N}{1 + Ne^2} && \geq \frac{1619}{1 + (1619)(0.1)^2} \\ &&& \geq \frac{1619}{1 + 16,19} \\ &&& \geq \frac{1619}{17,19} \\ &&& \geq 94,18 \\ &&& \approx 94 \end{aligned}$$

Berdasarkan rumus Slovin di atas dengan tingkat kesalahan sebesar 10% dari populasi 1619 pengguna informasi publik di Kota Cilegon dan didapatkan sampel sebesar 94 *stakeholder*. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *Incidental Sampling* yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang organisasi swasta yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut :

1. *Editing*

Dalam *editing*, akan diteliti kembali hal-hal mengenai kelengkapan pengisian terhadap semua pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner, tulisan yang tertera harus dapat dibaca, kalimatnya harus jelas maknanya sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan, apakah jawaban-jawaban responden cukup logis dan terdapat kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, dan jawaban harus relevan dengan pertanyaan.

2. *Coding* dan *Scoring*, merupakan usaha mengklasifikasi atau mengelompokkan jawaban responden berdasarkan macamnya, dengan cara memberikan kode terhadap jawaban responden dalam kuesioner sesuai dengan kategori masing-masing, kemudian diberikan skor dengan menggunakan skala *likert*.

Skor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sangat setuju/Selalu/Sangat baik/Sangat tanggap diberi skor : 4
- b. Setuju/Sering/Baik/Tanggap diberi skor : 3
- c. Tidak setuju/Kadang-kadang/Tidak baik/Tidak tanggap diberi skor :2

- d. Sangat tidak setuju/Tidak pernah/Sangat tidak baik/Sangat tidak tanggap diberi skor : 1

3. *Tabulating*

Dalam tabulasi ini keseluruhan hasil kuesioner dijumlahkan dan dicari nilainya dengan menggunakan tabel frekuensi, sebagai dasar untuk menganalisis data.

Setelah data selesai diolah maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan upaya peneliti untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi oleh pembaca atau penguji. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kuantitatif, dimana diperlukan perhitungan matematis atau teknik statistik sebagai alat bantu analisis. Berikut adalah rumus pengujian hipotesis dekriptif dalam Sugiyono (2013:178-179) yang diajukan dalam penelitian ini yang menggunakan rumus *T-Test* (Uji T) untuk satu sampel :

Rumus 3.2
T-Test (Uji T)

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan :

- t = Nilai t hitung
- \bar{X} = Nilai rata – rata
- μ_0 = Nilai yang di hipotesiskan
- s = Simpangan baku sampel
- n = Jumlah anggota sampel

3.8. Jadwal Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama Oktober 2013 – Oktober 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu													
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	
		'13	'13	'13	'14	'14	'14	'14	'14	'14	'14	„14	„14	„14	„14
1	Menentukan Judul														
2	Observasi Awal														
3	Pengumpulan Data														
4	Penyusunan Laporan														
5	Seminar Ujian Proposal														
6	Revisi Proposal														
7	Pengolahan dan Analisis Data														
8	Sidang Skripsi														
9	Revisi Laporan														

Sumber: Peneliti 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN

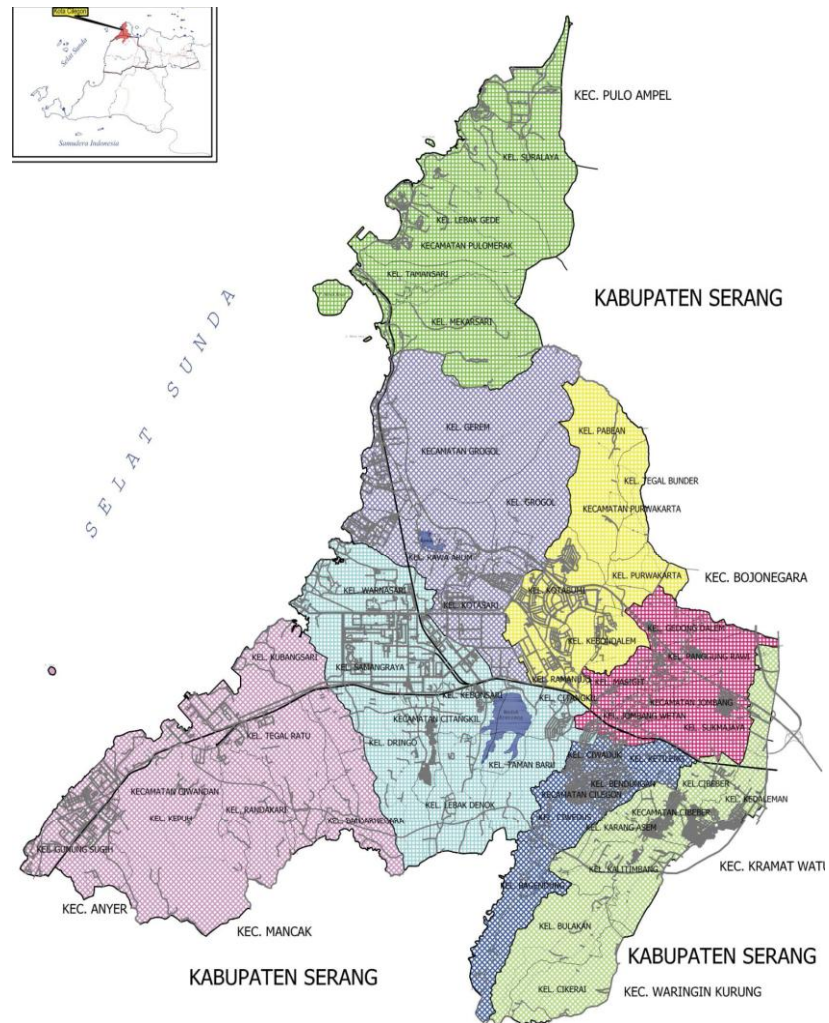
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon

Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 1999. Secara geografis Kota Cilegon berada pada posisi koordinat $5^{\circ}52'24''$ – $6^{\circ}04'07''$ Lintang Selatan (LS) dan $105^{\circ}54'05''$ – $106^{\circ}05'11''$ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah $175,51 \text{ Km}^2$ dan dibatasi oleh :

1. Sebelah Barat : Selat Sunda
2. Sebelah Utara : Kab. Serang
3. Sebelah Timur : Kab. Serang
4. Sebelah Selatan : Kab. Serang

Kota Cilegon sebagai kota yang berada pada ujung barat Pulau Jawa merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Sumatera, sehingga menjadikan Kota Cilegon sebagai kota industri karena memiliki posisi yang cukup strategis.



Gambar 4.1 Peta Kota Cilegon

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tentang pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) Nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan di Kota Cilegon yang menyatakan bahwa daerah Kota Cilegon memiliki 43 Kelurahan dari 8 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Cilegon berjumlah 5 Kelurahan

2. Kecamatan Ciwandan berjumlah 6 Kelurahan
3. Kecamatan Pulomerak berjumlah 4 Kelurahan
4. Kecamatan Cibeber berjumlah 6 Kelurahan
5. Kecamatan Grogol berjumlah 4 Kelurahan
6. Kecamatan Purwakarta berjumlah 6 Kelurahan
7. Kecamatan Jombang berjumlah 5 Kelurahan
8. Kecamatan Citangkil berjumlah 7 Kelurahan

Kota Cilegon memiliki Visi dan Misi tahun 2011 - 2015 sebagai berikut:

a. Visi

Menilik kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi sampai dengan Tahun 2015 serta mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat Kota Cilegon maka “visi Kota Cilegon Tahun 2011-2015” adalah :

**“MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI
DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA”**

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2006-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota CILEGON Tahun 2006-2026 yaitu : **“CILEGON PUSAT INDUSTRI,
PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU**

JAWA”, serta merupakan kelanjutan perwujudan dari visi pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD Kota Cilegon Tahun 2006-2011)

Harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015 adalah terwujudnya Kota Cilegon sebagai kota pusat Industri, Perdagangan dan Jasa yang saling mendukung guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan pencapaian visi jangka panjang diletakan kepada penyiapan landasan pokok, infrastruktur dan suprastruktur utama dan penunjang, serta pembentukan kultur budaya masyarakat, yang didukung oleh upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara sistematis, dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Adapun indikasi wujud pencapaian sasaran strategi visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015 adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat,
2. Menurunnya kemiskinan,
3. Menurunnya pengangguran,
4. Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian.

Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan provinsi, visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015 merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kota Cilegon

untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Banten dan visi pembangunan nasional.

b. Misi

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015 maka dirumuskan “misi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui daya dukung sektor industri, perdagangan dan jasa;
3. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan kepelabuhanan, pergudangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan;
4. Mempersiapkan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keagamaan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis berlandaskan hukum serta berorientasi publik.

4.1.2 Sekretariat Daerah Kota Cilegon

Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2008,

pembentukan ini berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, perlu menata Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon. Tugas dan kewajiban pokok Setda adalah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Untuk menjalankan tugas pokoknya, Setda menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lainnya yang termasuk perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah ini bertempat di Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

A. Sekretaris Daerah; B. Asisten I, membawahkan :

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Sub Bagian Bina Pertanahan.

2. Bagian Hukum, membawahkan :

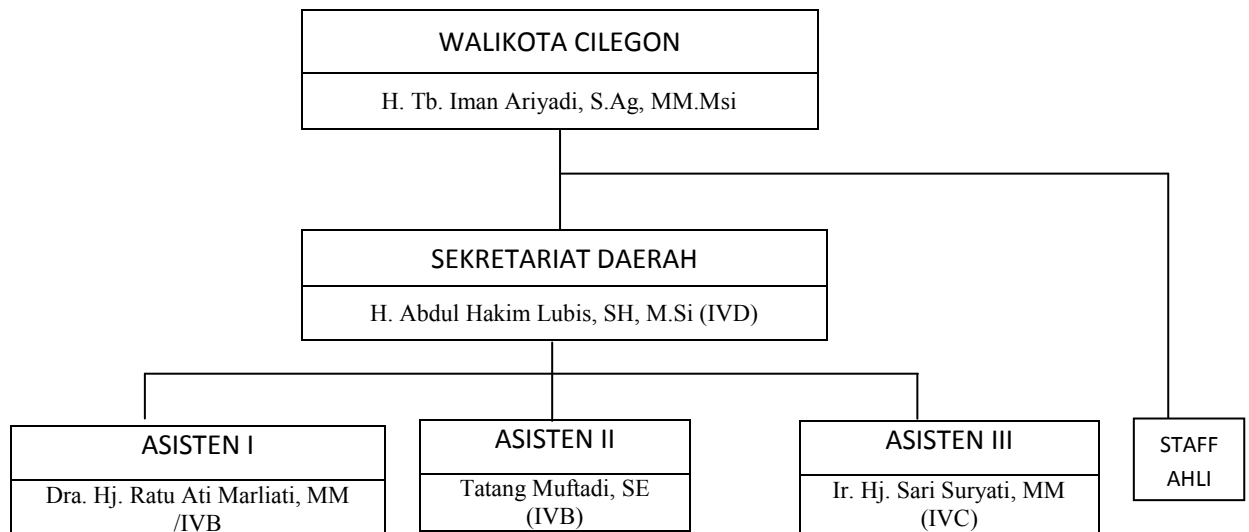
- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

3. Bagian Komunikasi dan Informasi, membawahkan :

- a. Sub Bagian Media Massa dan Publikasi;
 - b. Sub Bagian Data Elektronik, Sanditel dan Dokumentasi;
 - c. Sub Bagian Penyiaran Radio.
- C. Asisten II, membawahkan :
- 1. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
 - 2. Bagian Pengendalian Program, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Bantuan Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Sarana Keagamaan;
 - c. Sub Bagian Bina Keagamaan.
- D. Asisten III, membawahkan :
- 1. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 - 2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;

- b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Protokol.
3. Bagian Perlengkapan dan Asset, membawahkan :
- a. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Asset;
 - c. Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Asset.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan pada Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cilegon

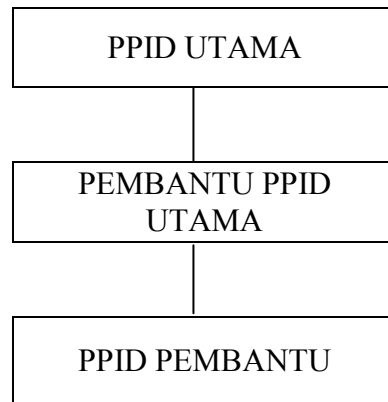
4.1.3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon

Pemberlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia khususnya di Kota Cilegon. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Dengan dibuatnya peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik

dilaksanakan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) maka pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan kebijakan berupa keputusan walikota Cilegon nomor : 060/Kep. 562-org/2012 tentang organisasi pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Kota Cilegon. Maka PPID Kota Cilegon dibentuk berdasarkan keputusan walikota Cilegon yang dikeluarkan pada tahun 2012. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Kota Cilegon berfungsi :

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi publik di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik di lingkungan pemerintahan Kota Cilegon
3. Penyelesaian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
4. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik di tingkat pusat dan tingkat satuan kerja jika diperlukan oleh satuan kerja
5. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
6. Melakukan koordinasi dengan PPID pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi

Adapun struktur organisasi dari PPID Kota Cilegon adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3 Struktur Organisasi PPID Kota Cilegon

Keterangan tentang struktur organisasi PPID Kota Cilegon dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PPID Utama : Kepala Bagian Kominfo Setda Kota Cilegon
2. Pembantu PPID Utama :
 - 1) Bidang pelayanan informasi, yaitu Kepala Sub Bagian Media Masa
 - 2) Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yaitu, Kepala Sub Bagian Data Elektronik, Dokumentasi dan Sanditel
Bagian Kominfo Setda Kota Cilegon

- 3) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa yaitu, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Cilegon.

3. PPID Pembantu :

- 1) Sekretaris pada Badan se-Kota Cilegon
- 2) Sekretaris pada Dinas se-Kota Cilegon
- 3) Sekretaris Inspektorat Kota Cilegon
- 4) Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon
- 5) Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon
- 6) Sekretaris Korp Pegawai Republik Indonesia Kota Cilegon
- 7) Kepala Bagian Pada Setda Kota Cilegon

- 8) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum setda Kota Cilegon
- 9) Sekretaris Kecamatan se-Kota Cilegon
- 10) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pemadam Kebakaran Kota Cilegon
- 11) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Penanaman Modal Kota Cilegon
- 12) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Cilegon
- 13) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon
- 14) Sekretaris Kelurahan se-Kota Cilegon

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Identitas Responden

Responden pada penelitian ini adalah seluruh instansi swasta yang berada di Kota Cilegon, yaitu perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, koperasi dan perguruan tinggi swasta yakni sebanyak 1619. Dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan tingkat kesalahan sebesar 10% maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 94 organisasi. Kemudian Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *Incidental Sampling* yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.

Dalam mengisi kuesioner responden diminta mencantumkan identitas diri guna menunjang data. Identitas diri meliputi nama, jenis kelamin, status jabatan dalam organisasi dan nama instansi/organisasi. Untuk data responden berdasarkan jenis kelamin berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat dilihat pada diagram di bawah ini :



Diagram 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram 4.1 di atas dapat diketahui bahwa prosentasi responden laki-laki sebanyak 89 orang atau 95%, sedangkan responden perempuan sebanyak 5 orang atau 5%. Jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden perempuan. Jika pada diagram dapat terlihat bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan responden perempuan itu dikarenakan laki-laki lebih banyak jumlahnya yang bekerja dibanding perempuan. Karena laki-laki bekerja untuk menghidupi keluarga lain halnya dengan perempuan, jumlah perempuan sedikit dikarenakan memang kebanyakan perempuan lebih mengurus rumah tangga dan laki-laki bekerja untuk rumah tangga tersebut. Dan bisa dikatakan jumlah laki-laki memang lebih banyak dibanding dengan perempuan pada dunia kerja.

Selanjutnya adalah identitas responden berdasarkan status jabatan dalam instansi atau organisasi, berikut diagramnya :

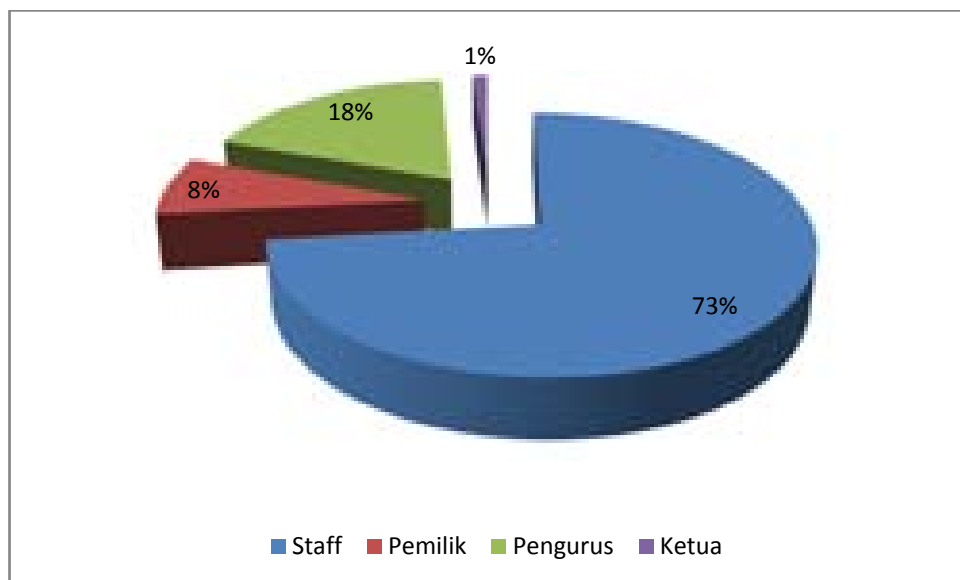


Diagram 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Status Jabatan Dalam Organisasi

Berdasarkan diagram 4.2 di atas dapat diketahui bahwa prosentasi responden yang mempunyai status jabatan sebagai staff sebanyak 68 orang atau 73%, status jabatan pengurus sebanyak 17 orang atau 18%, status jabatan pemilik sebanyak 7 orang atau 8% dan status jabatan ketua sebanyak 1 orang atau 1%. Jumlah responden dengan status jabatan staff lebih banyak dari status jabatan lainnya, ini dikarenakan staff lebih dimungkinkan membutuhkan informasi publik untuk keperluan penunjang organisasi atau instansi dibandingkan dengan status jabatan lainnya pada organisasi.

Kemudian yang selanjutnya identitas berdasarkan bentuk organisasi dari masing-masing organisasi, berikut diagramnya :

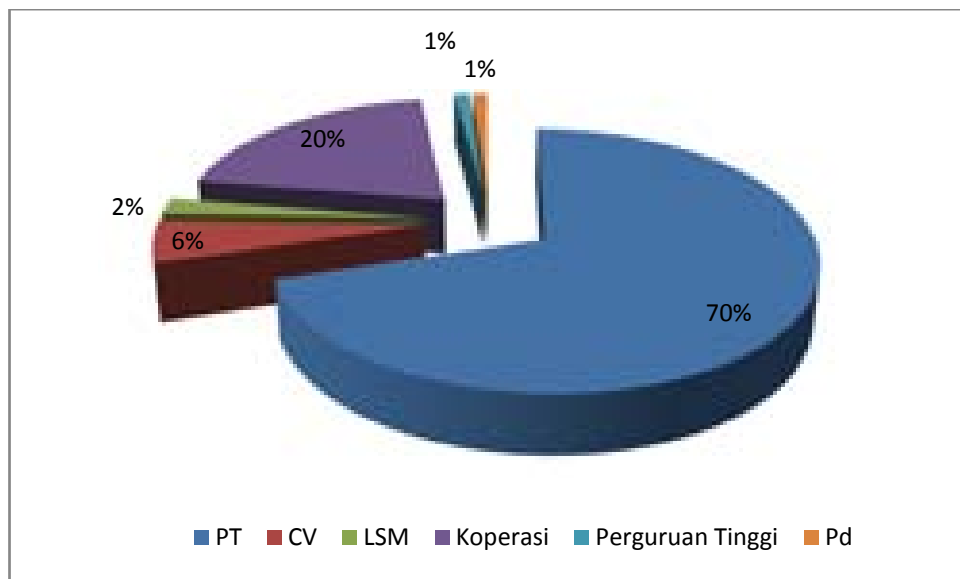


Diagram 4.3 Identitas Berdasarkan Bentuk Organisasi Masing-Masing Responden

Berdasarkan diagram 4.3 dapat diketahui bahwa prosentase identitas responden berdasarkan bentuk organisasi yaitu responden pada organisasi yang berbentuk perseroan terbatas (PT) sebanyak 66 orang atau 70%, responden pada organisasi berbentuk koperasi sebanyak 19 orang atau 20%, responden pada organisasi berbentuk persekutuan komanditer (CV) sebanyak 5 orang atau 6%, responden pada organisasi berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebanyak 2 orang atau 2% dan responden pada bentuk organisasi perusahaan dagang (Pd) dan organisasi berbentuk perguruan tinggi masing-masing 1 orang atau 1%. Jumlah responden pada organisasi berbentuk perseroan terbatas (PT) lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan responden pada bentuk organisasi lainnya itu disebabkan kepentingan terhadap informasi publik lebih banyak dibutuhkan oleh organisasi berbentuk

perseroan terbatas guna menunjang organisasi tersebut dalam menjalankan kegiatan organisasi. Perseroan terbatas berkepentingan terhadap informasi publik, dapat dideskripsikan bahwa suatu perusahaan memerlukan informasi berupa informasi pelelangan tender pembangunan begitu halnya pun dengan persekutuan komanditer (CV) yang bergerak pada bidang yang sama dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap informasi publik pada organisasi lainnya.

4.2.2. Analisis Data

4.2.2.1. Implementasi berdasarkan Dimensi Komunikasi

Implementasi pada dimensi komunikasi ini terbagi atas 3 (tiga) indikator, yaitu indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi. Berikut adalah indikator beserta pertanyaannya.

1. Indikator Transmisi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di peroleh hasil penelitian berdasarkan indikator transmisi, berikut adalah diagram dan pertanyaannya :

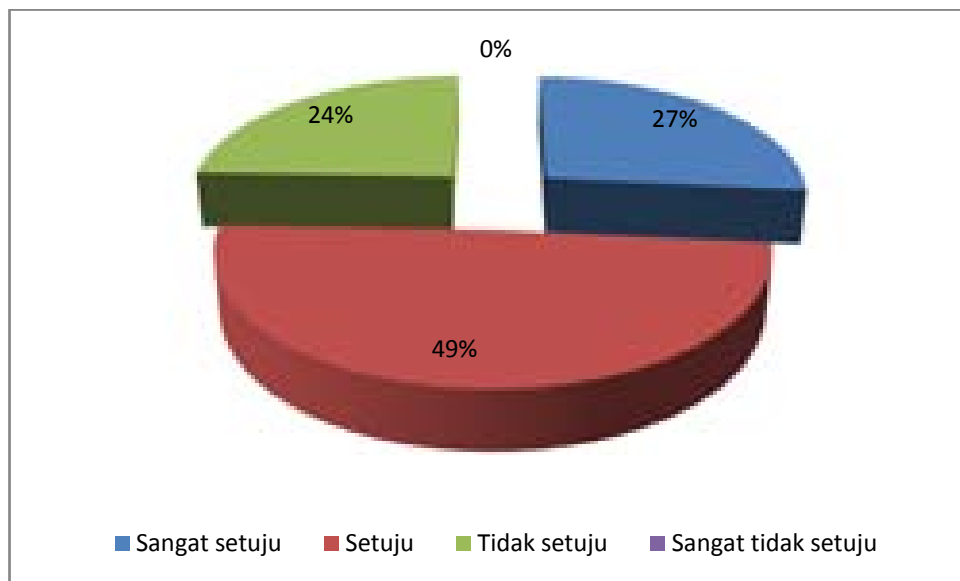


Diagram 4.4 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Secara Cepat Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.4 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan pelayanan informasi publik secara cepat adalah, 46 responden atau sekitar 49% menjawab setuju, 25 responden atau sekitar 27% menjawab sangat setuju, 23 responden atau sekitar 24% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan secara mayoritas responden setuju bahwa PPID sudah melaksanakan pelayanan informasi publik secara cepat. Adapun sebagian responden yang menjawab tidak setuju dikarenakan dalam pelayanan ada saja suatu hal yang dapat menghambat ataupun memperlambat pelayanan informasi publik. Tetapi dengan banyaknya responden yang menjawab setuju maka

dapat dikatakan bahwa selama ini PPID sudah melaksanakan pelayanan informasi publik secara cepat.

Selanjutnya diagram hasil penelitian berdasarkan butir pertanyaan kedua dalam indikator transmisi, berikut adalah diagram beserta pertanyaannya :

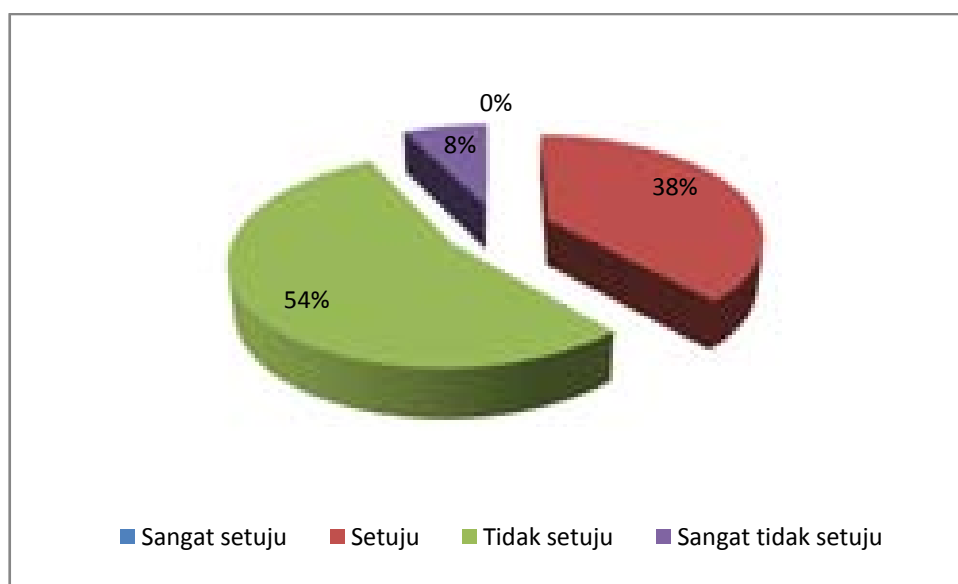


Diagram 4.5 Pelaksanaan Mekanisme Berdasarkan Prinsip Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.5 diatas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan adalah, 51 responden atau sekitar 54% menjawab tidak setuju, 36 responden atau sekitar 38% menjawab setuju, 7 responden atau sekitar 8% menjawab sangat tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak

setuju bahwa PPID sudah melaksanakan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Ini dikarenakan dalam mekanisme sesungguhnya ada pelaksanaan dari PPID yang tidak tepat dengan prinsip yang seharusnya. Dalam memperoleh informasi responden menilai kecepatan memperoleh informasi tidak secepat yang diinginkan ataupun tepat pada waktunya.

2. Indikator Kejelasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator kejelasan, berikut diagram dan pertanyaannya:

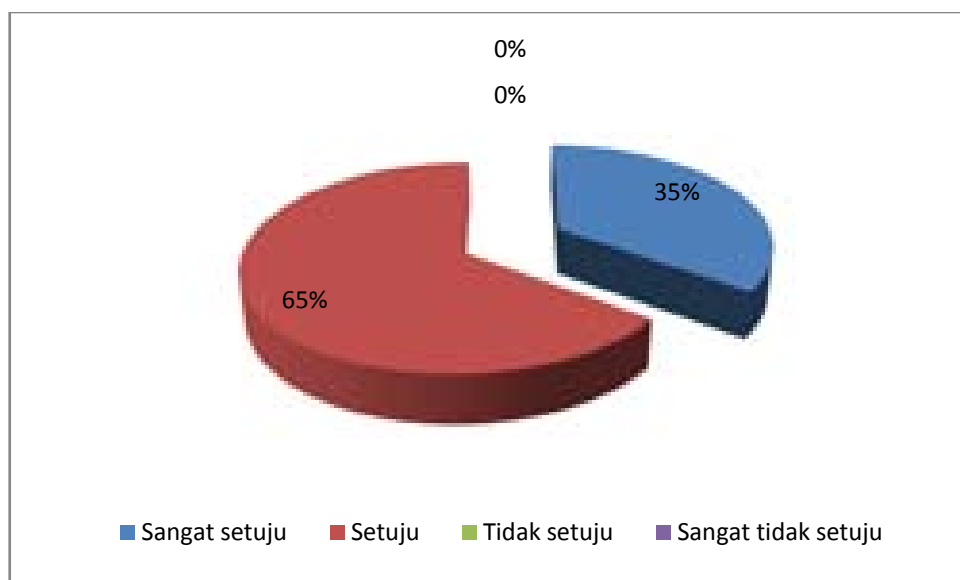


Diagram 4.6 Pelaksanaan Pembuatan Pertimbangan Tertulis Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.6 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID sudah membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik adalah, 61 responden atau sekitar 65% menjawab setuju, 33 responden atau sekitar 35% menjawab sangat setuju dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas dapat dikatakan responden menjawab setuju bahwa PPID selama ini sudah membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi setiap pemohon informasi publik. Ini dikarenakan pada pelaksanaan PPID selalu memberikan berupa keterangan tertulis kepada pemohon tentang informasi publik baik itu pada saat permohonan ataupun pada saat penyampaian informasi kepada pemohon informasi publik.

3. Indikator Konsistensi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator konsistensi, berikut diagram dan pertanyaannya:

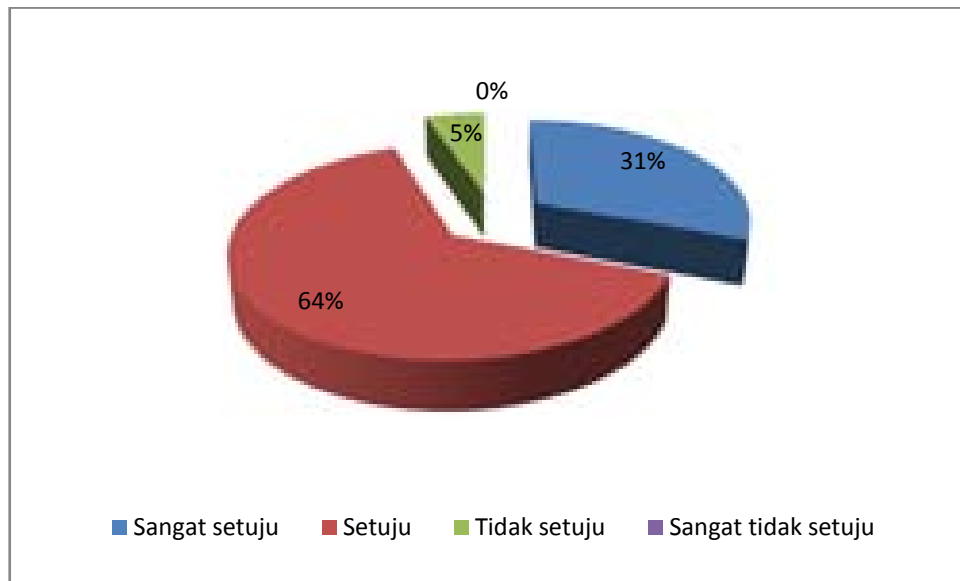


Diagram 4.7 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Sesuai Prosedur Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.7 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik adalah, 60 responden atau sekitar 64% menjawab setuju, 29 responden atau sekitar 31% menjawab sangat setuju, 5 responden atau sekitar 5% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan secara mayoritas responden setuju bahwa PPID sudah melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. PPID dalam melayani informasi publik salah satunya melakukan pencatatan mengenai data pemohon dan jenis informasi seperti apa yang diminta oleh pemohon informasi dan prosedur seperti

itu selalu dilaksanakan dalam proses pelayanan informasi publik di PPID Kota Cilegon.

4.2.2.2. Implementasi berdasarkan Dimensi Sumber Daya

Implementasi pada dimensi sumber daya ini terbagi atas empat (4) indikator, yaitu indikator staff, informasi, wewenang dan fasilitas. Berikut adalah indikator beserta pertanyaannya.

1. Indikator Staff

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator staff, berikut diagram dan pertanyaannya :

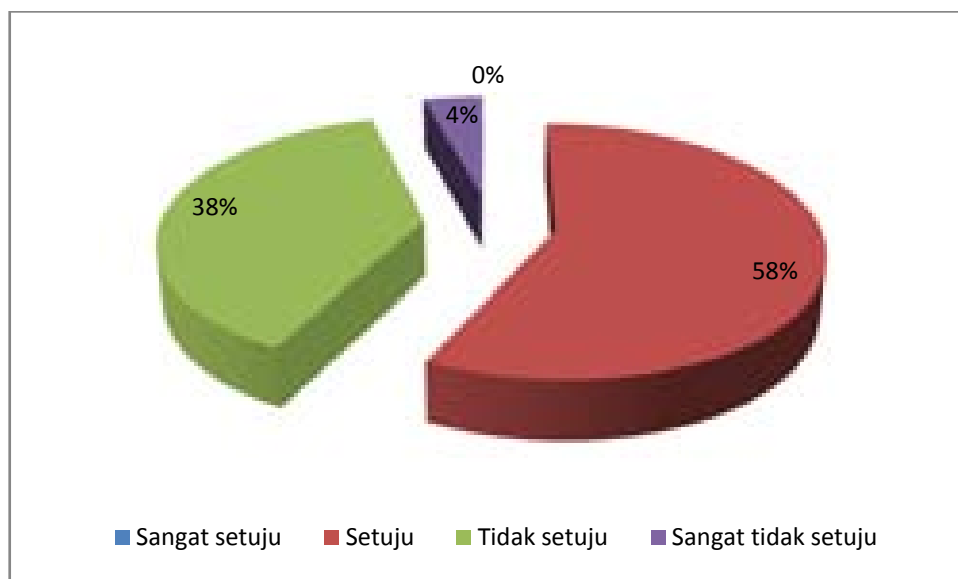


Diagram 4.8 Pelaksanaan Penunjukan Pejabat Sesuai Bidang oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.8 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID sudah dijabat oleh seseorang

yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah, 54 responden atau sekitar 58% menjawab setuju, 36 responden atau sekitar 38% menjawab tidak setuju, 4 responden atau sekitar 4% menjawab sangat tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan secara mayoritas responden menjawab setuju meskipun responden yang menjawab tidak setuju pun cukup banyak. Hal ini dikarenakan adanya keragaman dari latar belakang pejabat pelaksana dalam segi pendidikan, pelaksana pelayanan tidak selalu seseorang yang membidangi pengelolaan informasi dan dokumentasi, tetapi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sudah melaksanakan sesuai bidang yaitu melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

2. Indikator Informasi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator informasi, berikut diagram dan pertanyaannya :

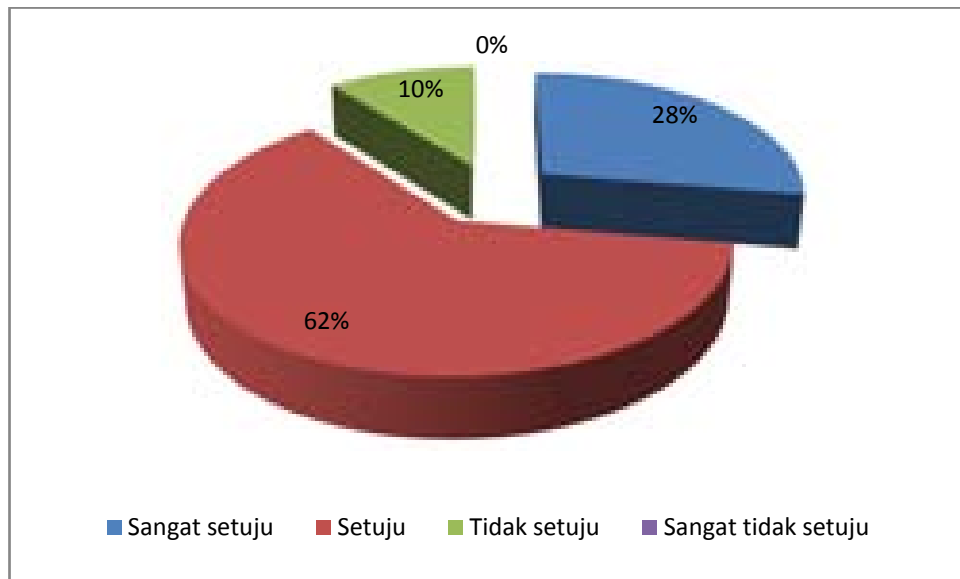


Diagram 4.9 Pelaksanaan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.9 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses adalah, 58 responden atau sekitar 62% menjawab setuju, 26 responden atau sekitar 28% menjawab sangat setuju, 10 responden atau sekitar 10% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan secara mayoritas responden menjawab setuju bahwa PPID sudah menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses. Penetapan terhadap informasi publik yang dikecualikan memang sangat penting, mengingat informasi tersebut dikecualikan pasti PPID mempunyai pertimbangan

tersendiri dan mempunyai dasar mengapa informasi publik tersebut dikecualikan. Dan setelah habis jangka waktu pengecualiannya PPID menetapkan bahwa informasi yang dulu tidak dapat diakses pada periode berikutnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sudah dapat diakses.

Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian lapangan dari butir kedua dari indikator informasi, berikut adalah diagram dan pertanyaannya :

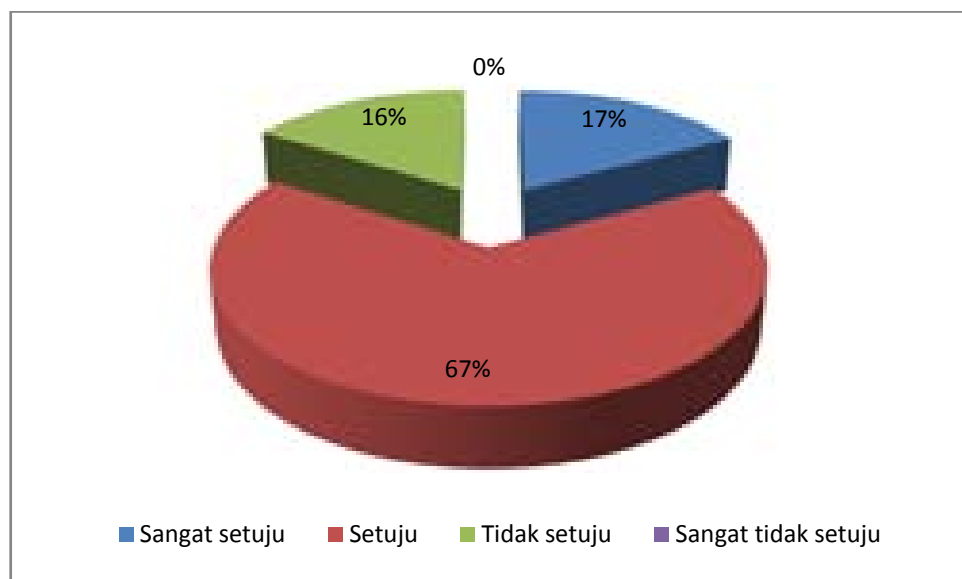


Diagram 4.10 Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.10 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan pengujian konsekuensi pada informasi publik yang disediakan adalah, 63 responden atau sekitar 67% menjawab setuju, 16 responden atau

sekitar 17% menjawab sangat setuju, 15 responden atau sekitar 16% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas dapat dikatakan responden menjawab setuju bahwa PPID sudah melaksanakan pengujian konsekuensi pada informasi publik yang disediakan. Responden menilai bahwa instansi publik dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam hal ini adalah informasi publik pasti terlebih dahulu melihat dasar hukum dan dampak dari kebijakan tersebut. Dalam hal informasi publik sebelum informasi publik itu dikeluarkan harus terlebih dahulu untuk uji konsekuensi agar di masa mendatang tidak menimbulkan suatu hal yang negatif, khususnya dalam lingkup Kota Cilegon.

3. Indikator Wewenang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator wewenang, berikut diagram dan pertanyaannya :

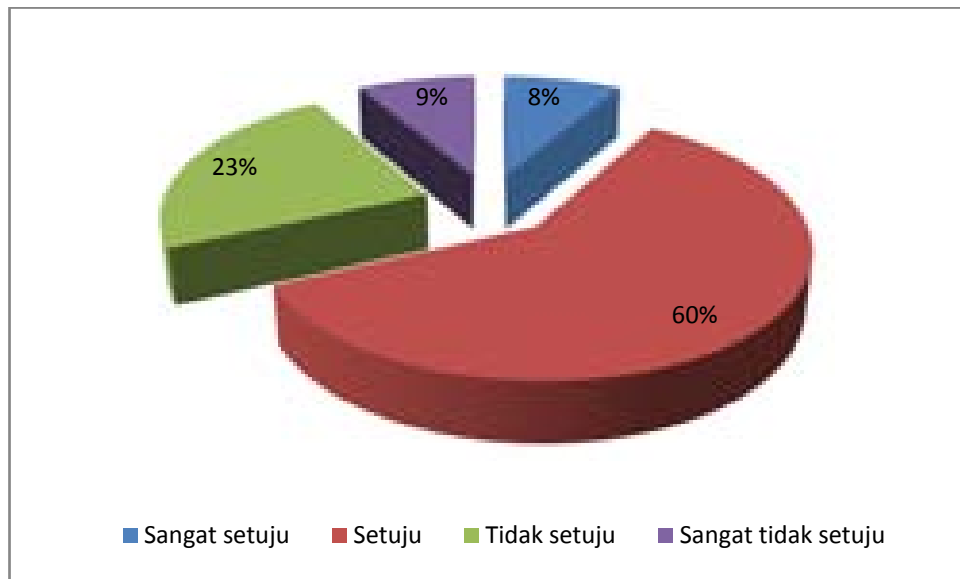


Diagram 4.11 Pelaksanaan penetapan klasifikasi Dalam Bentuk Surat Klasifikasi Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.11 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID dalam pengklasifikasian informasi sudah menetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi untuk informasi publik adalah, 56 responden atau sekitar 60% menjawab setuju, 22 responden atau sekitar 23% menjawab tidak setuju, 8 responden atau sekitar 9% menjawab sangat tidak setuju dan 8 responden atau sekitar 8% menjawab sangat setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden menjawab setuju terkait penetapan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk surat penetapan. Adapun responden yang menjawab tidak setuju dikarenakan kurangnya pengetahuan dari responden terhadap bentuk surat penetapan klasifikasi yang diolah pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah PPID Kota Cilegon.

4. Indikator Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator fasilitas, berikut diagram dan pertanyaannya :

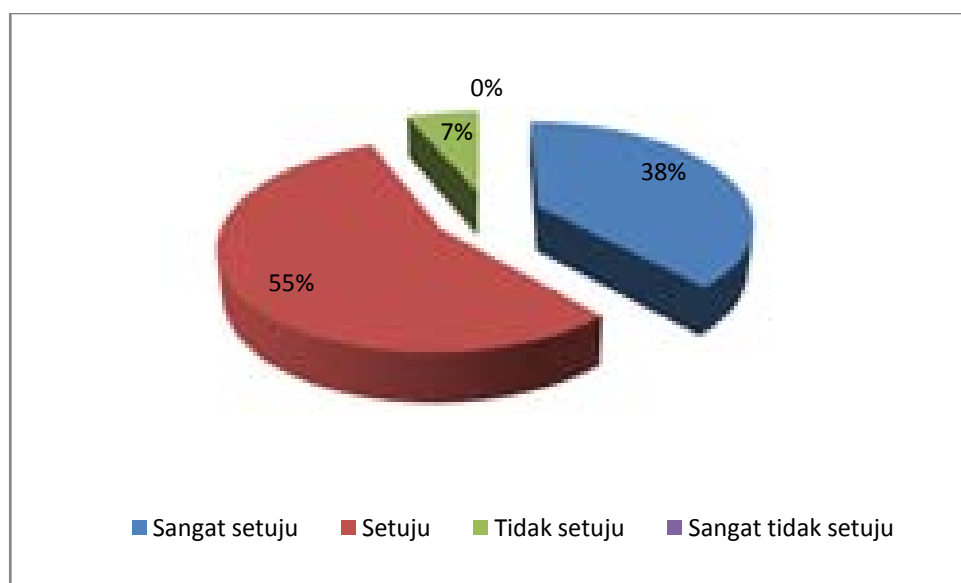


Diagram 4.12 Pelaksanaan Penyediaan Informasi Publik Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.12 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan penyediaan informasi publik adalah, 52 responden atau sekitar 55% menjawab setuju, 36 responden atau sekitar 38% menjawab sangat setuju, 6 responden atau sekitar 7% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab setuju terkait bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan

penyediaan Informasi Publik. Adapun responden yang menjawab tidak setuju dikarenakan adanya ketidak puasan responden ketika informasi yang dibutuhkan belum tersedia di PPID Kota Cilegon.

Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian lapangan dari butir kedua dari indikator fasilitas, berikut adalah diagram dan pertanyaannya :

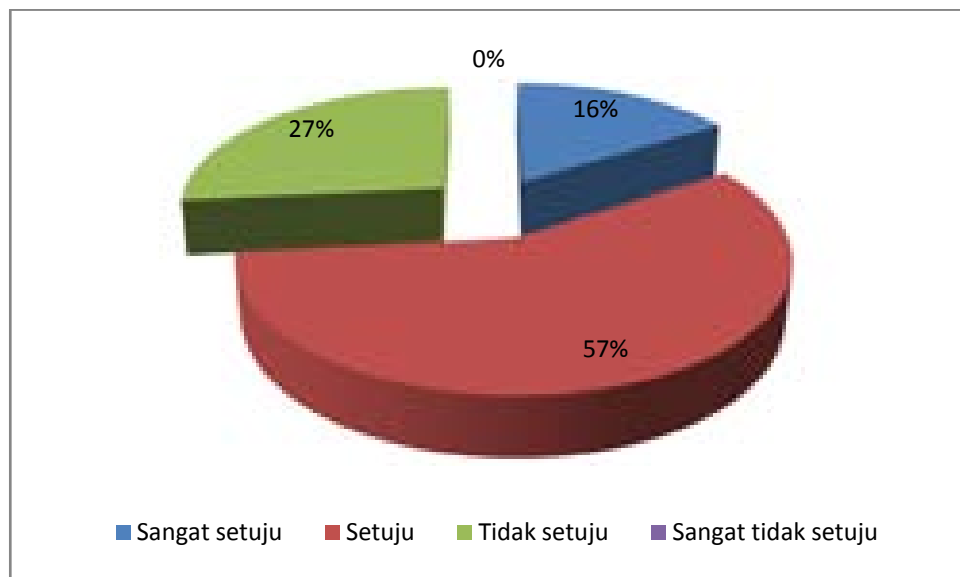


Diagram 4.13 Pelaksanaan Penyimpanan Informasi Publik Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.13 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan penyimpanan informasi publik adalah, 54 responden atau sekitar 57% menjawab setuju, 25 responden atau sekitar 27% menjawab tidak setuju, 15 responden atau sekitar 16% menjawab sangat setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatan

menjawab setuju. Adapun responden yang menjawab tidak setuju karena dalam bentuk penyampaian dan ketersediaan informasi publik melalui media elektronik masih belum lengkap. Tetapi secara mayoritas penyimpanan dalam bentuk dokumentasi sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan adanya responden yang menjawab sangat setuju dari hasil penelitian lapangan.

Berikutnya berdasarkan hasil penelitian lapangan dari butir ketiga dari indikator fasilitas, berikut adalah diagram dan pertanyaannya :

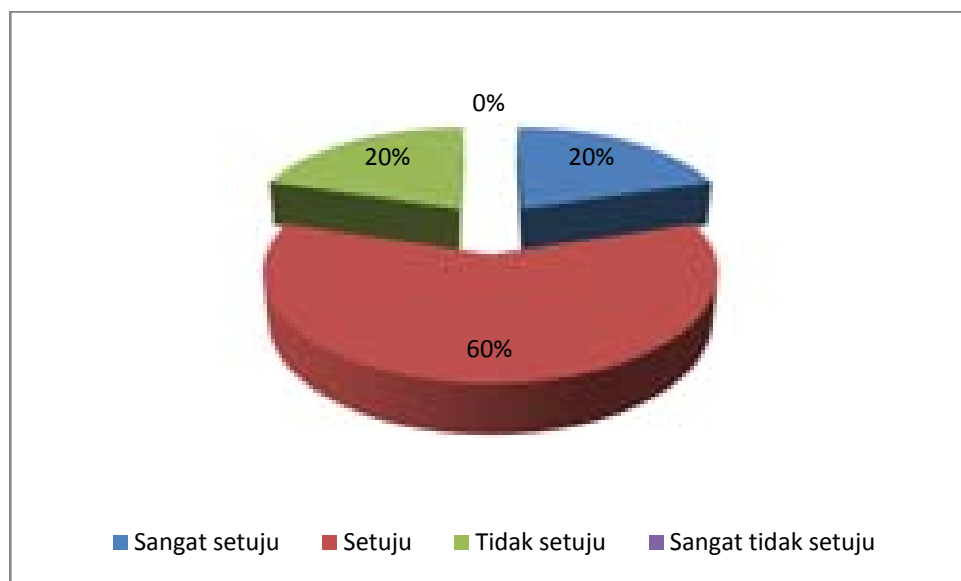


Diagram 4.14 Pelaksanaan pendokumentasian Informasi Publik Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.14 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan pendokumentasian informasi publik adalah, 56 responden atau sekitar 60% menjawab setuju, 19 responden atau

sekitar 20% menjawab sangat setuju, 19 responden atau sekitar 20% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab setuju terkait dengan pelaksanaan pendokumentasian oleh PPID Kota Cilegon. Adapun responden yang menjawab tidak setuju karena sedikit dari mayoritas responden tidak mengetahui seperti apa pendokumentasian oleh PPID selama ini. Karena jika dilihat berdasarkan dasar hukum yaitu PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pendokumentasian adalah salah satu amanat yang wajib dilaksanakan oleh PPID khususnya Pemerintah Kota Cilegon melalui PPID Kota Cilegon.

Kemudian yang terakhir berdasarkan hasil penelitian lapangan yaitu butir ketiga dari indikator fasilitas, berikut adalah diagram dan pertanyaannya :

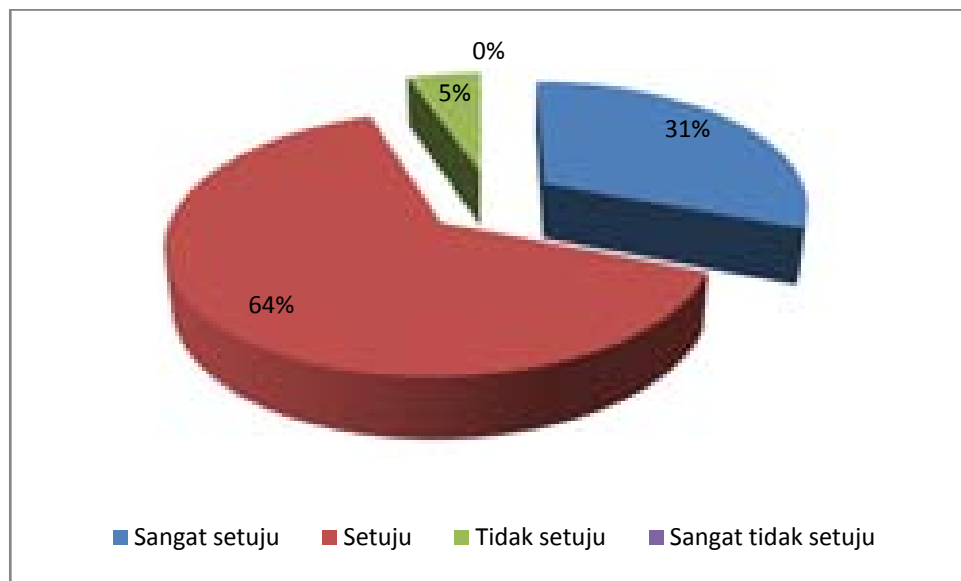


Diagram 4.15 Pelaksanaan Pengamanan Informasi Publik Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.15 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan pengamanan informasi publik adalah, 60 responden atau sekitar 64% menjawab setuju, 29 responden atau sekitar 31% menjawab sangat setuju, 5 responden atau sekitar 5% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden setuju bahwa PPID sudah melaksanakan pengamanan informasi publik dan sedikit sekali responden yang menjawab tidak setuju, karena dari beberapa yang menjawab tidak setuju tersebut belum paham tentang mengapa informasi publik harus diamankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon. Tapi hal ini dapat dipahami sebagai sesuatu keragaman pada responden yang memang tentang

keterbukaan informasi publik ini dalam implementasinya oleh PPID Kota Cilegon mulai diberlakukannya pada tahun 2012.

4.2.2.3. Implementasi berdasarkan Dimensi Disposisi

Implementasi pada dimensi disposisi ini terbagi atas dua (2) indikator, yaitu indikator pengangkatan birokrat dan insentif. Berikut adalah indikator beserta pertanyaannya.

1. Indikator Pengangkatan Birokrat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator pengangkatan birokrat, berikut diagram dan pertanyaannya :

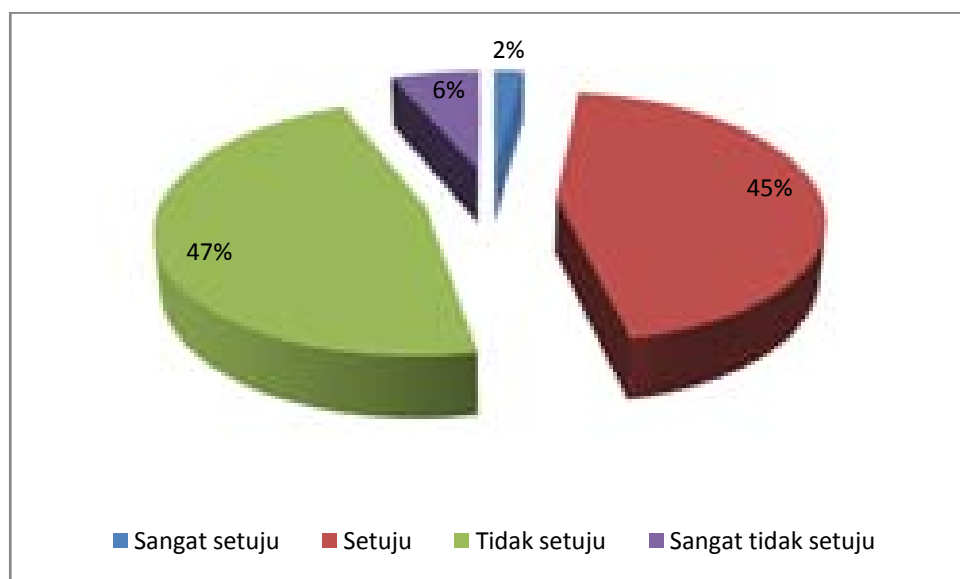


Diagram 4.16 Pelaksanaan Pengangkatan Birokrat Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.16 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan publik negara yang berada di daerah khususnya daerah Kota Cilegon merupakan pejabat yang membidangi informasi publik adalah, 44 responden atau sekitar 47 % menjawab tidak setuju, 42 responden atau sekitar 45% menjawab setuju, 6 responden atau sekitar 6% menjawab sangat tidak setuju dan 2 responden atau sekitar 2% menjawab sangat setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan tidak setuju terkait dengan pejabat yang ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan publik negara yang berada di daerah khususnya Kota Cilegon merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. Ini dikarenakan responden menilai adanya pelaksanaan dari pejabat pengelola informasi yang hanya mengurus informasi internal saja, karena hal tersebut penilaian responden menjadi tidak setuju. Indikasi lain terkait penunjukan pejabat yang tidak sesuai dengan bidang informasi publik adalah karena sedikitnya pelaksana dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara langsung, baik itu secara elektronik maupun langsung pada tempat pelayanan informasi.

2. Indikator Insentif

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator insentif, berikut diagram dan pertanyaannya :

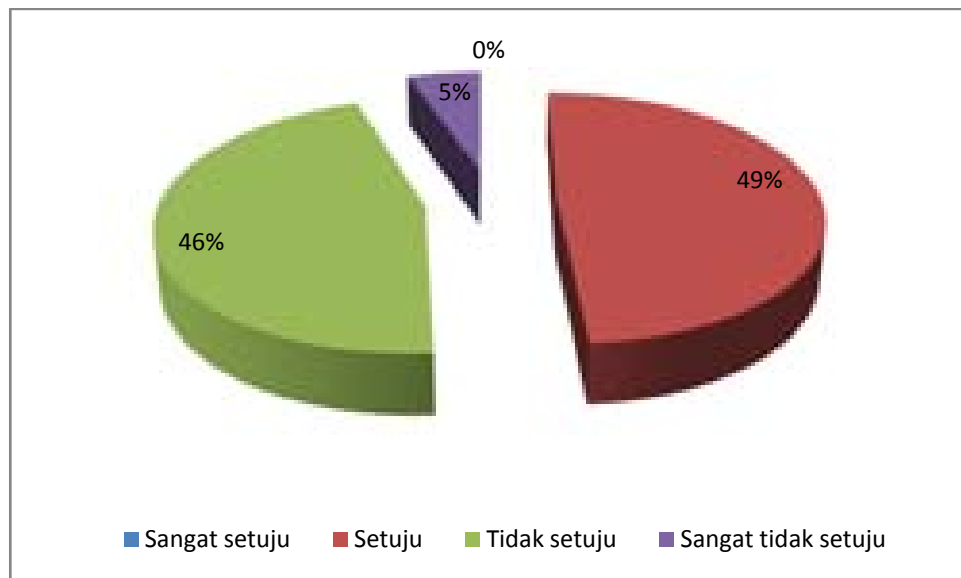


Diagram 4.17 Pelaksanaan Pemberian anggaran lebih Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.17 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa bagi pelaksana pelayanan informasi di PPID Kota Cilegon yang melaksanakan tugas tambahan untuk kepentingan pelayanan diberikan anggaran lebih untuk mendukung kelancaran tugas tersebut adalah, 46 responden atau sekitar 49% menjawab setuju, 43 responden atau sekitar 46% menjawab tidak setuju, 5 responden atau sekitar 5% menjawab sangat tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju, dikarenakan adanya penilaian responden tentang anggaran lebih untuk pelaksanaan tugas tambahan untuk kepentingan pelayanan. Responden yang menjawab setuju dikarenakan pemikiran demi kelancaran pelayanan yang ada maka sebagian responden menjawab

setuju dengan penambahan anggaran untuk kelancaran pelayanan informasi publik.

Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian lapangan dari butir kedua dari indikator insentif, berikut adalah diagram dan pertanyaannya :

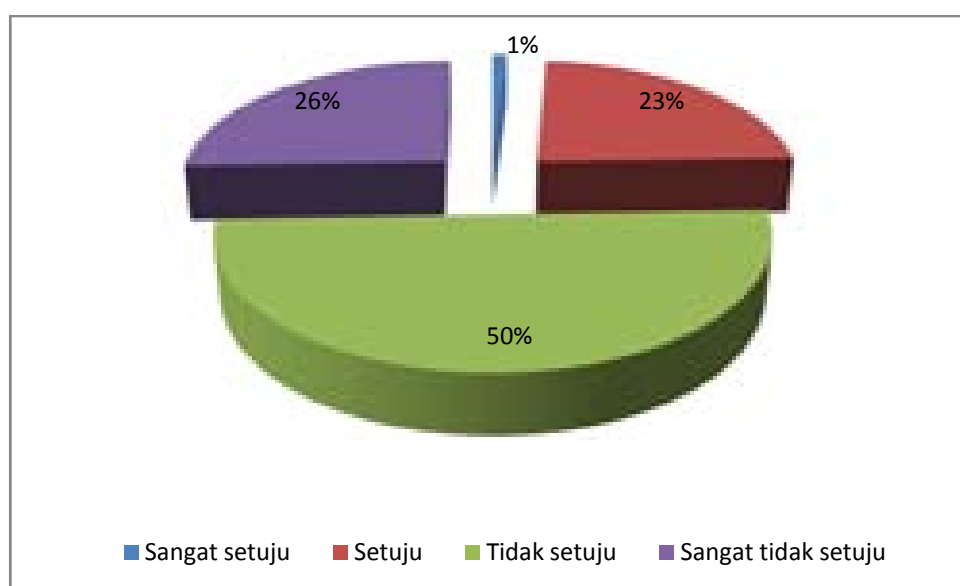


Diagram 4.18 Pelaksanaan Penambahan Anggaran Operasional Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.18 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan jika dalam anggaran biaya penyelenggaraan ditambahkan anggaran operasional untuk pejabat fungsional yang membantu PPID Kota Cilegon dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon adalah, 47 responden atau sekitar 50% menjawab tidak setuju, 24 responden atau sekitar 26% menjawab sangat tidak setuju, 22 responden atau sekitar 23% menjawab setuju dan 1 responden atau sekitar 1% menjawab sangat

setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju dengan penambahan anggaran operasional untuk pejabat fungsional dalam membantu PPID dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Ini dikarenakan responden menilai bantuan dari pejabat fungsional dalam membantu PPID dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik adalah sebagai suatu tugas yang diamanatkan oleh pemerintah Kota Cilegon demi tercapainya keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.

4.2.2.4. Implementasi berdasarkan Dimensi Struktur Birokrasi

Implementasi pada dimensi struktur birokrasi ini terbagi atas dua (2) indikator, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Berikut adalah indikator beserta pertanyaannya.

1. Indikator Standar Operasional Prosedur

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator standar operasional prosedur, berikut diagram dan pertanyaannya :

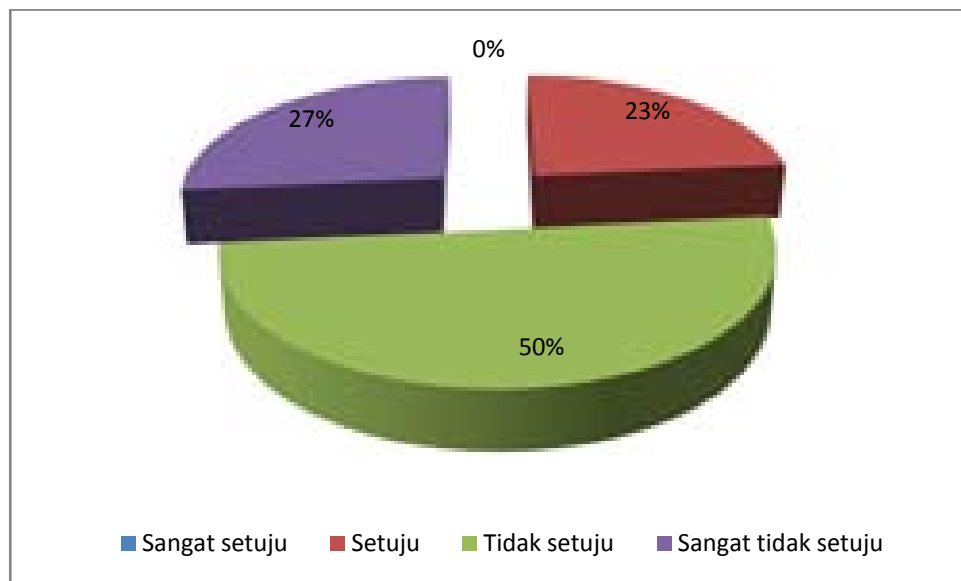


Diagram 4.19 Pelaksanaan Penetapan Prosedur Operasional Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.19 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID sudah menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik adalah, 47 responden atau sekitar 50% menjawab tidak setuju, 25 responden atau sekitar 27% menjawab sangat tidak setuju, 22 responden atau sekitar 23% menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju bahwa PPID sudah menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. Ini dikarenakan penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan masih belum maksimal, jika melihat prosedur untuk penyebarluasan informasi publik, dilihat dari penyebarluasan melalui elektronik yaitu melalui website masih belum lengkap dari segi isi yang seharusnya di muat

dalam website tersebut. Hal ini disebabkan dengan prosedur operasional penyebarluasan yang pada pelaksanaannya belum terealisasi dengan baik. Selain itu, penyebarluasan tentang informasi publik dari sosialisasi pun belum maksimal karena sosialisasi selama ini yang pernah dilaksanakan terhitung hanya satu kali.

2. Indikator Fragmentasi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil penelitian berdasarkan indikator standar fragmentasi, berikut diagram dan pertanyaannya :

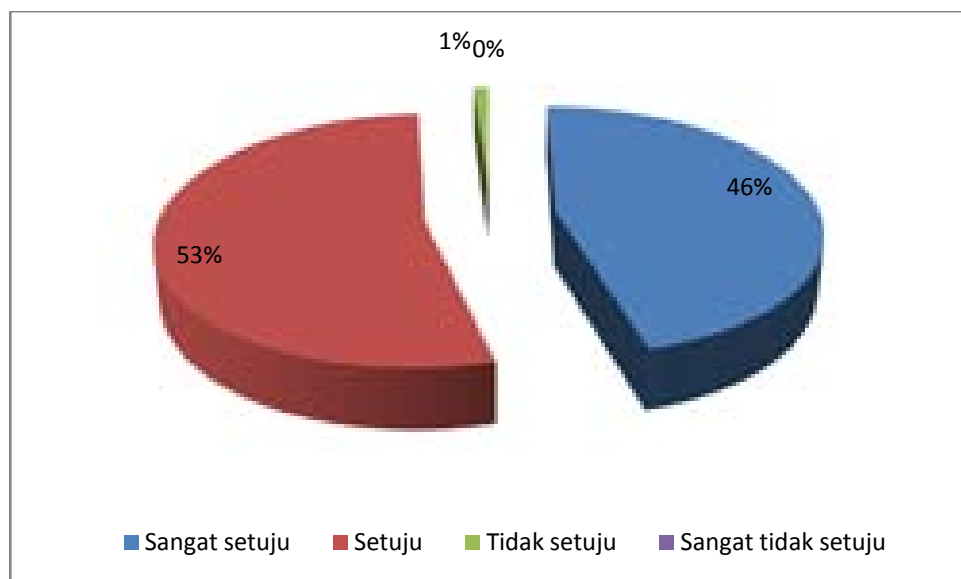


Diagram 4.20 Pelaksanaan Penetapan Klasifikasi Informasi Disetiap Badan Publik Oleh PPID

Berdasarkan diagram 4.20 di atas mengenai tanggapan responden atas pernyataan bahwa PPID sudah menetapkan

pengklasifikasian informasi disetiap badan publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang adalah, 50 responden atau sekitar 53% menjawab setuju, 43 responden atau sekitar 46% menjawab sangat setuju, 1 responden atau sekitar 1% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab setuju terkait dengan PPID sudah menetapkan pengklasifikasian informasi disetiap badan publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Ini dikarenakan responden menilai dalam pelayanan PPID mencantumkan keterangan terkait informasi yang dimohon dan meneliti terlebih dahulu apakah informasi yang dimohon layak untuk diakses sebagai informasi publik atau tidak.

4.3. Pengujian Persyaratan Statistik

4.3.1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrumen pada penelitian ini dilakukan tidak lain dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya yaitu mengukur variabel dalam penelitian. Kevalidan instrumen berarti bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran.

Uji validitas pada instrumen penelitian yang telah dibuat valid atau tidak, pengujiannya dilakukan dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment* sebagai berikut:

Pearson Product Moment

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{((n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2))}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien Korelasi Product Moment
- $\sum x$ = Jumlah skor per-item pertanyaan
- $\sum y$ = Jumlah skor total
- $\sum xy$ = Jumlah hasil kali skor pertanyaan dengan total
- $\sum x^2$ = Jumlah skor item yang dikuadratkan
- $\sum y^2$ = Jumlah skor total yang dikuadratkan
- n = Jumlah sampel

Dari hasil pengolahan data SPSS/perhitungan korelasi yang dilakukan.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas (Menggunakan SPSS v.21)

No	r hitung	r table	N	Keterangan
1	0,278	0,202	94	Valid
2	0,377	0,202	94	Valid
3	0,415	0,202	94	Valid
4	0,451	0,202	94	Valid
5	0,491	0,202	94	Valid
6	0,394	0,202	94	Valid
7	0,222	0,202	94	Valid
8	0,637	0,202	94	Valid
9	0,521	0,202	94	Valid
10	0,558	0,202	94	Valid
11	0,522	0,202	94	Valid
12	0,460	0,202	94	Valid
13	0,238	0,202	94	Valid
14	0,322	0,202	94	Valid
15	0,238	0,202	94	Valid
16	0,207	0,202	94	Valid
17	0,512	0,202	94	Valid

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2014

Dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, dimana r_{tabel} sudah ditentukan sebesar 0,202 dan taraf signifikansi sebesar 10%. Dengan jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 94 responden. Berdasarkan uji validitas pada tabel 4.1 di atas dapat di lihat r_{hitung} dari seluruh instrumen lebih besar dari r_{tabel} dan menunjukkan bahwa seluruh responden yang berjumlah 94 orang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dapat dikatakan valid. Oleh

karena itu jumlah instrumen berdasarkan perhitungan tabel di atas dikatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.3.2. Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pada tahap selanjutnya setelah melakukan uji validitas, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Reliabilitas digunakan untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach*. *Cronbach Alpha* yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel dikatakan reliabel jika nilai alpanya lebih dari 0,30 (Purwanto, 2007:181). Pengukurannya berdasarkan skala alpha Cronbach 0 sampai 1. Apabila dikelompokkan, maka skala tersebut dapat dikelompokkan dalam lima kelas dengan rentang yang sama, dan ukuran kemantapan alpha tersebut dapat diinterpretasikan :

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel
2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel
3. Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel
4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel
5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel (Triton, 2005)

Uji reliabilitas ini menggunakan bantuan SPSS versi 21 dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Uji Reliabilitas (Menggunakan SPSS v.21)

Case Processing Summary		
	N	%
Valid	94	100.0
Cases Excluded ^a	0	.0
Total	94	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Tabel 4.3
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.695	18

Berdasarkan perhitungan reliabilitas pada tabel 4.3 dapat di lihat bahwa nilai alpha cronbach 0,695. Dan menurut pengelompokkan dalam skala yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu pengelompokkan dalam skala 5 dalam buku Triton bahwa nilai 0,695 masuk dalam skala ke 4 yaitu 0,61 – 0,80 yang berarti reliabel. Jadi, dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian ini reliabel.

4.4. Pengujian Hipotesis

Penelitian “Implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon” ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

“Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon tercapai kurang dari 75% dari nilai idealnya 100%”.

Tujuan pengujian hipotesis ini yaitu untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan pada metode penelitian, pada tahap pengujian hipotesis peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Penghitungan pengujian hipotesis tersebut adalah sebagai berikut $4 \times 17 \times 94 = 6392$.

Berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal yang diperoleh adalah $4 \times 17 \times 94 = 6392$. Keterangannya adalah 4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden (kriteria penilaian skor berdasarkan skala *likert*), 17 = jumlah item pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner, dan 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk skor penelitian (lihat di lampiran tabel distribusi data) adalah sebesar 4519. Dengan demikian, maka nilai “Implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon” adalah $4519 : 6392 = 0,706$ maka diprosentasikan 70,69%.

Kemudian untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Skor ideal untuk Implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon adalah $4 \times 17 \times 94 =$

6392. Keterangannya adalah 4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan kepada responden (kriteria penilaian skor berdasarkan skala *likert*), 17 = jumlah item pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner, dan 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini dan nilai mean/nilai rata-rata adalah $6392 : 94 = 68$. Sehingga untuk Implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon tinggi bila telah mencapai 75% dari yang diharapkan, nilai yang dihipotesiskan $0,75 \times 68 = 51$. Untuk perhitungan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : H_0 untuk memprediksi μ lebih besar atau sama dengan 75% dari skor ideal.

$$H_0 = \mu \geq 75\% \geq 0,75 \times 68 = 51$$

$$H_a = \mu < 75\% < 0,75 \times 68 = 51$$

Pengujian Hipotesis menggunakan rumus t – test satu sampel dengan uji pihak kiri adalah sebagai berikut :

Diketahui :

$$\bar{x} = \frac{4519}{94} = 48,07$$

$$\mu_0 = 48,07$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{1632,48}{93}}$$

$$s = \sqrt{17,55}$$

$$s = 4,19$$

$$n = 94$$

Ditanya : t ?

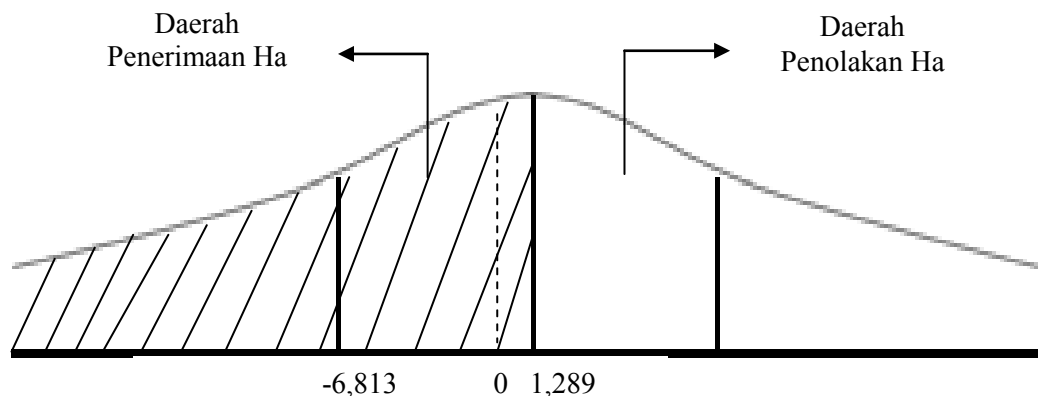
Jawab :

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{48,07 - 51}{\frac{4,19}{\sqrt{94}}}$$

$$t = \frac{-2,93}{0,43} \quad t = -6,813$$

Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan derajat kebebasan $(dk) = (n - 1) = (94 - 1) = 93$ dan taraf kesalahan $\alpha = 10\%$ untuk uji satu pihak kiri, didapat nilai t_{tabel} yaitu 1,289. Karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} ($-6,813 < 1,289$) dan jatuh pada daerah penerimaan H_a , maka hipotesis kerja (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Berikut gambar kurva penerimaan dan penolakan H_a .



Gambar 4.4 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji Pihak Kiri

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa t hitung ternyata jatuh pada daerah penerimaan H_a , dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak.

4.5. Interpretasi Hasil Penelitian

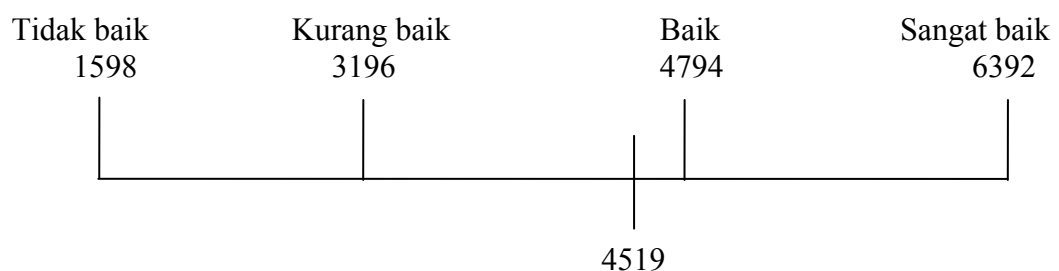
Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon sebelumnya telah mempunyai rumusan masalah deskriptif dan peneliti berusaha menjawab perumusan masalah tersebut. Rumusan masalah tersebut ialah “Seberapa Tinggi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon ?”

Untuk menjawab rumusan masalah deskriptif dalam penelitian ini, dapat dilihat dari pemaparan pengujian hipotesis yang menggunakan rumus t -test satu sampel dengan menguji pihak kiri bahwa harga t -hitung lebih kecil ($<$) dari harga t -tabel dan itu dapat diartikan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Karena dari hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis mencapai 70,69% dari angka yang diharapkan 75%.

Berdasarkan dari data pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon” mencapai 70,69%. Kemudian untuk pengkategorian dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai berikut:

1. 1598 - 3195 = Tidak Baik
2. 3196 – 4793 = Kurang Baik
3. 4794 – 6391 = Baik
4. 6392 – 7990 = Sangat Baik

Interval penilaian :



Nilai 4519 termasuk dalam kategori skor interval penilaian 3196 – 4793 = kurang baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori kurang baik. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon kurang baik.

4.6. Pembahasan

Dari teori pendekatan implementasi kebijakan yang diteorematkan oleh George Edward III, bahwa suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari 4 (empat) dimensi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur birokrasi. Jadi, dengan dimensi yang diteorematkan oleh George Edward III kita dapat menilai dan menjelaskan implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.

Berdasarkan teori tersebut untuk melihat tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan yaitu salah satunya dengan menilai dimensi komunikasi dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini yaitu implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Pada dimensi komunikasi di dalamnya terdapat transmisi dari suatu implementasi yaitu berkaitan dengan yang dimanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 61 bahwa PPID selaku pelaksana keterbukaan informasi publik dalam pelayanannya harus secara cepat dan harus sesuai dengan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan. Responden dalam hal tersebut dapat menilai apakah PPID selama ini telah melaksanakan amanat dari peraturan pemerintah tersebut dengan baik ataukah sebaliknya. Selain itu kejelasan dalam suatu implementasi pun sangat penting. Kaitannya dengan implementasi peraturan ini yaitu sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah bahwa PPID harus membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik. Konsistensi dalam implementasi peraturan

pemerintah ini pun harus dijaga karena keterkaitan dalam implementasi adalah seberapa konsisten suatu pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam pelaksanaannya dapat diketahui dari seberapa konsisten kesesuaian antara pelayanan informasi yang telah dilaksanakan dengan prosedur pelayanan informasi yang sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian selanjutnya dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah dari dimensi sumber daya, sumber daya dari segi keterampilan dan kuantitas haruslah mendukung. Kaitannya dalam implementasi kebijakan yang diteliti yaitu bahwa pejabat yang ditunjuk harus sesuai dengan kompetensi khususnya dalam bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Apabila pejabat yang telah ditunjuk sudah sesuai maka akan memungkinkan suatu implementasi dapat berhasil. Sumber daya berupa informasi pun mendukung dalam keberhasilan suatu implementasi karena dengan informasi yang diberikan oleh pihak pelaksana dapat membantu. Kaitan langsung terhadap peraturan pemerintah ini adalah informasi berupa penetapan suatu informasi yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses. Wewenang dalam proses implementasi pun harus mendukung demi keberhasilan suatu kebijakan kaitannya yaitu wewenang pelaksana dalam penetapan pengklasifikasian, karena peraturan pemerintah ini adalah berkaitan dengan informasi publik maka pengklasifikasian tersebut adalah tentang pengklasifikasian informasi publik. Sumber daya berupa fasilitas juga berperan penting dalam kaitan implemetasi peraturan pemerintah tentang keterbukaan informasi publik. PPID selaku implementor tentu saja harus

melaksanakan amanat dari PP tersebut yaitu berupa penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik.

Dimensi selanjutnya yang digunakan dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan adalah dimensi disposisi. Pada dimensi disposisi adanya pengangkatan birokrat menjadi hal yang dapat dinilai oleh responden dan kaitan langsung dengan peraturan pemerintah yaitu keharusan pengangkatan pejabat pada PPID haruslah pejabat yang membidangi informasi publik agar tercapainya keberhasilan dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tentang keterbukaan informasi publik khususnya di Kota Cilegon. Insentif dalam hal penambahan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi pun dapat dinilai oleh responden dalam implementasinya selama ini yang sudah dilakukan. Apakah insentif tersebut sudah tepat atau tidak.

Kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi struktur birokrasi. Dalam struktur birokrasi penetapan standar operasional prosedur adalah hal yang sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan, karena standar operasional prosedur tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan seperti apa peraturan tersebut dilaksanakan. Kaitan langsung dengan peraturan pemerintah ini yaitu berupa penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik yang harus ditetapkan oleh pemerintah Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh PPID Kota Cilegon. Fragmentasi yang menjadi salah satu pendukung berhasilnya dimensi struktur birokrasi ini pun dapat dinilai oleh responden. Penyebaran tanggung jawab pada setiap badan publik dalam penetapan pengklasifikasian informasi pada

tingkat eksekutif berkaitan langsung dengan yang diamanatkan pada peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan dan pengujian hipotesis, maka dapat diketahui “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon” tercapai 70,69% dari minimal 75% yang diharapkan. Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan uji hipotesis pihak kiri menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon kurang baik, karena mencapai 70,69%. Berikut pemaparan dari indikator-indikator dimensi George Edward III :

1. Nomor butir untuk indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi dari dimensi komunikasi yaitu :

1) 2 butir untuk indikator transmisi yaitu nomor 1, 2 dan jumlah nilai untuk butir tersebut $284 + 217 = 501$. Skor idealnya $= 4 \times 2 \times 94 = 752$ ($4 =$ nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; $94 =$ jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; $2 =$ jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator transmisi adalah $501 : 752 = 0,66$ atau (dikalikan 100%) menjadi 66%.

2) 1 butir untuk indikator kejelasan yaitu nomor 3 dan jumlah nilai untuk butir tersebut 315. Skor idealnya $= 4 \times 1 \times 94 = 376$ ($4 =$ nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden,

kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator kejelasan adalah $315 : 376 = 0,83$ atau (dikalikan 100%) menjadi 83%.

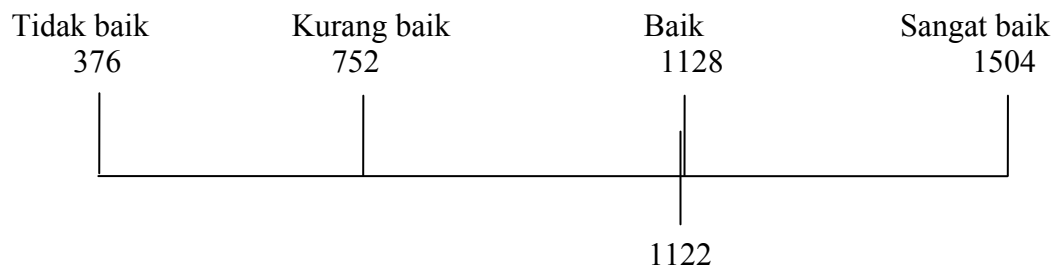
3) 1 butir untuk indikator konsistensi yaitu nomor 4 dan jumlah nilai untuk butir tersebut 306. Skor idealnya = $4 \times 1 \times 94 = 376$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator konsistensi adalah $306 : 376 = 0,81$ atau (dikalikan 100%) menjadi 81%.

Jadi, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui masing-masing skor penelitian indikator dari dimensi komunikasi yaitu, indikator transmisi memperoleh skor sebesar 501, kejelasan sebesar 315 dan konsistensi sebesar 306. Untuk mengetahui tingkat pencapaian untuk dimensi komunikasi dapat dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan skor dari masing-masing indikator dan dibagi dengan skor ideal penelitian. Skor idealnya = $4 \times 4 \times 94 = 1504$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 4 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat pencapaian dimensi

komunikasi ($501 + 315 + 306 = 1122 : 1504 = 0,74$ dikalikan 100% menjadi 74%). Kemudian untuk pengkategorian dimensi dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai berikut:

1. $376 - 751 =$ Tidak Baik
2. $752 - 1127 =$ Kurang Baik
3. $1128 - 1503 =$ Baik
4. $1504 - 1804 =$ Sangat Baik

Interval penilaian:



Nilai 1122 termasuk dalam kategori penilaian kurang baik, dan berdasarkan penilaian varian penelitian pada skor $753 - 1128 =$ kurang baik, jadi dapat dikatakan bahwa dimensi komunikasi pada implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon kurang baik.

2. Nomor butir untuk indikator staff, informasi, wewenang dan fasilitas dari dimensi sumber daya yaitu :

1) 1 butir untuk indikator staff yaitu nomor 5 dan jumlah nilai untuk butir tersebut 238. Skor idealnya = $4 \times 1 \times 94 = 376$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator konsistensi adalah $238 : 376 = 0,63$ atau (dikalikan 100%) menjadi 63%.

2) 2 butir untuk indikator informasi yaitu nomor 6, 7 dan jumlah nilai untuk butir tersebut $298 + 283 = 581$. Skor idealnya = $4 \times 2 \times 94 = 752$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 2 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator informasi adalah $581 : 752 = 0,77$ atau (dikalikan 100%) menjadi 77%.

3) 1 butir untuk indikator wewenang yaitu nomor 8 dan jumlah nilai untuk butir tersebut 252. Skor idealnya = $4 \times 1 \times 94 = 376$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah

pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator wewenang adalah $252 : 376 = 0,67$ atau (dikalikan 100%) menjadi 67%.

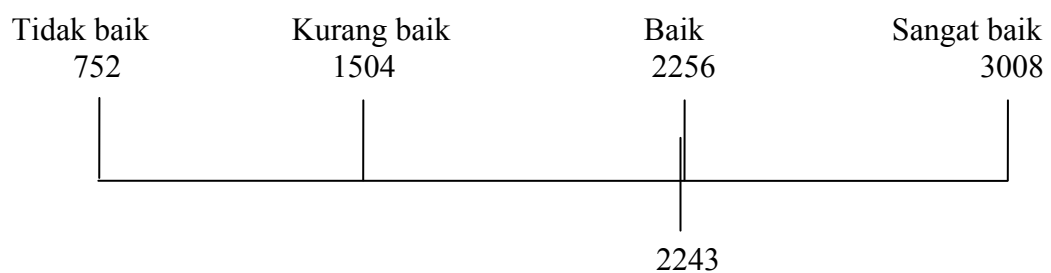
4) 4 butir untuk indikator fasilitas yaitu nomor 9, 10, 11, 12 dan jumlah nilai untuk butir tersebut $312 + 272 + 282 + 306 = 1172$. Skor idealnya = $4 \times 4 \times 94 = 1504$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 4 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator fasilitas adalah $1172 : 1504 = 0,77$ atau (dikalikan 100%) menjadi 77%.

Jadi, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui masing-masing skor penelitian indikator dari dimensi sumber daya yaitu, indikator staff memperoleh skor sebesar 238, informasi sebesar 581, wewenang sebesar 252 dan fasilitas sebesar 1172. Untuk mengetahui tingkat pencapaian untuk dimensi komunikasi dapat dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan skor dari masing-masing indikator dan dibagi dengan skor ideal penelitian. Skor idealnya = $4 \times 8 \times 94 = 3008$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 8 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat pencapaian dimensi sumber daya ($238 + 581 + 252 + 1172 = 2243 : 3008 = 0,74$

dikalikan 100% menjadi 75%. Kemudian untuk pengkategorian dimensi dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai berikut:

1. 752 - 1503 = Tidak Baik
2. 1504 – 2255 = Kurang Baik
3. 2256 – 3007 = Baik
4. 3008 – 3760 = Sangat Baik

Interval penilaian :



Nilai 2243 termasuk dalam kategori penilaian baik, dan berdasarkan penilaian varian penelitian pada skor 1504 – 2256 = kurang baik, jadi dapat dikatakan bahwa dimensi sumber daya pada implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon kurang baik.

3. Nomor butir untuk indikator pengangkatan birokrat dan insentif dari dimensi disposisi yaitu :

1) 1 butir untuk indikator pengangkatan birokrat yaitu nomor 13 dan jumlah nilai untuk butir tersebut 228. Skor idealnya = $4 \times 1 \times 94 = 376$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator pengangkatan birokrat adalah $228 : 376 = 0,60$ atau (dikalikan 100%) menjadi 60%.

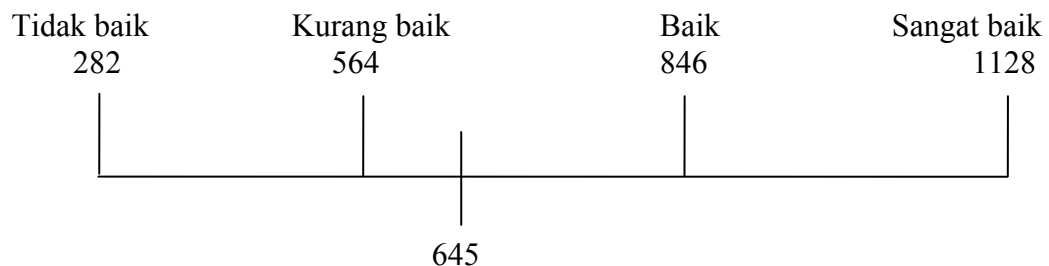
2) 2 butir untuk indikator insentif yaitu nomor 14, 15 dan jumlah nilai untuk butir tersebut $229 + 188 = 417$. Skor idealnya = $4 \times 2 \times 94 = 752$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 2 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator insentif adalah $417 : 752 = 0,55$ atau (dikalikan 100%) menjadi 55%.

Jadi, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui masing-masing skor penelitian indikator dari dimensi disposisi yaitu, indikator pengangkatan birokrat memperoleh skor sebesar 228 dan insentif sebesar 417. Untuk mengetahui tingkat pencapaian untuk dimensi disposisi dapat dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan skor dari masing-masing indikator dan dibagi dengan skor ideal

penelitian. Skor idealnya = $4 \times 3 \times 94 = 1128$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 3 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat pencapaian dimensi disposisi ($228 + 417 = 645 : 1128 = 0,57$ dikalikan 100% menjadi 57%). Kemudian untuk pengkategorian dimensi dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai berikut:

1. 282 - 563 = Tidak Baik
2. 564 - 845 = Kurang Baik
3. 846 - 1127 = Baik
4. 1128 - 1410 = Sangat Baik

Interval penilaian :



Nilai 645 termasuk dalam kategori penilaian baik, dan berdasarkan penilaian varian penelitian pada skor $564 - 845 =$ kurang baik, jadi dapat

dikatakan bahwa dimensi disposisi pada implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon kurang baik.

4. Nomor butir untuk indikator standar operasional prosedur dan fragmentasi dari dimensi struktur birokrasi yaitu :

1) 1 butir untuk indikator standar operasional prosedur yaitu nomor 16 dan jumlah nilai untuk butir tersebut 185. Skor idealnya = $4 \times 1 \times 94 = 376$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator standar operasional prosedur adalah $185 : 376 = 0,49$ atau (dikalikan 100%) menjadi 49%.

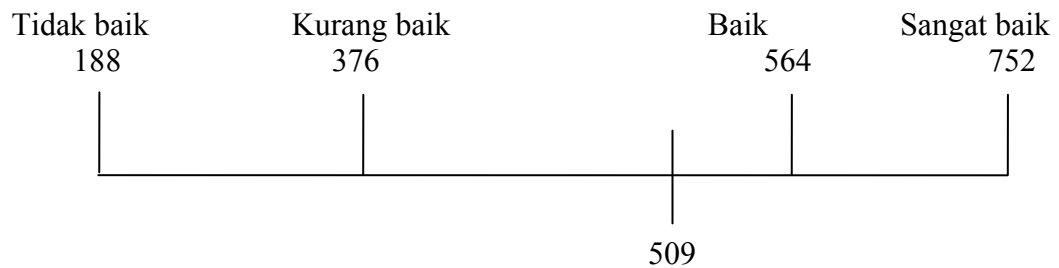
2) 1 butir untuk indikator fragmentasi yaitu nomor 17 dan jumlah nilai untuk butir tersebut 324. Skor idealnya = $4 \times 1 \times 94 = 376$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator standar fragmentasi adalah $324 : 376 = 0,86$ atau (dikalikan 100%) menjadi 86%.

Jadi, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui masing-masing skor penelitian indikator dari dimensi struktur birokrasi yaitu, indikator standar

operasional prosedur memperoleh skor sebesar 185 dan fragmentasi sebesar 324. Untuk mengetahui tingkat pencapaian untuk dimensi disposisi dapat dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan skor dari masing-masing indikator dan dibagi dengan skor ideal penelitian. Skor idealnya = $4 \times 2 \times 94 = 752$ (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Likert*; 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 2 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat pencapaian dimensi struktur birokrasi ($185 + 324 = 509 : 752 = 0,67$ dikalikan 100% menjadi 67%). Kemudian untuk pengkategorian dimensi dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai berikut:

1. 188 - 375 = Tidak Baik
2. 376 – 563 = Kurang Baik
3. 564 – 751 = Baik
4. 752 – 940 = Sangat Baik

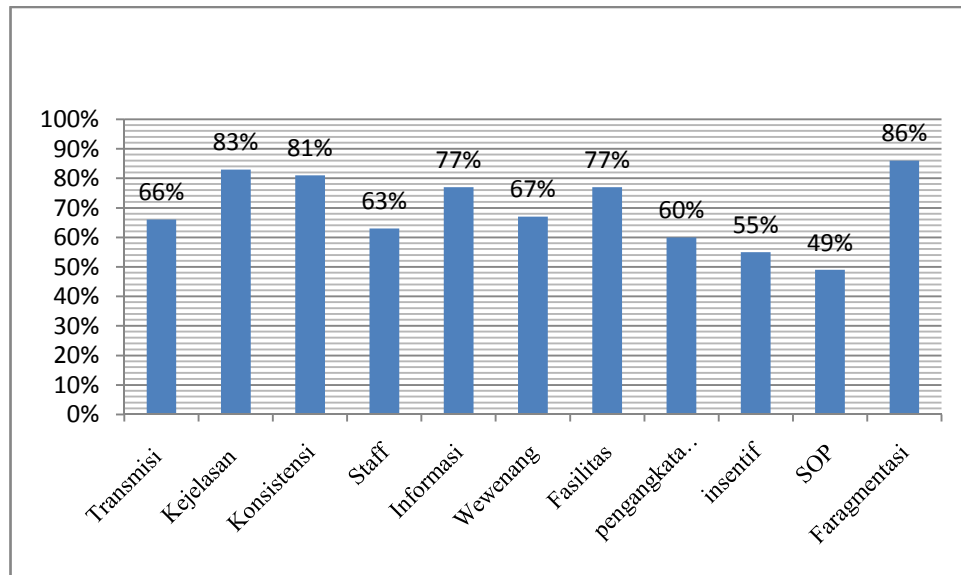
Interval penilaian :



Nilai 509 termasuk dalam kategori penilaian baik, dan berdasarkan penilaian varian penelitian pada skor $376 - 563 =$ kurang baik, jadi dapat dikatakan bahwa dimensi struktur birokrasi pada implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon kurang baik.

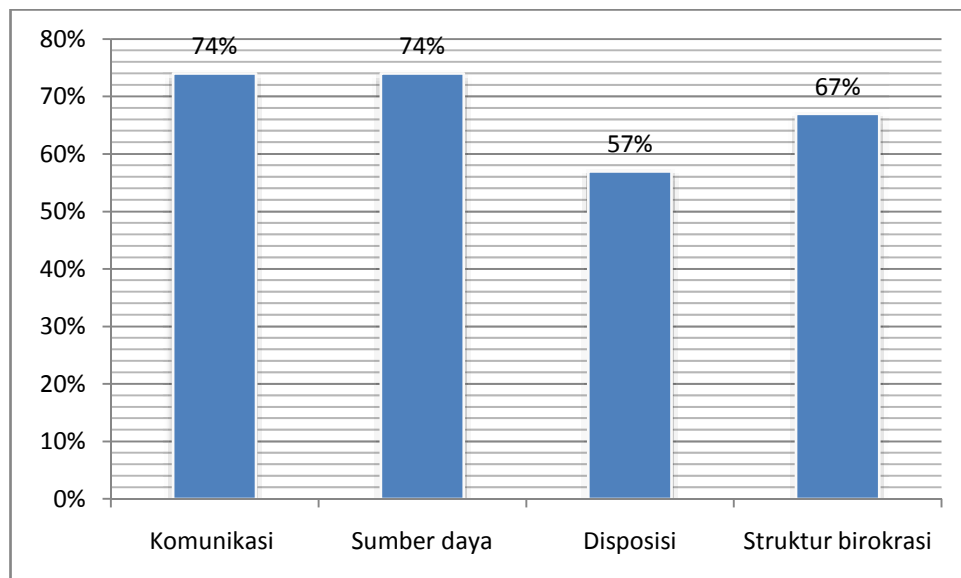
Untuk mempermudah dalam melihat tingkat capaian persetujuan masing-masing indikator dan tingkat capaian masing-masing dimensi, berikut adalah diagram indikator dan diagram dimensi berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Diagram 4.21
Capaian Tingkat Persetujuan Tiap-Tiap Indikator Penelitian



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2014

Diagram 4.22
Capaian Tingkat Keberhasilan Tiap-Tiap Dimensi



Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2014

Berdasarkan diagram ketercapaian indikator dan ketercapaian dimensi di atas, dapat dijelaskan untuk indikator dari 11 indikator yang terdapat pada masing-masing dimensi terdapat 6 indikator yang mendapatkan prosentase masih rendah. Keenam indikator tersebut yaitu, indikator transmisi, staff, wewenang, pengangkatan birokrat, insentif, dan standar operasional prosedur.

Selanjutnya ketercapaian dimensi berdasarkan diagram 4.22 dapat dijelaskan ketercapaian dimensi komunikasi sebesar 74%, hal ini disebabkan dari 3 indikator yang terdapat pada dimensi komunikasi adanya indikator yang mendapat prosentasi masih rendah yaitu indikator transmisi. Kemudian selanjutnya adalah dimensi sumber daya, ketercapaiannya sebesar 74%, dikarenakan dari 4 indikator dalam dimensi ini terdapat 2 indikator yang mendapatkan prosentase masih rendah indikator tersebut yaitu indikator staf dan wewenang. Dimensi disposisi berdasarkan diagram ketercapaiannya sebesar 57%, hal ini disebabkan dari 2 indikator dalam dimensi ini keduanya mendapatkan prosentasi masi rendah, indikator tersebut yaitu indikator pengangkatan birokrat dan insentif. Dimensi terakhir yaitu dimensi struktur birokrasi dimana berdasarkan diagram ketercapaian dimensi ini sebesar 67%, hal ini disebabkan dari 2 indikator dalam dimensi terdapat 1 indikator yang mendapatkan prosentase masih rendah yaitu indikator standar operasional prosedur.

Berdasarkan capaian keseluruhan dari tiap-tiap indikator dan dimensi, bahwa dapat dikatakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon masuk dalam kategori kurang baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon” dalam pencapaiannya di lapangan sebesar 70,69% dari yang diharapkan. Ini berarti ketercapaian lebih kecil dari hipotesis awal yaitu 75% dari nilai ideal 100%, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak.

Dalam hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang timbul dalam proses implementasi belum dapat teratasi sepenuhnya, diantaranya permasalahan dari Komunikasi yaitu transmisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan yang pada mekanismenya berdasarkan pada prinsip cepat, tepat dan biaya ringan. Kemudian permasalahan dari sumber daya pun masih ada yang belum dapat diatasi yaitu pada staff dan wewenang, pada staff yaitu kompetensi yang dimiliki pelaksana dan pada wewenang yaitu bentuk wewenang pejabat dalam penetapan pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya disposisi pada proses implementasi yaitu permasalahan pengangkatan birokrat dan insentif, pada masalah pengangkatan birokrat kurangnya perhatian dari pelaksana terhadap kesesuaian bidang dan dedikasi dalam melaksanakan peraturan pemerintah,

sedangkan masalah insentif pelaksana belum dapat menentukan apakah anggaran lebih dibutuhkan dalam menunjang pelayanan agar lebih efektif dalam proses implementasi di lapangan. Selain itu permasalahan standar operasional prosedur dalam implementasi di lapangan. Penyebabnya adalah belum konsistennya pelaksanaan standar operasional prosedur dalam pelaksanaannya selama ini sehingga timbul masalah yang menghambat implementasi. Pelaksana dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Transmisi dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu mekanisme didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan harus diperhatikan dengan cara lebih respon terhadap informasi apa saja yang dibutuhkan pemohon informasi publik agar dalam pelayanan informasi dapat dilakukan secara cepat.
2. Staf dalam pelaksanaan pelayanan haruslah dipilih secara tepat yaitu seseorang yang memiliki kompetensi di bidangnya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
3. Wewenang yang dimiliki oleh para pejabat harus digunakan secara tepat, dalam arti di sini agar wewenang dalam penetapan lebih berkontribusi terhadap pengguna informasi publik.

4. Pengangkatan birokrat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik harus dipilih berdasarkan bidang dan dedikasi yang dimiliki oleh pelaksana. Pemilihan pelaksana yang baik adalah salah satu cara dalam mengatasi masalah yang timbul dari disposisi demi terciptanya keterbukaan informasi publik yang baik khususnya dalam implementasi di lapangan.

5. Ketentuan atas pemberian insentif perlu dipertimbangkan secara baik, sesuai dengan pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan pelayanan. Tujuannya agar insentif yang telah ditentukan efektif dan efisien dan berkontribusi positif terhadap pelaksanaan tugas dilapangan. Jadi, ketentuan atas pemberian insentif dengan mempertimbangkan tugas dilapangan adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah insentif yang timbul dalam proses implementasi peraturan pemerintah.

6. Mengawasi jalannya proses implementasi dalam pelaksanaan Standar operasional prosedur dalam pelaksanaan di lapangan. Cara dalam mengatasi masalah standar operasional prosedur dalam proses implementasi yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Tujuannya agar terciptanya konsistensi para pelaksana dalam menjalankan proses implementasi sesuai dengan aturan yaitu standar operasional prosedur yang berlaku dalam implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS :

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alwasilah, A.Chaedar. 2006. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : DIA FISIP Universitas Indonesia.
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant . 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne 2001. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prasetyo, Bambang. Miftahul Jannah, Lina. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo
- Purwanto. 2007. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Solichin, Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta

- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 1992. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Usman, Husaini dan dan Purnomo setiady Akbar. 2011. *Metode penelitian sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Graфика Persada
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia
- Widya Wicaksono, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Jogjakarta: Graha ilmu

SUMBER LAIN :

Cilegon Dalam Angka 2013

Statistik Daerah Kota Cilegon 2013

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.562-org/2012 Tentang Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Cilegon

Kuesioner Penelitian

Identitas Responden

Nama Stakeholder :
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan
Status :
Instansi swasta : Perusahaan/ LSM/ Koperasi/ Perguruan Tinggi
Nama Instansi :

Petunjuk Pengisian

1. Bacalah angket ini dengan teliti, supaya Bapak/Ibu mengerti maksud pertanyaannya.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dari beberapa pilihan dengan cara di silang (X).
3. Apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti dapat ditanyakan langsung kepada peneliti.
4. Kumpulkan jawaban secara langsung kepada peneliti.

A. Pertanyaan yang berkaitan dengan Dimensi Komunikasi

A1. Indikator Transmisi

1. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sudah melaksanakan pelayanan informasi publik secara cepat ?

a. Sangat setuju	c. Tidak setuju
b. Setuju	d. Sangat tidak setuju
2. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan?

a. Sangat setuju	c. Tidak setuju
b. Setuju	d. Sangat tidak setuju

A2. Indikator Kejelasan

3. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik?

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | c. Tidak setuju |
| b. Setuju | d. Sangat tidak setuju |

A3. Indikator Konsistensi

4. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik?

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | c. Tidak setuju |
| b. Setuju | d. Sangat tidak setuju |

B. Pertanyaan yang berkaitan dengan Dimensi Sumber Daya

B1. Indikator Staff

5. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi?

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | c. Tidak setuju |
| b. Setuju | d. Sangat tidak setuju |

B2. Indikator Informasi

6. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses?

- | | |
|------------------|------------------------|
| a. Sangat setuju | c. Tidak setuju |
| b. Setuju | d. Sangat tidak setuju |

7. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan pengujian konsekuensi pada informasi publik yang disediakan?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

B3. Indikator Wewenang

8. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID dalam pengklasifikasian informasi sudah menetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi untuk informasi publik?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

B4. Indikator Fasilitas

9. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan penyediaan informasi publik?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
10. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan penyimpanan informasi publik?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju
11. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan pendokumentasian informasi publik?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

12. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan pengamanan informasi publik?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Tidak setuju
- d. Sangat tidak setuju

C. Pertanyaan yang berkaitan dengan Dimensi Disposisi

C1. Indikator Pengangkatan Birokrat

13. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan publik negara yang berada di daerah khususnya daerah Kota Cilegon merupakan pejabat yang membidangi informasi publik?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Tidak setuju
- d. Sangat tidak setuju

C2. Indikator Insentif

14. Setujukah saudara/i dengan pernyataan bahwa bagi pelaksana pelayanan informasi di PPID Kota Cilegon yang melaksanakan tugas tambahan untuk kepentingan pelayanan diberikan anggaran lebih untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tsb?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Tidak setuju
- d. Sangat tidak setuju

15. Menurut saudara/i setujukan jika dalam anggaran biaya penyelenggaraan ditambahkan anggaran operasional untuk pejabat fungsional yang membantu PPID Kota Cilegon dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon?

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Tidak setuju
- d. Sangat tidak setuju

D. Pertanyaan yang berkaitan dengan Dimensi Struktur birokrasi

D1. Indikator Standar Operasional Prosedur

16. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

D2. Indikator Fragmentasi

17. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah menetapkan pengklasifikasian informasi di setiap badan publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang?
- a. Sangat setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak setuju
 - d. Sangat tidak setuju

Tabel Skor Kuesioner Penelitian

No. Responden	Item Pertanyaan																	JML	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	4	2	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	2	2	3	47	
2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3	1	2	4	47	
3	3	1	3	2	2	3	3	1	3	2	2	3	3	3	1	2	3	40	
4	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	1	1	1	3	45	
5	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	1	1	4	46	
6	2	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	3	49	
7	4	3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3	3	1	1	2	3	44	
8	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	4	4	3	3	1	1	3	48	
9	2	3	4	3	2	3	3	1	3	3	3	2	3	2	1	2	3	43	
10	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	2	2	3	54	
11	3	2	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	3	2	2	4	50	
12	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	47	
13	2	2	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	1	4	51	
14	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	1	1	3	36	
15	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	3	1	4	51	
16	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	42	
17	3	3	4	4	3	3	2	3	2	4	2	3	3	2	2	2	4	49	
18	4	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	1	3	45	
19	2	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	2	2	2	4	54	
20	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	4	48	
21	3	2	4	3	2	2	2	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	48	
22	3	2	3	4	2	4	3	3	3	3	4	3	2	2	2	1	3	47	
23	2	2	4	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	46	
24	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	2	2	3	4	54	
25	2	3	3	2	2	3	2	3	3	4	2	3	3	3	1	1	4	44	
26	3	3	4	3	2	4	3	4	2	4	2	4	3	2	2	2	4	51	
27	4	2	3	3	2	3	3	2	4	4	3	4	3	2	2	2	4	50	
28	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	1	4	45	
29	3	2	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	2	3	2	2	3	51	
30	3	3	4	3	1	2	4	3	4	3	3	2	2	2	1	3	4	47	
31	3	1	3	3	1	3	3	1	3	2	2	3	2	1	2	2	3	38	
32	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	2	1	4	51
33	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	4	51	
34	2	3	3	3	2	4	4	3	4	3	3	3	3	3	2	1	4	50	
35	3	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	4	44	

36	3	2	4	3	3	4	3	2	4	3	3	3	2	2	2	2	4	49
37	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	4	50
38	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	2	2	1	4	50
39	2	3	3	3	2	2	4	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	50
40	4	2	4	2	2	4	3	2	4	3	3	2	2	2	2	3	4	48
41	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	2	2	2	3	49
42	4	2	4	3	2	3	2	3	4	3	4	2	3	3	3	3	4	52
43	4	2	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	2	3	2	2	4	50
44	4	2	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	1	3	44
45	2	3	4	4	3	4	4	1	4	2	4	2	3	2	1	2	4	49
46	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	4	51
47	3	2	4	4	2	4	3	3	4	3	4	3	2	3	2	2	4	52
48	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	1	2	3	42
49	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	2	3	1	3	41
50	3	1	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	46
51	4	2	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	2	3	1	1	4	51
52	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	2	3	3	2	3	51
53	3	3	3	3	1	4	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	4	51
54	3	2	4	4	2	4	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	51
55	3	1	3	3	1	3	3	1	3	2	2	3	2	3	2	3	3	41
56	4	3	3	4	2	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	3	53
57	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	2	3	2	1	3	49
58	3	3	3	4	2	2	4	3	4	4	4	4	3	2	2	3	4	54
59	3	2	3	4	3	4	3	2	4	3	3	3	2	2	3	2	3	49
60	3	2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	3	2	2	4	51
61	2	3	4	4	3	3	2	2	4	3	4	3	3	2	2	2	3	49
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	1	4	51
63	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	4	4	3	2	1	2	4	52
64	4	2	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	2	2	1	3	4	54
65	4	2	3	4	3	2	3	4	4	2	3	3	2	3	2	1	4	49
66	4	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	2	3	46
67	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	2	3	4	55
68	3	3	4	4	2	3	2	3	4	4	3	3	3	2	3	2	3	51
69	3	2	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	2	3	2	1	4	53
70	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	45
71	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	1	3	3	3	42
72	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	47
73	4	2	4	4	3	4	4	3	4	3	2	4	2	3	2	3	4	55
74	3	2	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	2	2	2	3	50

75	4	2	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	2	3	2	3	4	55
76	4	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	53
77	4	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	2	1	3	3	45
78	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	2	3	3	1	1	2	4	51
79	3	2	4	3	2	3	3	3	4	3	3	3	2	2	2	1	4	47
80	3	2	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	2	3	4	3	3	55
81	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	2	3	3	43
82	2	2	3	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	43
83	3	2	3	4	3	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2	3	3	46
84	4	2	4	4	3	3	4	3	4	3	2	3	1	2	1	2	4	49
85	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	2	2	1	3	3	46
86	3	2	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	2	3	2	3	3	53
87	3	1	3	3	2	3	3	1	3	2	2	3	1	3	1	3	3	40
88	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	1	2	2	1	3	48
89	3	1	3	3	2	3	3	1	3	2	2	3	1	3	1	1	3	38
90	4	2	3	4	3	3	2	3	4	3	4	3	2	2	1	1	3	47
91	2	2	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	2	3	2	2	3	47
92	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	2	2	1	2	3	48
93	3	1	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	1	2	2	1	2	42
94	3	2	4	4	3	4	3	2	3	3	3	3	1	3	1	2	3	47
Jumlah																	4519	

Tabel Penolong Penghitungan Hasil Kuesioner

No	X	\bar{X}	$X - \bar{X}$	$(X - \bar{X})^2$
1	47	48.07	-1.07	1.1449
2	47	48.07	-1.07	1.1449
3	40	48.07	-8.07	65.1249
4	45	48.07	-3.07	9.4249
5	46	48.07	-2.07	4.2849
6	49	48.07	0.93	0.8649
7	44	48.07	-4.07	16.5649
8	48	48.07	-0.07	0.0049
9	43	48.07	-5.07	25.7049
10	54	48.07	5.93	35.1649
11	50	48.07	1.93	3.7249
12	47	48.07	-1.07	1.1449
13	51	48.07	2.93	8.5849
14	36	48.07	-12.07	145.6849
15	51	48.07	2.93	8.5849
16	42	48.07	-6.07	36.8449
17	49	48.07	0.93	0.8649
18	45	48.07	-3.07	9.4249
19	54	48.07	5.93	35.1649
20	48	48.07	-0.07	0.0049
21	48	48.07	-0.07	0.0049
22	47	48.07	-1.07	1.1449
23	46	48.07	-2.07	4.2849
24	54	48.07	5.93	35.1649
25	44	48.07	-4.07	16.5649
26	51	48.07	2.93	8.5849
27	50	48.07	1.93	3.7249
28	45	48.07	-3.07	9.4249
29	51	48.07	2.93	8.5849
30	47	48.07	-1.07	1.1449
31	38	48.07	-10.07	101.4049

32	51	48.07	2.93	8.5849
33	51	48.07	2.93	8.5849
34	50	48.07	1.93	3.7249
35	44	48.07	-4.07	16.5649
36	49	48.07	0.93	0.8649
37	50	48.07	1.93	3.7249
38	50	48.07	1.93	3.7249
39	50	48.07	1.93	3.7249
40	48	48.07	-0.07	0.0049
41	49	48.07	0.93	0.8649
42	52	48.07	3.93	15.4449
43	50	48.07	1.93	3.7249
44	44	48.07	-4.07	16.5649
45	49	48.07	0.93	0.8649
46	51	48.07	2.93	8.5849
47	52	48.07	3.93	15.4449
48	42	48.07	-6.07	36.8449
49	41	48.07	-7.07	49.9849
50	46	48.07	-2.07	4.2849
51	51	48.07	2.93	8.5849
52	51	48.07	2.93	8.5849
53	51	48.07	2.93	8.5849
54	51	48.07	2.93	8.5849
55	41	48.07	-7.07	49.9849
56	53	48.07	4.93	24.3049
57	49	48.07	0.93	0.8649
58	54	48.07	5.93	35.1649
59	49	48.07	0.93	0.8649
60	51	48.07	2.93	8.5849
61	49	48.07	0.93	0.8649
62	51	48.07	2.93	8.5849
63	52	48.07	3.93	15.4449
64	54	48.07	5.93	35.1649
65	49	48.07	0.93	0.8649

66	46	48.07	-2.07	4.2849
67	55	48.07	6.93	48.0249
68	51	48.07	2.93	8.5849
69	53	48.07	4.93	24.3049
70	45	48.07	-3.07	9.4249
71	42	48.07	-6.07	36.8449
72	47	48.07	-1.07	1.1449
73	55	48.07	6.93	48.0249
74	50	48.07	1.93	3.7249
75	55	48.07	6.93	48.0249
76	53	48.07	4.93	24.3049
77	45	48.07	-3.07	9.4249
78	51	48.07	2.93	8.5849
79	47	48.07	-1.07	1.1449
80	55	48.07	6.93	48.0249
81	43	48.07	-5.07	25.7049
82	43	48.07	-5.07	25.7049
83	46	48.07	-2.07	4.2849
84	49	48.07	0.93	0.8649
85	46	48.07	-2.07	4.2849
86	53	48.07	4.93	24.3049
87	40	48.07	-8.07	65.1249
88	48	48.07	-0.07	0.0049
89	38	48.07	-10.07	101.4049
90	47	48.07	-1.07	1.1449
91	47	48.07	-1.07	1.1449
92	48	48.07	-0.07	0.0049
93	42	48.07	-6.07	36.8449
94	47	48.07	-1.07	1.1449
Jumlah				1632.481

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00
9 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

[DataSet0]

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007
VAR00001	Pearson Correlation	1	-.263 [*]	.040	.150	.127	.092	.103
	Sig. (2-tailed)		.011	.698	.149	.222	.380	.322
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00002	Pearson Correlation	-.263 [*]	1	-.104	-.149	.046	-.028	-.040
	Sig. (2-tailed)	.011		.317	.151	.645	.790	.700
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00003	Pearson Correlation	.040	.104	1	.146	.133	.314 ^{***}	.103
	Sig. (2-tailed)	.698	.317		.150	.202	.002	.324
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00004	Pearson Correlation	.150	-.149	.146	1	.312 ^{***}	.194	.025
	Sig. (2-tailed)	.149	.151	.159		.002	.061	.606
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00005	Pearson Correlation	.127	.046	.133	.312 ^{***}	1	.232 [*]	.079
	Sig. (2-tailed)	.222	.645	.202	.002		.025	.448
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00006	Pearson Correlation	.092	-.028	.314 ^{***}	.194	.232 [*]	1	.057
	Sig. (2-tailed)	.380	.790	.002	.061	.025		.585
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00007	Pearson Correlation	.103	-.040	.103	.025	.079	.057	1
	Sig. (2-tailed)	.322	.700	.324	.606	.448	.585	
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00008	Pearson Correlation	.093	.314 ^{***}	.135	.253 ^{**}	.319 ^{***}	.146	.107
	Sig. (2-tailed)	.375	.002	.194	.014	.002	.160	.304
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00009	Pearson Correlation	.212 [*]	.083	.283 ^{***}	.311 ^{***}	.064	.179	.179
	Sig. (2-tailed)	.040	.429	.006	.002	.540	.084	.064
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00010	Pearson Correlation	.097	.387 ^{***}	.191	.108	.295 ^{***}	.214	.061
	Sig. (2-tailed)	.350	.000	.065	.301	.004	.038	.502
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00011	Pearson Correlation	.234 [*]	.139	.105	.215 [*]	.376 ^{***}	.141	.000
	Sig. (2-tailed)	.023	.182	.313	.037	.000	.176	1.000
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00012	Pearson Correlation	.013	.084	.064	.067	.276 ^{***}	.161	.093
	Sig. (2-tailed)	.698	.419	.537	.520	.007	.120	.371
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00013	Pearson Correlation	-.228 [*]	.540 ^{***}	-.036	-.097	-.065	-.161	-.156
	Sig. (2-tailed)	.027	.000	.730	.356	.533	.120	.133
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00014	Pearson Correlation	-.022	-.168	.023	.060	.254 [*]	.091	-.045
	Sig. (2-tailed)	.834	.105	.628	.629	.013	.383	.668
	N	94	94	94	94	94	94	94

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007
VAR00015	Pearson Correlation	-.062	-.024	-.031	.054	-.050	-.025	-.078
	Sig. (2-tailed)	.434	.817	.770	.608	.629	.815	.405
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00016	Pearson Correlation	.022	.023	.191	.104	-.115	.038	.001
	Sig. (2-tailed)	.830	.825	.065	.318	.271	.714	.994
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00017	Pearson Correlation	.204*	.240*	.312**	.124	.196	.167	.127
	Sig. (2-tailed)	.048	.020	.002	.235	.111	.107	.232
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00018	Pearson Correlation	.276**	.377**	.415**	.451**	.491**	.394**	.322**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000	.000	.000	.032
	N	94	94	94	94	94	94	94

Correlations

		VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012	VAR00013	VAR00014
VAR00015	Pearson Correlation	.215*	.099	-.045	-.023	.134	.113	.172
	Sig. (2-tailed)	.038	.341	.664	.820	.198	.277	.087
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00016	Pearson Correlation	-.019	.101	-.054	-.047	-.002	.000	.033
	Sig. (2-tailed)	.863	.330	.603	.660	.954	.981	.751
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00017	Pearson Correlation	.231*	.405**	.302**	.181	.010	.132	.127
	Sig. (2-tailed)	.025	.000	.003	.120	.921	.200	.221
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00018	Pearson Correlation	.537**	.521**	.558**	.522**	.460**	.238*	.322**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.021	.002
	N	94	94	94	94	94	94	94

Correlations

		VAR00015	VAR00016	VAR00017	VAR00018
VAR00015	Pearson Correlation	1	.041	-.064	.238*
	Sig. (2-tailed)		.603	.418	.021
	N	94	94	94	94
VAR00016	Pearson Correlation	.041	1	.039	.207*
	Sig. (2-tailed)	.603		.700	.046
	N	94	94	94	94
VAR00017	Pearson Correlation	-.064	.039	1	.512**
	Sig. (2-tailed)	.418	.709		.000
	N	94	94	94	94
VAR00018	Pearson Correlation	.238*	.207*	.512**	1
	Sig. (2-tailed)	.021	.046	.000	
	N	94	94	94	94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITY

```

/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009
VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 VAR00014 VAR00015 VAR00016 VAR00017 VAR00018
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
    
```

Correlations

		VAR00015	VAR00016	VAR00017	VAR00018
VAR00001	Pearson Correlation	-.002	.022	.204 [*]	.276 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.434	.830	.048	.007
	N	94	94	94	94
VAR00002	Pearson Correlation	-.024	.023	.240 [*]	.377 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.817	.825	.020	.000
	N	94	94	94	94
VAR00003	Pearson Correlation	-.031	.191	.312 ^{**}	.415 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.770	.065	.002	.000
	N	94	94	94	94
VAR00004	Pearson Correlation	.054	.104	.124	.451 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.606	.318	.235	.000
	N	94	94	94	94
VAR00005	Pearson Correlation	-.060	-.115	.166	.491 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.629	.271	.111	.000
	N	94	94	94	94
VAR00006	Pearson Correlation	-.025	.038	.167	.394 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.815	.714	.107	.000
	N	94	94	94	94
VAR00007	Pearson Correlation	-.076	.001	.127	.222 [*]
	Sig. (2-tailed)	.465	.994	.222	.032
	N	94	94	94	94
VAR00008	Pearson Correlation	.215 [*]	-.019	.231 [*]	.637 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.038	.853	.025	.000
	N	94	94	94	94
VAR00009	Pearson Correlation	.099	.101	.405 ^{**}	.521 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.341	.330	.000	.000
	N	94	94	94	94
VAR00010	Pearson Correlation	-.045	-.054	.302 ^{**}	.556 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.694	.603	.003	.000
	N	94	94	94	94
VAR00011	Pearson Correlation	-.023	-.047	.161	.522 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.826	.660	.120	.000
	N	94	94	94	94
VAR00012	Pearson Correlation	.134	-.062	.010	.460 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.196	.554	.921	.000
	N	94	94	94	94
VAR00013	Pearson Correlation	.113	.006	.132	.238 [*]
	Sig. (2-tailed)	.277	.951	.205	.021
	N	94	94	94	94
VAR00014	Pearson Correlation	.172	.033	.127	.322 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.097	.791	.221	.002
	N	94	94	94	94

Correlations

		VAR00008	VAR00009	VAR00010	VAR00011	VAR00012	VAR00013	VAR00014
VAR00001	Pearson Correlation	.093	.212 ^{**}	.097	.234 ^{**}	.013	-.228 ^{**}	-.022
	Sig. (2-tailed)	.375	.040	.350	.023	.898	.027	.834
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00002	Pearson Correlation	.314 ^{**}	.083	.387 ^{**}	.139	.084	.540 ^{**}	-.168
	Sig. (2-tailed)	.002	.429	.000	.182	.410	.000	.105
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00003	Pearson Correlation	.135	.283 ^{**}	.101	.105	.094	-.008	.023
	Sig. (2-tailed)	.194	.006	.065	.313	.537	.730	.828
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00004	Pearson Correlation	.253 ^{**}	.311 ^{**}	.108	.215 ^{**}	.087	-.097	.050
	Sig. (2-tailed)	.014	.002	.301	.037	.520	.350	.629
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00005	Pearson Correlation	.319 ^{**}	.064	.205 ^{**}	.376 ^{**}	.278 ^{**}	-.065	.254 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.002	.540	.004	.000	.007	.533	.013
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00006	Pearson Correlation	.146	.179	.214 ^{**}	.141	.161	-.101	.091
	Sig. (2-tailed)	.160	.064	.038	.176	.120	.120	.383
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00007	Pearson Correlation	.107	.179	.091	.000	.093	-.156	-.045
	Sig. (2-tailed)	.304	.064	.562	1.000	.371	.133	.668
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00008	Pearson Correlation	1	.135	.372 ^{**}	.179	.436 ^{**}	.083	.218 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.194	.000	.064	.000	.425	.035
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00009	Pearson Correlation	.135	1	.118	.313 ^{**}	.045	.007	.119
	Sig. (2-tailed)	.194		.257	.002	.670	.950	.251
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00010	Pearson Correlation	.372 ^{**}	.118	1	.260 ^{**}	.320 ^{**}	.212 ^{**}	-.018
	Sig. (2-tailed)	.000	.257		.011	.002	.040	.855
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00011	Pearson Correlation	.179	.313 ^{**}	.260 ^{**}	1	.154	.130	.226 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.064	.002	.011		.139	.212	.029
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00012	Pearson Correlation	.436 ^{**}	.045	.320 ^{**}	.154	1	.145	.215 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.000	.670	.002	.139		.162	.037
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00013	Pearson Correlation	.083	.007	.212 ^{**}	.130	.145	1	-.068
	Sig. (2-tailed)	.425	.950	.040	.212	.162		.514
	N	94	94	94	94	94	94	94
VAR00014	Pearson Correlation	.218 ^{**}	.119	-.018	.226 ^{**}	.215 ^{**}	-.068	1
	Sig. (2-tailed)	.035	.251	.855	.029	.037	.514	
	N	94	94	94	94	94	94	94

TABEL II
NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t

α untuk uji dua pihak (two tail test)						
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
α untuk uji satu pihak (one tail test)						
dk	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,766	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,366	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	0,692	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,691	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,690	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	0,689	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,688	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	0,687	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
60	0,679	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

TABEL III
NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Tingkat Signifikan		N	Tingkat Signifikan		N	Tingkat Signifikan	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi: 1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Ploso (0254) 280310 Ext. 278, Fax. (0254) 281247 Palembang Sempang Buntar
url: <http://www.fkip-unirta.ac.id>, Email: kowak@fkip-unirta.ac.id

Nomor : 775 / UN.AJ.A.LPG/2013

02 Oktober 2013

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth.
SETDA KOTA CILEGON BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
di
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : IKHWAN EFENDI

NIM : 6661103222

Semester : VII

Mata Kuliah : SKRIPSI

Judul : EVALUASI PERATURAN PEMERINTAH NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DI KOTA CILEGON

Data : OBSERVASI, WAWANCARA, DATA LAINNYA YANG DI BUTUHKAN diperlukan

Untuk itu kami berharap dan mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011



PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN KESBANG DAN LINMAS

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Lantai IV,
Telp. : (0254) 376273 Fax. : (0254) 376273
CILEGON - BANTEN

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 545 /Orgn.Kesbang/2014

- Dasar :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Surat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tentang Permohonan Ijin Mencari Data.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah perlu izin penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan rekomendasi penelitian;

Walikota Cilegon, memberikan rekomendasi kepada :

- N a m a** : IKHWAN EPENDI
- Alamat Mahasiswa** : Jln. Ki Hasyim Lnk. Jangkar Kulon RT 002 RW 004 Kelurahan Tegol Ratu Kecamatan Ciwandan
- Judul Penelitian** : Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon.
- Tujuan Penelitian** : Untuk Mengetahui Keterbukaan Informasi Di Kota Cilegon.
- Lokasi Penelitian** : PPID KOTA CILEGON, PERUSAHAAN, KOPERASI, LSM/ORMAS DAN PERGURUAN TINGGI SWASTA di Kota Cilegon.
- Bidang Penelitian** : Administrasi Negara.
- Status Peneliti** : Mahasiswa/i.
- Penanggung jawab Penelitian** : Rina Yulianti, Stp. M.Si.
- Anggota Peneliti** : -
- Lembaga** : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Jangka Waktu Penelitian** : 02 September 2014 s.d 02 Desember 2014

SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Melaporkan kedatangannya, kepada Camat, Lurah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setempat dengan memajukan Surat Rekomendasi Penelitian ini;
- b. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian / Survey/ PKL yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud;
- c. Harus menaati ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
- d. Wajib mengajukan perpanjangan Penelitian /Survey/ PKL apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir tetapi pelaksanaan penelitian belum selesai;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata terdapat hal - hal yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat pada umumnya;
- f. Wajib melaporkan secara tertulis kepada Badan Kesbanglinmas Kota Cilegon, dalam waktu paling Lama 1 minggu setelah selesai kegiatan Penelitian.
- g. Kepada Semua Instansi / Lembaga yang terkait dimohon bantuan seperahnya.

Cilegon, 02 September 2014

a.n WALIKOTA CILEGON

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KOTA CILEGON

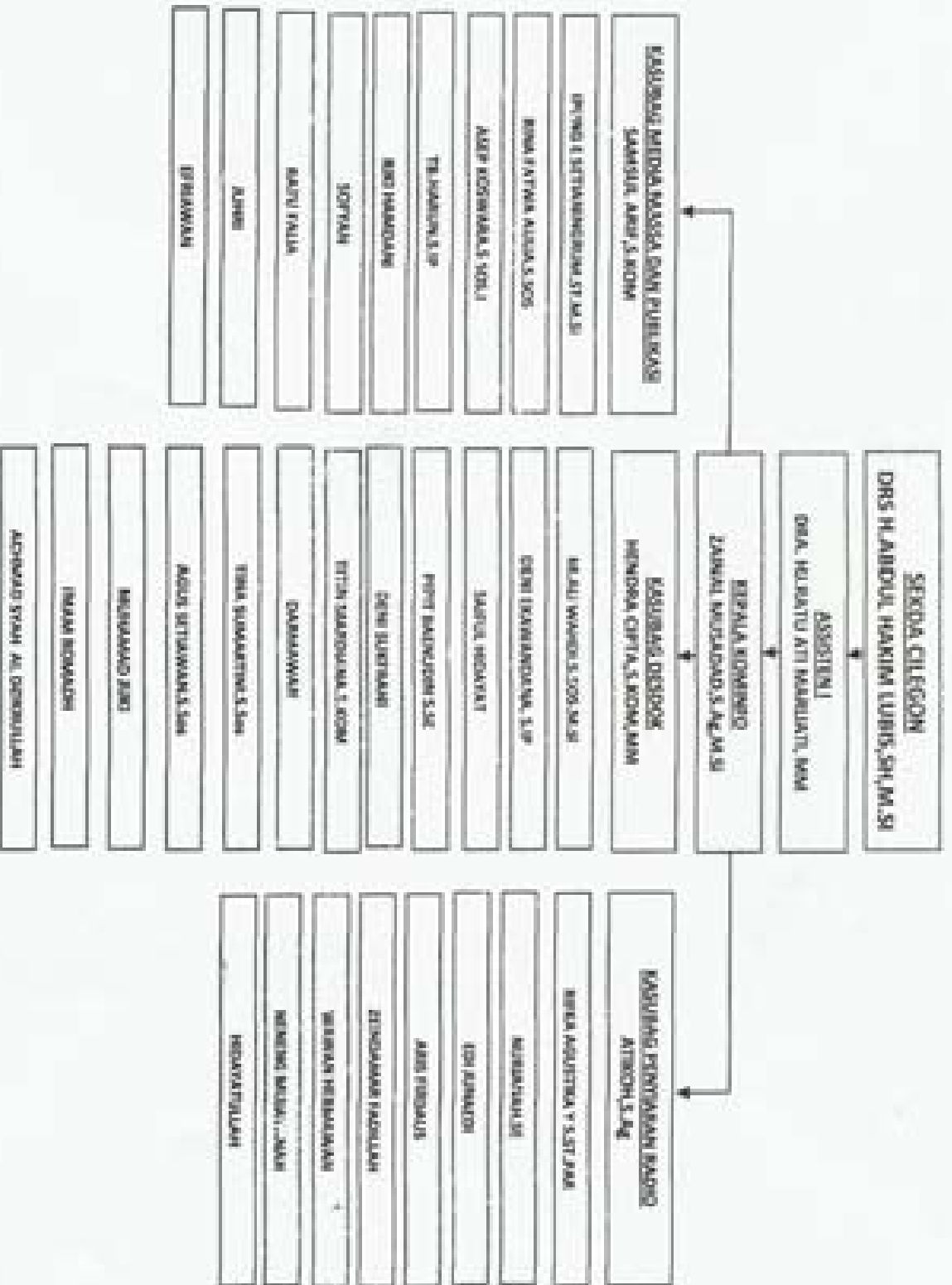


SUPARMAN, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19620107 198703 1 008

STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN KOMINFO SETDA KOTA CILIGON
TAHUN 2012-2013



**DAFTAR PENERBITAN SIUP
BULAN DESEMBER 2013**

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NO. SIUP	TGL. PENERBITAN
1	PK PT. TIGA TAHITA SELABAS	Jl. Raya Anyer Link, Penuaan Rt. 0201 Kel. Kubanghari Kec. Cihwandan	5177300440807BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
2	PT. CAHAYA FAJAR SIOH	Jl. Kimudakir Link, Kebanjiran Rt. 01/02 Kel. Kubangsari Kec. Cihwandan	5177300440808BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
3	TO K O N I T A	Jl. Pagedangan No. 03 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5177300440809BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
4	CV. DIFA PRATAMA	Link, Karang Tegat Rt. 05/04 Kel. Pabean Kec. Purwakarta	5177300440810BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
5	CV. RASIDIN BERSAUDARA	Jl. Kranggan Rt. 02/13 Link, Barokah Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5177300440811BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
6	CV. SORAYA INDAH	Jl. Mayor Kav Blok H No. 30 Rt. 09/05 Kel. Bendungan Kec. Cillegon	5177300440812BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
7	Toko TERANG MULYA	Jl. Bojonegara No. 03 Link, Godang Rt. 02/03 Kel. Jombang	5177300440813BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
8	BINTANG WALPAPER	Jl. A. Yani No. 18 Rt. 05/03 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5177300440814BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
9	WIN MOTOR	Jl. A. Yani rt. 09/03 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5177300440815BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
10	PT. KOSEMA BANTEN	Kawasan KIEC Kel. Samangraya Kec. Cidangkil	5177300440816BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
11	PT. TRANS UTAMA MANDIRI	Jl. Di. Panjaitan Link, Palas Rt. 18/02 Kel. Bendungan Kec. Cillegon	5177300440817BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
12	CV. BANGKIT BERKAH MANDIRI	Link, Kranggan Rt. 06/04 No. 17 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5177300440818BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
13	PT. JEMBAR JAYA ABADI	Jl. Raya Anyer Km. 3 No. 123 Kel. Kobonsari Kec. Cidangkil	5177300440819BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
14	CV. TRI MITRA SEJAHTERA	Jl. Mayjen Sufiyo Km. 7 Link, Pabuaran No. 101 Rt. 04/05 Kel. Rawasum Kec. Grogol	5177300440820BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
15	CV. MITRA BERKAH	Jl. Kedung Kemiri II No. 11/08 Kav Blok F Kel. Ciwaduk Kec. Cillegon	5177300440821BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
16	MAUSYAH	Link, Rokal Barat No. 38 Rt. 04/11 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5177300440822BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
17	PT. DUTA UTAMA SENJAYA	Komp. BPI Blok M.1 No.01 Rt. 01/04 Kel. Panggungrawi Kec. Jombang	5177300440823BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
18	CV. SUMEREP RESEP PANTES	Jl. Kedungkemiri 5 No. 104 Kav Blok F Kel. Ciwaduk Kec. Cillegon	5177300440824BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
19	CV. CAHAYA TUNGGAL	Link, Barokah Rt. 02/13 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5177300440825BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
20	CV. DWI ANUGRAH MANDIRI	Jl. Raya Suralaya No. 26 Rt. 01/03 Link, Pringori Kel. Suralaya Kec. Pulomerak	5177300440826BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
21	CV. KRANGGOT RAYA	Jl. Kranggan Barokah 4 No. 92 rt. 02/13 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5177300440827BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
22	CV. BARAYA SEJAHTERA BERSAMA	Komp. Metro Villa Blok D.9 No. 31 Rt. 03/06 Kel. Gedong dalam Kec. Jombang	5177300440828BINUS/PPK/2013	03 Desember 2013
23	CV. SAMUDERA PRATAMA	Link, Kubang Lumbra Rt. 12/06 Kel. Tegalaratu Kec. Cihwandan	5177300440829BINUS/PPK/2013	04 Desember 2013
24	CV. LAKSANA ABADI	Jl. Melati Bidang No. 31 Rt. 01/07 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	5177300440830BINUS/PPK/2013	04 Desember 2013
25	PT. CITRA ALEXANDER AGUNG	Jl. Bukit Lobus No. 08 Rt. 31/10 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	5177300440831BINUS/PPK/2013	04 Desember 2013
26	CV. PUTRA MEGAH JAYA	Jl. KH. TB. Ismail No. 15 Rt. 04/02 Kel. Ciwaduk Kec. Cillegon	5177300440832BINUS/PPK/2013	04 Desember 2013
27	Peternakan PRIMA USAHA	Link, Curug Majojo Rt. 12/03 Kel. Bagendung Kec. Cillegon	5177300440833BINUS/PPK/2013	04 Desember 2013
28	CV. ARI FURQON	Komp. Pertokoan Wamasari Rt. 1/4 Kel. Wamasari Kec. Cidangkil	5177300440834BINUS/PPK/2013	04 Desember 2013
29	CV. PERMATA ANAJU	Jl. H. Abdi Rohim No. 33 Rt. 04/01 Kel. Cidangkil Kec. Cidangkil	5177300440835BINUS/PPK/2013	13 Desember 2013
30	Yafa OPTICAL	Jl. Raya Serang No. 122 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5177300440836BINUS/PPK/2013	13 Desember 2013
31	CV. ROYAL GROUP	Link, Simpang Tiga Rt. 02/01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	5177300440837BINUS/PPK/2013	13 Desember 2013
32	PT. KHARISMA TEKNIK INDONESIA	Jl. Arga Raya Blok E.1 No. 11 Rt. 12/04 Kel. Kotasari Kec. Grogol	5177300440838BINUS/PPK/2013	13 Desember 2013
33	PT. ESA TEKNIK ENGINEERING	Komp. BPI Blok M.1/01 Rt. 01/04 Kel. Panggungrawi Kec. Jombang	5177300440839BINUS/PPK/2013	13 Desember 2013
34	CV. FEDIS PUTRA CILEGON	Komp. BPI Blok HB No. 6 Rt. 01/06 Kel. Panggungrawi Kec. Jombang	5177300440840BINUS/PPK/2013	13 Desember 2013
35	Toko DEWI REJEKI	Pasar Kota Kranggan Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5177300440841BINUS/PPK/2013	13 Desember 2013

36	CV. PROSPECTINDO CILEGON GEOSERNILINK	Link, Pekalongan Jl. S. Kudus Rt. 01/01 No. 46 Kel. Derlingo Kec. Citangkil	517/3004/0842/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
37	KOPKAR MITRA SEJAHTERA	Jl. Raya Merak Km. 35 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0843/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
38	PT. HARAPAN SANTOSA MAKUMUR	Link, Curug Rt. 04/03 Kel. Rawanum Kec. Grogol	517/3004/0844/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
39	CV. BINA KARYA BERSAMA	Komp. PCI Blok E.22 No. 43 Rt. 02/07 Kel. Kedalemkan Kec. Cibeber	517/3004/0845/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
40	CV. PADA SUKA	Kp. Baru Krancang Rt. 12/04 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	517/3004/0846/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
41	CV. BANTEN LAUTAN CONSULTANT	Perlim. Puri Krakatau Hijau Blok E.4 No. 23 Rt. 14/06 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0847/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
42	KOP. KARYAWAN TIMAH INDUSTRI	Jl. Eropas I Kav A.3 Kawasan Industri KIEC Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0848/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
43	CV. MIKO JAYA STAINLESS	Jl. Perumnas Link, Cikurup Rt. 02/04 Kel. Karangemas Kec. Cibeber	517/3004/0849/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
44	CV. WIJI MULYA BERSAMA	TCI J.12/15 Rt. 08/05 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517/3004/0850/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
45	CV. MITRA ANDLA	Jl. S. Giri Link, Ciledan Rt. 15/05 Kel. Gununggugih Kec. Chwandan	517/3004/0851/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
46	KIOS JAMU 88	Link, Pegantungan Rt. 01/014 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0852/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
47	UD. MITRA LG CILEGON	Jl. Lejend R. Suprpto Rt. 08/04 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	517/3004/0853/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
48	PT. ALAM MAKUMUR PUTRA	Link, Serdang Rt. 04/08 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	517/3004/0854/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
49	CV. ALAM SEJAHTERA	Jl. Serang Kav Blok J No. 37 Rt. 08/06 Kel. Bendungan Kec. Cillegon	517/3004/0855/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
50	CV. TRIESTA	Perum Kedawang Rahayu Estate Blok E.6 Rt. 13/07 Kel. Tamambaru Kec. Citangkil	517/3004/0856/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
51	CV. FAJAR BARU	Komp. TWI FWA 82C No. 6 Kel. Wamasari Kec. Citangkil	517/3004/0857/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
52	CV. VIFACH ANUGERAH PERSADA	Link, Pegantungan Rt. 05/07 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0858/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
53	CV. TUNGGAL TUNAS PUTRA	Jl. S. Gunung Jati Link, Lijajar Rt. 18/06 Kel. Tegalaratu Kec. Chwandan	517/3004/0859/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
54	CV. DINASTY KARYA MANDIRI	Komp. TWI FWA 161/01 Rt. 04/07 Kel. Wamasari Kec. Citangkil	517/3004/0860/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
55	CV. CANDRA WJAYA	Jl. Gerem Raya Rt. 02/04 Kel. Gerem Kec. Grogol	517/3004/0861/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
56	PT. FAJAR GEMILANG LESTARI	Jl. Cristiant 3 Blok H.11 No. 04 Komp. TCI Rt. 03/05 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517/3004/0862/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
57	CV. BRAVO GENERAL SERVICES	Link, Keserangan Rt. 03/04 No. 150 Kel. Rawanum Kec. Grogol	517/3004/0863/BINUS/PAK/2013	19 Desember 2013
58	CV. ORRU INTUISI	Supermall Cillegon Blok T6.1 LL 01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	517/3004/0864/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
59	Toko DRAGON & EVOLUTION	Link, Telu Rt. 04/04 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0865/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
60	PD. TIGA BERILAN UTAMA	Terminal Peti Kemas PT. Indah Klat, Taman sari Link, Sukasari Rt. 01/01 Kel. Tamansari Kec. Purwakarta	517/3004/0866/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
61	CV. BINTANG JAYA SEJAHTERA	Terminal Peti Kemas PT. Indah Klat, Taman sari Link, Sukasari Rt. 01/01 Kel. Tamansari Kec. Purwakarta	517/3004/0867/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
62	CV. ENGGARO PUTRA MANDIRI	Terminal Peti Kemas PT. Indah Klat, Taman sari Link, Sukasari Rt. 01/01 Kel. Tamansari Kec. Purwakarta	517/3004/0868/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
63	CV. ENGGARO TEKNIK MANDIRI	Link, Kaweni Rt. 02/01 Kel. Kalitimbang Kec. Cibeber	517/3004/0869/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
64	PD. MUTIARA RIZOI BANTEN	Link, Kapudenok Jutele rt. 03/01 Kel. Lebakdenok Kec. Citangkil	517/3004/0870/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
65	PD. BAYU ARTHA MANDIRI	Jl. Arga Pangrango Blok D.6 No. 01 Rt. 13/04 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0871/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
66	CV. TRI MEGAH MULYA	Link, Acing Rt. 01/05 Kel. Pangungrawit Kec. Jombang	517/3004/0872/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
67	CV. AZRA MEDIKA	Jl. Pasar Baru No. 11-12 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517/3004/0873/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
68	ANEKA MEUBEL	Link, Delingseng Rt. 01/01 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	517/3004/0874/BINUS/PAK/2013	21 Desember 2013
69	CV. WIRA GRAHA NIAGA	Supermall Cillegon Blok E No. 283 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	517/3004/0875/BINUS/PAK/2013	30 Desember 2013
70	CV. BRAVO GENERAL SERVICES	Supermall Cillegon Blok T6.1 LL 01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	517/3004/0876/BINUS/PAK/2013	30 Desember 2013
71	Toko LADIES UNDERWEAR	Supermall Cillegon Blok T6.1 LL 01 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	517/3004/0877/BINUS/PAK/2013	30 Desember 2013
72	Toko DRAGON EVOLUTION	Jl. Ray Cillegon-Seang No. 17 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517/3004/0878/BINUS/PAK/2013	30 Desember 2013
73	PT. PIRASA DUTA CILEGON	Kp. Kubangkulu rt. 02/03 Kel. Kebondalem Kec. Purwakarta	517/3004/0879/BINUS/PAK/2013	30 Desember 2013
74	CV. ALAM PRIBUMI	Jl. S. Bonang Rt. 02/01 Link, Penauan Kel. Kibangsari Kec. Chwandan	517/3004/0880/BINUS/PAK/2013	31 Desember 2013
75	CV. ALVA TIRTA		517/3004/0881/BINUS/PAK/2013	31 Desember 2013

76	CV. CANDRA WIJAYA	Jl. Gerem Raya Rt. 03/04 Kel. Gerem Kec. Grogol	5173004/0882/BINUS/PM/2013	31 Desember 2013
77	PT. PANJI RIMBA TEHNIK	Simpang Tiga Rt. 1/04 Kel. Ramanusu Kec. Purwakarta	5173004/0883/BINUS/PM/2013	31 Desember 2013
78	PD. LAURENZ JAYA	Jl. A. Yani rt. 08/03 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5173004/0884/BINUS/PM/2013	31 Desember 2013
79	PT. ARTAS'S ENERGI PETROGAS	Jl. Asia Raya Kav F.3 KIEC Kel. Kotasari Kec. Grogol	5173004/0885/BINUS/PM/2013	31 Desember 2013
80	Toko TERUS ABAJI	Jl. Raya Cilegon No. 31 Rt. 03/08 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5173004/0886/BINUS/PM/2013	31 Desember 2013
PM				
1	CV. PUTRATUNGGAL MANDIRI	Link. Deringo Masjid Rt. 07/032 Kel. Deringo Kec. Citangkil	5173004/0321/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
2	PT. KRAKATAU UTAMA CILEGON	Jl. Rajawali Kav Blok H No. 183 Rt. 10/05 Kel. Bendungan Kec. Cilegon	5173004/0322/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
3	PT. I Q B A L	Link. Kubangwelut Rt. 002/054 Kel. Kubangari Kec. Ciwandan	5173004/0323/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
4	PT. SIANI PERSADA MANDIRI	Link. Rombongan Rt. 01/01 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	5173004/0324/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
5	PT. XIANG DA INTERNASIONAL	Jl. Raya Anyer Km. 12 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	5173004/0325/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
6	PT. GURMYONG INDONESIA	Jl. Raya Merak Km. 117 No. 48 Kel. Cerem Kec. Grogol	5173004/0326/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
7	PT. ARLI PRIMA INDONESIA	Komp. TRC Blok A. 10 No. 21 Rt. 01/05 Kel. Gedongdalem Kec. Jombang	5173004/0327/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
8	PT. NURO JAYA BANTANI	Ruko Cig Business square Blok B No. 12 Rt. 05/06 Kel. Kedaleman kec. Cibeber	5173004/0328/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
9	PT. KRAKATAU KONSULTAN	Gedung 1 Perbantoran PT. Krakatau Engineering Jl. Asia Raya Kav 03 Kaw. KIEC Kel. Kotabumi	5173004/0329/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
10	PT. RESKA PRIMA KARYA	Komp. PCI Blok B.38 No. 12A rt. 02/05 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	5173004/0330/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
11	PT. KOKOH PIRANTI	Link. Pecak rt. 04/03 Kel. Gedongdalem Kec. Jombang	5173004/0331/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
12	PT. SUMBER SAHABAT TEKNIK	Komp. PCI Blok D.98 No. 07 rt. 03/05 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	5173004/0332/BINUS/PM/2013	04 Desember 2013
13	CV. MITRA KARYA UTAMA	Jl. Arga Telaga Bodas Blok D.3 No. 24 Rt. 10/04 Kel. Kodasari Kec. Grogol	5173004/0333/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
14	PT. DEFFA ARTHA MANDIRI	Jl. Yos Sudarso No. 30 Rt. 03/01 Link. Pulotirda Kel. Lebakgede Kec. Purומרak	5173004/0334/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
15	CV. CAHAYA SENTOSA	Jl. S. Kudus IV Link. Kubang welut Rt. 02/04 Kel. Samagraja Kec. Citangkil	5173004/0335/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
16	PT. SEMESTA INSPIRASI MEDIA	Link. Jering Barat Rt. 01/01 Kel Karangasem Kec. Cibeber	5173004/0336/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
17	PT. MITRA RAKATA	Jl. Raya Merak Km.3.5 Kel. Kodasari Kec. Grogol	5173004/0337/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
18	PT. PRIMA CANDRA KONSTRUKSI	Jl. Raya Anyer Link. Gambiran No. 005 Kel. Gunungugih Kec. Ciwandan	5173004/0338/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
19	CV. WAHANA MULYA	Jl. Lobas Jingga No. 32 Bukit Palam Rt. 06/10 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	5173004/0339/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
20	PO. TIBIAN MAS	Perum BCX Blok A. 11 No. 3 Rt. 2/06 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	5173004/0340/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
21	CV. SONY CILEGON POWER	Link. Pegunungan Lama Rt. 05/07 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5173004/0341/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
22	CV. SUMBER SEGARA MAKMUR	Jl. Fatahillah Link. Citurah II Rt. 18/02 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	5173004/0342/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
23	PT. SARANA BINTANG KHATULISTIWA	Jl. S. Demak No. 3 Link. Ciwandan Rt. 02/01 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	5173004/0343/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
24	PT. LINTAS BINTANG KHATULISTIWA	Jl. S. Demak No. 3 Link. Ciwandan Rt. 02/01 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	5173004/0344/BINUS/PM/2013	19 Desember 2013
25	PT. CILEGON PUTRA PERSADA	Jl. Fatahillah No. 77 Link. Warangkara Rt. 04/01 Kel. Randakari Kec. Ciwandan	5173004/0345/BINUS/PM/2013	21 Desember 2013
26	PT. PERKASA ERSA JAYA	Jl. Raya Anyer Km. 112.5 No. 99 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	5173004/0346/BINUS/PM/2013	21 Desember 2013
27	PT. BERKAT BARTERA ABAJI JAYA	Link. Cibeber Timur Rt. 01/01 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	5173004/0347/BINUS/PM/2013	21 Desember 2013
28	PT. KARYAANGUNG MITRA MANDIRI	Komp. PCI Blok D. 96 No.04 Rt. 03/05 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	5173004/0348/BINUS/PM/2013	21 Desember 2013
29	PT. TURANGGA JAYA	Jl. Yos Sudarso No. 60 Link. Pulotirda Rt. 01/01 Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak	5173004/0349/BINUS/PM/2013	21 Desember 2013
30	PT. APINDO MITRA SELARAS	Ruko Cig Business square Blok B No. 12 Rt. 05/06 Kel. Kedaleman kec. Cibeber	5173004/0350/BINUS/PM/2013	21 Desember 2013
31	PT. NUSANTARA BUAHA CEMERLANG	Jl. Raya Sereng No. 125 Rt. 09/02 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	5173004/0351/BINUS/PM/2013	21 Desember 2013
32	PT. KARYA INTER NUSA GEMILANG	Jl. Raya Anyer Km. 122 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan	5173004/0352/BINUS/PM/2013	21 Desember 2013
33	PT. DUTA INTI JAYA	Jl. SA. Tirayasa Supermall Blok G No. 8 Rt. 08/02 Link. Simpang tiga Kel. Ramanusu Kec. Purwakarta	5173004/0353/BINUS/PM/2013	21 Desember 2013

34	PT. CAHAYA ADITYA SEJAHTERA	Jl. KH. Fahir Blok AB No. 08 Rt. 01/01 Kel. Citangkil Kec. Citangkil	5172004/0354/BINUS/PPM/2013	21 Desember 2013
35	PT. PETEKA KARYA TIRTA	Jl. Raya Anyer Km. 119 Kel. Randakuri Kec. Chwardan	5172004/0355/BINUS/PPK/2013	30 Desember 2013
36	PT. ANDIKAS PRAKARSA UTAMA	Jl. Arja Kawi Blok A.1 No. 20 Rt. 11/03 Kel. Kotasari Kec. Grogol	5172004/0356/BINUS/PPM/2013	30 Desember 2013
37	PT. SUNDARA PUTRA PRIMA	Koemp. Metri Cig Cluster Florida Blok L.9 No. 11 Kel. Jombangweta Kec. Jombang	5172004/0357/BINUS/PPM/2013	30 Desember 2013
38	CV. S A R S I M	Jl. PLTA Lodoyo No. 11 Kel. Suralaya Kec. Pulomasrak	5172004/0358/BINUS/PPM/2013	30 Desember 2013
39	PT. ABITECH PRATAMA	Link. Kalenemu barat No. 529 rt. 05/01 Kel. Samangraya Kec. Citangkil	5172004/0359/BINUS/PPM/2013	30 Desember 2013
40	PT. GEMA SEJAHTERA ABADI	Link. Gerem Kubu Rt. 02/05 Kel. Gerem Kec. Grogol	5172004/0360/BINUS/PPM/2013	30 Desember 2013
41	PT. KHARISMA BERKAH ABADI	Perum BCK Blok F.4 No. 7 Rt. 02/09 Kel. Cibabar Kec. Cibeber	5172004/0361/BINUS/PPM/2013	30 Desember 2013
42	CV. ANGGASA INDAH	Link. Umbul Jabar Rt. 05/01 Kel. Kepuh Kec. Chwardan	5172004/0362/BINUS/PPM/2013	30 Desember 2013
BB				
1	PT. SMS SIEMAG METALLURGICAL SERV	Jl. Raya Anyer Kav. A-01 Kaw. Industri Krakatau Kel. Wamasari Kec. Citangkil	5172004/0031/BINUS/PB/2013	16 Desember 2013
2	PT. WIJAYA KARYA KRAKATAU BETON	Jl. Australia I Kav. K3/1 Kaw. KIEC Kel. Wamasari Kec. Citangkil	5172004/0032/BINUS/PB/2013	23 Desember 2013
3	PT. KRAKATAU GOLDEN LIME	Jl. KH. Yasin Beji No. 06 Kel. Kebondalem Kec. Purwakarta	5172004/0033/BINUS/PB/2013	23 Desember 2013
4	PT. KRAKATAU SEMEN INDONESIA	Jl. Kotabumi No. 09 Rt. 02/03 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	5172004/0034/BINUS/PB/2013	23 Desember 2013

Mengetahui, 31 Desember 2013
 Kabid Perdagangan dan Pembinaan Pasar


 H. MUHAMMAD SATRI
 NIP. 19600503 198603 1 017

Kasi Perdagangan Dalam Negeri


 IKHSAN HASBIJUAN, S.Sos., MM
 NIP. 19660413 198703 1 011

DAFTAR PENERBITAN SIUP
BULAN NOVEMBER 2013

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NO. SIUP	TGL. PENERBITAN
1	PKS CV. RAJA GARUDA MAS	Komp. PCI Blok D.73/12A Rt. 05/05 Kel. Cibebber Kec. Cibebber	517/3004/0745/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
2	CV. NUANSA ASRI	Komp. PCI Blok D.73/12A Rt. 05/05 Kel. Cibebber Kec. Cibebber	517/3004/0746/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
3	CV. YAFI KARYA	Jl. Alamanda 7 No. 2 Bukit Palembang Rt. 01/10 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	517/3004/0747/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
4	CV. MEGA CAHAYA	Jl. Stasiun No. 12A Link. Jombangmasjid Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0748/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
5	PT. SELAT SUNDA TELLINDO	Jl. Ir. Sudam Link. Karang Tumaristas No. 12 Rt. 16/03 Kel. Lebak denok Kec. Citangkil	517/3004/0749/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
6	PD. AJIE MOTOR	Jl. Raya Anyer No. 13 Link. Pintu Air Rt. 08/04 Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan	517/3004/0750/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
7	RM. MAS JOKO	Link. Warung Rt. 03/01 Kel. Panggungraw Kel. Jombang	517/3004/0751/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
8	CV. METALLICA TEHNIK	Komp. PCI Blok D.2.A No. 10 Rt. 01/05 Kel. Cibebber Kec. Cibebber	517/3004/0752/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
9	CV. MUTIARA KEMBAR	Link. Pegantungan Baru Rt. 05/14 Kel. Panggungraw Kec. Jombang	517/3004/0753/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
10	PT. DWIPUTRA INTISARANA	Link. Gerem Raya Rt. 02/04 Kel. Gerem Kec. Crogol	517/3004/0754/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
11	PD. MITRA UTAMA	Link. Palasan Rt. 03/01 Kel. Panggungraw Kec. Ciwandan	517/3004/0755/BINUS/PPK/2013	06 November 2013
12	CV. MALIK PUTRA MANDIRI	Jl. Sunan Kudus Link. Cibit Rt. 016/02 Kel. Deringo Kec. Citangkil	517/3004/0756/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
13	CV. AMAL BAROKAH	Link. Gardu Inan Rt. 08/02 Kel. Wamasari Kec. Citangkil	517/3004/0757/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
14	CV. ADIKARA	Jl. Anga Raya Blok D.9 No. 09 Rt. 13/02 Kel. Kotasari Kec. Cillegon	517/3004/0758/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
15	CV. KURNIA HARAPAN JAYA	Jl. Kecubung VII e.10 No. 08 885 III Kel. Cewedus Kec. Cillegon	517/3004/0759/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
16	DATA LAKSANA	Link. Pakuncen Rt. 011/003 Kel. Cewedus Kec. Cillegon	517/3004/0760/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
17	KOPKARTI	Jl. Ir. Sudam Link. Cimerak Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	517/3004/0761/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
18	Toko V I R G O	Jl. Di. Panjaitan No. 04 Rt. 02/08 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0762/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
19	CV. RAMSA NEGARA	Jl. Merapi No. 4 Kav Blok F Kel. Chwaduk Kec. Cillegon	517/3004/0763/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
20	KOP. USAHA BERSAMA - MITRA SUAN	Jl. Kedung Kemiri No. 102 Kav Blok F Rt. 021/02 Kel. Chwaduk Kec. Cillegon	517/3004/0764/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
21	CV. CAHAYA PUTRA	Jl. Kerinci No. 04 Kav Blok F Rt. 02/07 Kel. Chwaduk Kec. Cillegon	517/3004/0765/BINUS/PPK/2013	11 November 2013
22	CV. NUR CAHAYA	Link. Kubangwelut Rt. 02/04 Kel. Samangraya Kec. Citangkil	517/3004/0766/BINUS/PPK/2013	13 November 2013
23	PT. ANAK KRAKATAU INDONESIA	Link. Jombangtangsi rt. 02/02 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0767/BINUS/PPK/2013	13 November 2013
24	CV. PUTRA JAYA	Jl. Sunan Giri Link. Citodan Rt. 17/05 Kel. Gunungugih Kec. Chwandan	517/3004/0768/BINUS/PPK/2013	13 November 2013
25	CV. MAKIMUR ABADI	Panum BCK Blok D.12.A No.08 Rt. 05/08 Kel. Cibebber Kec. Cibebber	517/3004/0769/BINUS/PPK/2013	18 November 2013
26	CV. BINTANG JAYA	Komp. BPI Blok N No. 04 Rt. 02/06 Kel. Panggungraw Kec. Jombang	517/3004/0770/BINUS/PPK/2013	18 November 2013
27	CV. NIDRA JAYA MANDIRI	Komp. PCI Blok D. 81 No. 16 Rt. 03/04 Kel. Cibebber Kec. Cibebber	517/3004/0771/BINUS/PPK/2013	18 November 2013
28	CV. TREE PUTRI	Jl. S. Kalijaga Link. Citodan Rt. 15/05 Kel. Gunungugih Kec. Chwandan	517/3004/0772/BINUS/PPK/2013	18 November 2013
29	CV. REGI TENNIK ABADI	Komp. PCI Blok D.01 Rt. 01/07 Kel. Kedaleman Kec. Cibebber	517/3004/0773/BINUS/PPK/2013	18 November 2013
30	CV. PUTRA MANDIRI JAYA	Link. Sekong Rt. 02/02 Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak	517/3004/0774/BINUS/PPK/2013	18 November 2013
31	PO. MARGA MULYA PERSADA	KH. Wasid No. 52 Rt. 05/03 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517/3004/0775/BINUS/PPK/2013	19 November 2013
32	CV. DIKA JAYA	Link. Sumurjaya Rt. 04/06 Kel. Tamansari Kec. Pulomerak	517/3004/0776/BINUS/PPK/2013	19 November 2013
33	PT. KHARISMA TENNIK SEJAHTERA	Jl. Anga Raya E.1 Rt. 12/04 Kel. Kotasari Kec. Crogol	517/3004/0777/BINUS/PPK/2013	19 November 2013
34	CV. NUR ARDIANSYAH	Link. Cimerak Rt. 04/04 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	517/3004/0778/BINUS/PPK/2013	19 November 2013
35	CV. BANTANI JAYA RAYA	Jl. Raya Pulonda Komp. PTK M. 90-92 No. 31-39 Rt. 03/07 Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak	517/3004/0779/BINUS/PPK/2013	19 November 2013

36	DUMBER MAKMUR	Jl. Raya Anyer Km. 7 Kel. Kebonsari Kec. Cidangkil	5173004/0780/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
37	CV. RILUX TRANS UTAMA	Komp. BPI Blok W No. 05 Rl. 0606 Kel. Panggungraw Kel. Jombang	5173004/0781/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
38	CV. KARYA ARDI PRESTASI	Kp. Simpangtiga Rl. 0602 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	5173004/0782/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
39	CV. PUTRA TANJUNG SEKONG	Link. Tanjungsekong Rl. 0202 Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak	5173004/0783/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
40	CV. MITRA JAYA LESTARI	Jl. Terate Link. Semandara No. 17 Rl. 0303 Kel. Panggungrawi Kec. Jombang	5173004/0784/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
41	CV. BERKAH DOA	Link. Gerem Raya Rl. 0304 Kel. Gerem Kec. Grogol	5173004/0785/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
42	CV. TRI MANUNGKAL UTAMA ENGINEER	Jl. S. Ampel No. 48 Link. Gardu Iman Rl. 0302 Kel. Warnasari Kec. Cidangkil	5173004/0787/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
43	CV. DUA PUTRA BANTEN PERKASA	Komp. BPI Blok F.B No. 16 Rl. 0106 Kel. Panggungraw Kel. Jombang	5173004/0788/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
44	Toko SURYA MAJU	Jl. S. Ampel No. 48 Link. Gardu Iman Rl. 0302 Kel. Warnasari Kec. Cidangkil	5173004/0789/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
45	Toko A G U N G	Jl. Raya Anyer No. 05 Rl. 0904 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	5173004/0790/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
46	Toko USAHA MAJU	Jl. KH. Wasylid Rl. 0103 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5173004/0791/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
47	CV. SENDORO	Jl. Raya Anyer Rt. 1104 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	5173004/0792/BINUS/PAK/2013	19 November 2013
48	PT. SADATECH UTAMA	Jl. Ropani Kav Blok F Rl. 0207 No. 20 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	5173004/0793/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
49	PT. FORTINO JAPHIETH	Jl. Pepaya No. 05 Rl. 0506 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	5173004/0794/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
50	CV. GADING INDO	Jl. Kimudakir Link. Cigading Rt. 02/01 Kel. Tegalaratu Kec. Ciwandan	5173004/0795/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
51	CV. AGENG LESTARI	Jl. Lada A.1 No. 10 Rl. 0910 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	5173004/0796/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
52	CV. MULTI BARATA ANUGRAH	Link. Pringori Rl. 0103 Kel. Surajaya Kec. Pulomerak	5173004/0797/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
53	CV. PUTRA HIDAYAT	Komp. TCI Blok A Marilis F.5 No. 17 Rl. 0603 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5173004/0798/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
54	PT. MOGANA GEMILANG ABADI	Jl. Inan Boyol Link. Sambirata Rl. 05/03 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	5173004/0799/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
55	PT. ARTA DNIGIVANA	Jl. Lembang III/04 Rl. 02/02 Kel. Cidangkil Kec. Cidangkil	5173004/0800/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
56	CV. ANGGA PUTRA CIGADING	Jl. Kimudakir Link. Cigading Rl. 02/01 Kel. Tegalaratu Kec. Ciwandan	5173004/0801/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
57	Toko SINAR AJIA	Link. Pegantungan Rl. 02/07 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5173004/0802/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
58	PT. KARYA SEMESTA ALAM RAYA	Jl. Lamsnda V No. 25 Bukit Palembang Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	5173004/0803/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
59	CV. ANDAYANI	Link. Tegalarang solor Rl. 02/08 No. 90 Kel. Rawaanum Kec. Grogol	5173004/0804/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
60	Toko H. SAFRUDIN	Link. Cirtu Rl. 01/06 Kel. Samangraya Kec. Cidangkil	5173004/0805/BINUS/PAK/2013	27 November 2013
61	KOPKAR BATARA 47	Jl. Jombang masjid No. 02 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang		
1	PT. KARYA BENUA MANDIRI	Jl. S. Bonang Link. Panauan Rl. 03/01 Kel. Kubangzari Kec. Ciwandan	5173004/0288/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
2	PT. HANA KARYA CIPTA	Puri Krakatau Hijau Blok E.6 No. 27 Kel. Kotasari Kec. Grogol	5173004/0289/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
3	PT. ANUGRAH LAUT BERU	Jl. Jombangtangel V No. 132 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	5173004/0290/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
4	PT. GONDANG RAYA	Jl. Raya Anyer Link. Sukmajaya Rl. 18/07 No. 6 Kel. Kebonsari Kec. Cidangkil	5173004/0291/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
5	PT. MITRA SINDO UTAMA	PCI Blok KK.2 No. 07 Rl. 03/06 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	5173004/0292/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
6	PT. GRACE JAYA	Jl. S. Kalijaga Link. Koppo masjid Rl. 01/01 Kel. Gununggugih Kec. Ciwandan	5173004/0293/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
7	CV. DINDA PUTRI	Jl. S. Demak Link. Jati Rl. 07/02 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	5173004/0294/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
8	CV. CHANDRA BUANA KARYA	PCI Blok KK.2 No. 07 Rl. 03/06 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	5173004/0295/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
9	PT. GRACE JAYA	Jl. S. Parman Km. 12 Cigading Kawasan KBS Kel. Tegalaratu Kec. Ciwandan	5173004/0297/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
10	PT. KRAKATAU ARGO LOGISTICK	Ruko Cilegon Business Square Blok C.23.24.25 Rl. 06 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	5173004/0298/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
11	PT. PANORAMA INDAH CAHAYA	Jl. Yos Sudarso Link. Ulorida Rl. 02/01 Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak	5173004/0299/BINUS/PAK/2013	06 November 2013
12	PT. BUKIT BERLIAN JAYA			

13*	PT. CILEGON RAYA UTAMA MOTOR	Jl. Raya Timur Km. 3 Rt. 05/02 Kel. Kedalem Kel. Cibeber	517/3004/0300/BINUS/PM/2013	18 November 2013
14	PT. CILEGON INDUSTRIAL	Jl. Arga Murni B1/20 R/ 09/03 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0301/BINUS/PM/2013	18 November 2013
15	CV. PUTRA JAYA	Jl. S. Giri Link. Clodan Rt. 17/05 Kel. Gunungsguh Kel. Cihwandan	517/3004/0302/BINUS/PM/2013	18 November 2013
16	PT. SAHABAT PRIMA NUSANTARA	Perum BCK Blok D. 22 No. 11 Rt. 01/09 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	517/3004/0303/BINUS/PM/2013	18 November 2013
17	CV. BUKIT ASAM	Komp. BPI Blok P No. 20 Rt. 04/06 Kel. Pangunggrawi Kel. Jombang	517/3004/0304/BINUS/PM/2013	18 November 2013
18	CV. MITRA JAYA TEKNOLOGI	Komp. TRC Blok A2/05 Rt. 05/05 Kel. Gedongdalem Kel. Jombang	517/3004/0305/BINUS/PM/2013	18 November 2013
19	PT. BARDUNZET	Link. Kranggot Rt. 11/04 Kel. Submajaya Kel. Jombang	517/3004/0306/BINUS/PM/2013	18 November 2013
20	PT. TATA SUMBER DUTA	Jl. SA. Tirtayasa No. 19 Rt. 01/01 Kel. Masigit Kel. Jombang	517/3004/0307/BINUS/PM/2013	18 November 2013
21	PT. PUTRA UNGGUL JAYA	Jl. KM. Agus Salim Link. Werd No. 102 Rt. 02/01 Kel. Kebonsari Kel. Citanjil	517/3004/0308/BINUS/PM/2013	18 November 2013
22	PT. MANGKU PALAS MITRA MAKMUR	Jl. Yos Sudarso Link. Pulotris Rt. 04/01 Kel. Lebakgede Kel. Pulomerak	517/3004/0309/BINUS/PM/2013	27 November 2013
23	PT. BINTANG CAHAYA USAHATAMA	Komp. PCI Blok D.69 No. 04 Rt. 05/04 Kel. Cibeber Kel. Cibeber	517/3004/0310/BINUS/PM/2013	27 November 2013
24	PT. PARIADI ASYUDEWI	Jl. Arga Gunung Blok D.3 No. 05 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0311/BINUS/PM/2013	27 November 2013
25	PT. SHINNA MANDIRI	Jl. Buyut Arman No. 66 Rt. 01/01 Kel. Citanjil Kel. Citanjil	517/3004/0312/BINUS/PM/2013	27 November 2013
26	PT. MEGA CENTRAL FINANCE	Jl. A. Yani No. 21 Rt. 09/03 Kel. Sukmajaya Kel. Jombang	517/3004/0313/BINUS/PM/2013	27 November 2013
27	PT. MEGA AUTO FINANCE	Jl. Arga Wellirang Blok A.6 No. 7 Rt. 11/03 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0314/BINUS/PM/2013	27 November 2013
28	PT. LAKSANA PUTRA JAYA	Jl. Arga Wellirang Blok A.6 No. 7 Rt. 11/03 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0315/BINUS/PM/2013	27 November 2013
29	PT. HIKARI ABADI	Jl. Mawar I Blok F.19 No. 01 Rt. 03/04 Kel. Chwedu Kel. Ciligori	517/3004/0316/BINUS/PM/2013	27 November 2013
30	PT. SHANDARUNG	Jl. B. Katamso Link. Gambiran Rt. 12/03 Kel. Gunungsguh Kel. Cihwandan	517/3004/0317/BINUS/PM/2013	27 November 2013
31	PT. SANI PERSADA MANDIRI	Link. Rombongan Rt. 01/01 Kel. Kepuh Kel. Cihwandan	517/3004/0318/BINUS/PM/2013	27 November 2013
32	PT. ARGO TOTO MAKMUR	Jl. Yos Sudarso Link. Sabrang t. 03/07 Kel. Lebakgede Kel. Pulomerak	517/3004/0319/BINUS/PM/2013	27 November 2013
22	PT. FABEL INDONESIA	Komp. Putri Krahatsu Hijau Blok F.2 No. 1 Rt. 14/04 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0320/BINUS/PM/2013	27 November 2013
1	PT. BINTANG CILEGON	Jl. Jawa KIEC 2 Kel. Randakar Kel. Cihwandan	517/3004/0020/BINUS/PM/2013	18 November 2013
2	PT. ASYATELA INDONESIA	Komp. PCI Blok D.46 No. 23 Rt. 04/04 Kel. Cibeber Kel. Cibeber	517/3004/0030/BINUS/PM/2013	27 November 2013

Mengetahui, 31 November 2013
Kabid Perdagangan dan Pembinaan Pasar


H. MUHAMMAD SATRI
NIP. 19600503 198603 1 017

Kasi Perdagangan Dalam Negeri


IKHSAN HASIBUAN, S.Sos. MM
NIP. 19660813 198703 1 011

DAFTAR PENERBITAN SIUP
BULAN OKTOBER 2013

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NO. SIUP	TGL PENERBITAN
1	PT. FIMATA PRIMA JAYA	Jl. A. Yani No. 43 Rt. 006/001 Kel. Kedaleman Kec. Cibabber	517/3004/0679/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
2	CV. DUA PUTRA	Link. Garuda Lama Rt. 03/02 Kel. Wamassar Kec. Citangkil	517/3004/0680/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
3	CV. NURUL FATAH KARYA	Jl. Raya Manis No. 25 Kav Blok G Rt. 007/006 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	517/3004/0681/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
4	CV. KELLUARGA SAKINAH	Link. Tegahwangi Kruwak Rt. 004/001 Kel. Rawaarum Kec. Grogol	517/3004/0682/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
5	CV. BANGUN CIPTA SEJATI	Jl. Kerinci 4 Blok F Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	517/3004/0683/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
6	CV. GEMILANG JAYA ABADI	PCI Blok H4 No. 7 Kel. Submajaya Kec. Jombang	517/3004/0684/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
7	CV. ANUKERAH JAYA MANDIRI	Komp. TWI FWB 24 No. 8 L 22/006 Kel. Wamassar Kec. Citangkil	517/3004/0685/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
8	PD. ARTO JAYA ABADI	Jl. Rajawali Kav Blok H Rt. 010/006 Kel. Bendungan Kec. Cilegon	517/3004/0686/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
9	CV. PUTRA SELAT SUNDA	Link. Tegahwangi Lama Rt. 001/006 Kel. Rawaarum Kec. Grogol	517/3004/0687/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
10	DELLA MAKMUR	Pasar Kupa Blok F No. 107 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	517/3004/0688/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
11	CV. A. A. SEJAHTERA	Jl. Raya Cilegon Serang Serang Barat Kel. Kedaleman Kec. Cibabber	517/3004/0689/BINUS/PPK/2013	2 Oktober 2013
12	CV. MULTI NIAGATAMA	Link. Chwandaan Rt. 02/01 Kel. Kepuh Kec. Chwandaan	517/3004/0690/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
13	CV. KAUFEN PRATAMA	Jl. Raya Anyer Link. Sumber Batu Rt. 05/05 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	517/3004/0691/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
14	CV. ALFA CLEAN	Jl. Senaja No. 160 Rt. 10/03 Kel. Ketilang Kec. Cilegon	517/3004/0692/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
15	PT. MAHAKARYA REKA CIPTA	Jl. Nusa Indah 14 J-6 No. 01 Rt. 18/05 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	517/3004/0693/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
16	UD. MITRA MANDIRI SUKSES	Jl. Ketilang Timur No. 71 Rt. 001/001 Kel. Ketilang Kec. Cilegon	517/3004/0694/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
17	TOKO IMAN	Perum GCD Blok B38 No. 06 Rt. 004/005 Kel. Kallimambang Kec. Cibabber	517/3004/0695/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
18	CV. PUTRA CAHAYA UTAMA	Jl. KH. Ishak Link. Senaja Rt. 018/01 Kel. Submajaya Kec. Jombang	517/3004/0696/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
19	CV. ANDANI	Link. Warung Juet Rt. 03/02 Kel. Samangraya Kec. Citangkil	517/3004/0697/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
20	TB. PERMATA JAYA	Link. Kedung Bulus Rt. 02/01 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	517/3004/0698/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
21	CV. BATAK SENTOSA	BBS III Blok E No. 01 Rt. 017/009 Kel. Ciwaduk Kec. Cilegon	517/3004/0699/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
22	CV. PENDOMO	Jl. Raya Merak Km. 8 Rt. 02/04 Kel. Gerem Kec. Grogol	517/3004/0700/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
23	CV. TRIMETRA SEJAHTERA	Link. Warung Juet Rt. 02/03 No. 134 Kel. Samangraya Kec. Citangkil	517/3004/0701/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
24	CV. I R A	Jl. Ir. Sutami Link. Mehar Jadi Rt. 13/01 Kel. Lebak Derek Kec. Citangkil	517/3004/0702/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
25	PT. CILEGON RAYA UTAMA MOTOR	Jl. Cilegon Timur Km. 3 Rt. 003/002 Kel. Kedaleman Kec. Cibabber	517/3004/0703/BINUS/PPK/2013	7 Oktober 2013
26	CV. SABA LONANG	Link. Subajaya Rt. 04/07 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	517/3004/0704/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013
27	CV. SINAR BUTARA	Link. Ruko Sambirata Rt. 02/03 Kel. Cibabber Kec. Cibabber	517/3004/0705/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013
28	CV. MALDAVIN PERKASA	Komp. PCI Blok D72 No. 15 Rt. 05/05 Kel. Cibabber Kec. Cibabber	517/3004/0706/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013
29	WARUNG NASI SAMBEL JONTOR	Jl. Raya Cibabber Rt. 01/01 No. 08 Kel. Cibabber Kec. Cibabber	517/3004/0707/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013
30	CV. KENCAMA TECHNIK	Jl. Jend. A. Yani No. 96A Kel. Submajaya Kec. Jombang	517/3004/0708/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013
31	CV. CAHAYA AGRI SENTOSA	Jl. KH. Aliyudin Link. Telu No. 60 Rt. 04/04 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0709/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013
32	PT. BANGUN JAYA ANUGERAH	Jl. Raya Anyer Warungkara Kel. Kepuh Kec. Chwandaan	517/3004/0710/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013
33	CV. HARAPAN SENTOSA	Jl. Raya Merak Km. 7 Rt. 02/02 Kel. Rawaarum Kec. Grogol	517/3004/0711/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013
34	PT. KARINA JAYA MAKMUR	Jl. Keserangan No. 07 Rt. 04/07 Kel. Rawaarum Kec. Grogol	517/3004/0712/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013
35	CV. METRIKA KONTRAKTOR	Link. Tegahwangi Rt. 03/02 Kel. Rawaarum Kec. Grogol	517/3004/0713/BINUS/PPK/2013	10 Oktober 2013

36	PD. TIRTA LOGAM	Jl. Di. Panjaitan Link. Pallas Rt. 03/02 Kel. Bendungan Kec. Cilidgong	517/3004/0714/BINUS/PAK/2013	10 Oktober 2013
37	CV. ADI PRATAMA	Link. Kubangsepat Rt. 03/07 Kel. Citangkil Kec. Citangkil	517/3004/0715/BINUS/PAK/2013	18 Oktober 2013
38	CV. PUTRA KATULISTIWA	Jl. Lingkar Selatan No. 168 Rt. 17/03 Link. Jangkarwetan Kel. Tegalaratu Kec. Cibabber	517/3004/0716/BINUS/PAK/2013	18 Oktober 2013
39	CV. N A R A E	Ruko Cillegon Green Mega Blok E No. 27 Kel. Cibaber Kec. Cibabber	517/3004/0717/BINUS/PAK/2013	18 Oktober 2013
40	CV. ALAM UTAMA	Link. Subajaya No. 83 Rt. 18/07 Kel. Kabonsari Kec. Citangkil	517/3004/0718/BINUS/PAK/2013	18 Oktober 2013
41	CV. ANDAH UTAMA	Jl. Sunan Kudus II No. 19 Rt. 01/02 Kel. Samangraya Kec. Citangkil	517/3004/0719/BINUS/PAK/2013	18 Oktober 2013
42	CV. GULUNG UNGGUL MOTOR	Jl. KH. Agus Salim Rt. 01/01 Kel. Kabonsari Kec. Citangkil	517/3004/0720/BINUS/PAK/2013	18 Oktober 2013
43	PT. BANGUN LINTAS REMAJA	Link. Babakan Sari Rt. 06/001 Kel. Tamansari Kec. Citangkil	517/3004/0721/BINUS/PAK/2013	18 Oktober 2013
44	TOKO IMAN HARUS JAYA	Link. Pagastungan Rt. 05/07 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0722/BINUS/PAK/2013	18 Oktober 2013
45	CV. TRI JAYA	Jl. KH. Hasim Link. Kraemat Rt. 10/05 Kel. Tegalaratu Kec. Cibabber	517/3004/0723/BINUS/PAK/2013	18 Oktober 2013
46	PT. ELTEHA INTERNASIONAL LTD	Link. Kubangwuluh s. C. K. K.	517/3004/0724/BINUS/PAK/2013	23 Oktober 2013
47	PT. KANIS ANANTA TEKNOLOGI	Pasar Baru Blok A No. 15 Rt. 02/02 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0725/BINUS/PAK/2013	23 Oktober 2013
48	TOKO MAS SAHABAT BARU	Jl. Pagabangan Link. Baru Rt. 003/008 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0726/BINUS/PAK/2013	23 Oktober 2013
49	UD. DURUL UMI	Link. Babakarsari Rt. 066/001 Jl. Yos Sudarso No. 1 Kel. Tamansari Kec. Pulomerak	517/3004/0728/BINUS/PAK/2013	23 Oktober 2013
50	PT. JATRA KARUNIA MANDIRI	Kp. Sabrang Rt. 02/07 Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak	517/3004/0729/BINUS/PAK/2013	23 Oktober 2013
51	CV. ADI KARYA	Link. Jombang Cemara Jl. Bojonegara Rt. 002/008 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0730/BINUS/PAK/2013	23 Oktober 2013
52	SINAR MOTOR	Jl. Buyut Arman No. 82 Kel. Citangkil Kec. Citangkil	517/3004/0731/BINUS/PAK/2013	23 Oktober 2013
53	PT. AMANDIKA PERMATA	Link. Tegawang Rt. 002/002 Kel. Rawarum Kec. Gregol	517/3004/0732/BINUS/PAK/2013	23 Oktober 2013
54	CV. PUTRA JAYA	Link. Rokal Rt. 001/10 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0733/BINUS/PAK/2013	23 Oktober 2013
55	CV. MITRA GADING	Jl. A. Yani No. 29 Link. Jombangwetan Rt. 01/05 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0734/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
56	TOKO EMAS ANEKA	Jl.A. Yani No. 125 Rt. 01/03 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0735/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
57	TOKO MITRA PANCING	Komp. PCI Blok 34 No. 15 Rt.04/05 Kel. Kedzaman Kec. Cibabber	517/3004/0736/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
58	CV. PUTRI KARYA PERSADA	Link. Ramadja Yegat Rt. 02/11 Kel. Citangkil Kec. Citangkil	517/3004/0737/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
59	CV. MAHAKAM MANDIRI	Komp. BPI Blok V1 No. 15 Rt. 04/05 Kel. Kedaleman Kec. Cibabber	517/3004/0738/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
60	PT. GARGA URIP PROTEKSINDO	Jl. Arga Muna B1 No. 20 Rt. 01/03 Kel. Kotasari Kec. Gregol	517/3004/0739/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
61	PT. GAMA INDUSTRIAL	Jl. Raya Anyer Link. Cilurah Rt. 06/02 Kel. Kepuh Kec. Cilidgong	517/3004/0741/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
62	CV. CITRA DAMAI	SuperMail Cillegon Lt. Dsuar Blok CC No. 09 & 11 Kel. Ramadja Kec. Purwakarta	517/3004/0742/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
63	BINTANG CELL	Komp. Metro Cillegon Ruko Blok B1 No. 2 Rt. 01/08 Kel. Panggungraw Kel. Jombang	517/3004/0743/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
64	CV. BELLE BERKAH SUKSES	Jl. Arga Mulla B1/20 Rt. 09/03 Kel. Kotasari Kec. Gregol	517/3004/0744/BINUS/PAK/2013	24 Oktober 2013
65	PT. GEMA INDUSTRIAL			
PM				
1	PT. RASHAD INDOTAMA PERKASA	Jl. Raya Surabaya Link. Pringor Rt. 01/03 Kel. Surabaya Kec. Pulomerak	517/3004/0260/BINUS/PM/2013	2 Oktober 2013
2	PT. SURYA INDONESIA	Komp. Ruko Cillegon Green Mega Blok E2 No. 15, 16, 17 Rt. 01/01 Kel. Cibaber Kec. Cibabber	517/3004/0261/BINUS/PM/2013	2 Oktober 2013
3	CV. MANDIRI	Link. Kumpangates Rt. 001/008 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	517/3004/0262/BINUS/PM/2013	2 Oktober 2013
4	CV. CAHAYA NIAGA FAJARINDO	Jl. Kimudakir Link. Cigading rt. 001/001 Kel. Tegalaratu Kec. Cibabber	517/3004/0264/BINUS/PM/2013	2 Oktober 2013
5	PT. BANGUN LINTAS SAMUDERA	Jl. Di. Panjaitan Link. Munjul Kel. Bendungan Kec. Cilidgong	517/3004/0265/BINUS/PM/2013	2 Oktober 2013
6	CV. J A B A L	Jl. Raya Merak No. 73 Link. Jombangkail Rt. 03/01 Kel. Maralitg Kec. Jombang	517/3004/0266/BINUS/PM/2013	2 Oktober 2013
7	PT. HATI BENING	Jl. Cempaka No. 62 Rt. 17/05 Kel. Civedus Kec. Cilidgong	517/3004/0267/BINUS/PM/2013	2 Oktober 2013
8	PT. BANGUN LINTAS SAMUDERA	Jl. Di. Panjaitan Link. Muncul Kel. Bendungan Kec. Cilidgong	517/3004/0268/BINUS/PM/2013	2 Oktober 2013

10	CV. KURNIA ALAM	Kp. Panca Rt. 01/01 Kel. Lebagede Kec. Pulotirak	517/3004/0270/BINUS/PM/2013	7 Oktober 2013
11	PT. ANUGERAH DUTA AGUNG	Jl. Belbés E.08 No. 10 Rt. 05/08 Kel. Cibebber Kec. Cibebber	517/3004/0271/BINUS/PM/2013	7 Oktober 2013
12	PT. USAHA MANDIRI CILEGON	Komp. TCI Blok H-3 No. 25 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517/3004/0272/BINUS/PM/2013	7 Oktober 2013
13	PT. GUNUNG KEPUNH	Jl. Sunan Demak Link. Masjid Rt. 16/04 Kel. Kepuh Kec. Chwajdan	517/3004/0273/BINUS/PM/2013	18 Oktober 2013
14	PT. ARIA JAYA ABADI	Link. Pringori Rt. 01/03 Kel. Suralaya Kec. Pulotirak	517/3004/0274/BINUS/PM/2013	18 Oktober 2013
15	PT. PUTRA BAJA HUTAMA	Komp. Tw FWA 37111 Rt. 04/05 Kel. Warnasari Rt. 01/01 Kel. Tamansari Kec. Pulotirak	517/3004/0275/BINUS/PM/2013	18 Oktober 2013
16	PT. TRANSKURYA USAHAMAJU	Terminal Peti Kemas Pt. Indah Klat Tamansari Rt. 01/01 Kel. Tamansari Kec. Pulotirak	517/3004/0276/BINUS/PM/2013	18 Oktober 2013
17	RESTORAN BINTANG LAGUNA	Jl. Raya Jend. A. Yani Kel. Kedaleman Kec. Cibebber	517/3004/0277/BINUS/PM/2013	18 Oktober 2013
18	PT. ANGGUN ADI SENTOSA	Jl. Raya Bojonegara No. 60 Rt. 02/04 Kel. Kedaleman Kec. Cibebber	517/3004/0278/BINUS/PM/2013	24 Oktober 2013
19	PT. BINESOO MULYATAMA SELJAHTERA	Jl. Eropa I Kav I Stage 1/4 KIEC Warnasari Kec. Citangkil	517/3004/0279/BINUS/PM/2013	24 Oktober 2013
20	PT. BERRAT BAHTERA NUSANTARA	Jl. Raya PCI Ruko Cilegon City Square Blok H7 Rt. 05/07 Kel. Kedaleman Kec. Cibebber	517/3004/0280/BINUS/PM/2013	24 Oktober 2013
21	PT. MUTIARA KAHAL	Jl. Kamojang No. 11 Rt. 01/01 Kel. Suralaya Kec. Pulotirak	517/3004/0281/BINUS/PM/2013	24 Oktober 2013
22	PT. MUTIARA ALFINI	Link. Tegahwangi lama Rt. 01/06 Kel. Ramanuju Kec. Grogol	517/3004/0282/BINUS/PM/2013	24 Oktober 2013
23	PT. CAKRAWALA GOKINDO	Jl. Jombang Masjid No. 14 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0283/BINUS/PM/2013	28 Oktober 2013
24	PT. JAYA MURNI BANTEN	Link. Pringori No. 29 Rt. 01/03 Kel. Suralaya Kec. Citangkil	517/3004/0284/BINUS/PM/2013	28 Oktober 2013
25	PT. ANUGERAH SAKTI SEHATI	Jl. Piranha Kav Blok C no. 108 Rt. 17/09 Kel. Tamanbaru Kec. Citangkil	517/3004/0285/BINUS/PM/2013	28 Oktober 2013
26	PT. CAKRAWALA GOLFINDO	Jl. Jombang Masjid No. 14 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang	517/3004/0286/BINUS/PM/2013	28 Oktober 2013
27	CV. CITERA CAHAYA PIRANTI	Link. Jombang Masjid Barat No. 12 Rt. 02/02 Kel. Jombang Masjid Kec. Citangkil	517/3004/0287/BINUS/PM/2013	28 Oktober 2013
28	PT. PURNA BAJA HARSCO	Jl. B3 Karesan Krakatau Steel Kel. Samangraya Kec. Citangkil	517/3004/0288/BINUS/PM/2013	31 Oktober 2013
29	PT. KRAKATAU POS-CHEM DONG-SUN CHEMICAL	Jl. Afrika No. 02 Kawasan Industri Krakatau Cilegon Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	517/3004/0026/BINUS/PB/2013	2 Oktober 2013
30	PT. DAEWU LOGISTICS ASIA	KIEC A42 - A43 Jl. Antarkita II Kel. Kotasari Kec. Grogol	517/3004/0027/BINUS/PB/2013	2 Oktober 2013
31	PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk	Jl. Raya Merak Km. 115 Kel. Rawaranum Kec. Grogol	517/3004/0028/BINUS/PB/2013	24 Oktober 2013
32	PT. DIPO STAR FINANCE	Komp. PCI Cilegon City Square Rt. 05/06 Kel. Kedaleman Kec. Cibebber	517/3004/0029/BINUS/PB/2013	26 Oktober 2013

Mengetahui, 31 Oktober 2013
Kabid Perdagangan dan Pembinaan Pasar


H. MUHAMMAD SATIRI
NIP. 19600503 19803 1 017

Kasi Perdagangan Dalam Negeri


IKHSAN HASIBUAN, S.Sos, MM
NIP. 19860613 198703 1 011

DAFTAR PENERBITAN SIUP
BULAN SEPTEMBER 2013

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NO. SIUP	TGL PENERBITAN
1	KOP. CIKUSA PATRA MANDIRI	Link. Cikusa Rt. 01/01 Kel. Gerem Kec. Grégoir	517/3004/0602/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
2	PT. BERLIAN PUTIH SEMENTARA	Jl. KH. Simin Link. Dalliran Rt. 10 Kel. Kebondalem Kec. Purwakarta	517/3004/0603/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
3	CV. SEJAHTERA	Jl. BBS III Ciledug Cilegon Rt. 07/06 No. 4 Kel. Ciledug Kec. Cilegon	517/3004/0604/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
4	CV. YUDHATAMA	BPI Blok K1 No. 119 Rt. 01/04 Kel. Pangungrawi Kec. Jombang	517/3004/0605/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
5	CV. MEILASARI	Bumi Rakata ri Blok A7 No. 26 Rt. 02/06 Kel. Ciledug Kec. Cilegon	517/3004/0606/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
6	CV. LIMA PUTRA	Link. Pabuaran Rt. 01/05 Kel. Rawarung Kec. Pulotanak	517/3004/0607/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
7	CV. ANUGERAH JAYA MANDIRI	Jl. Satria Ciduaak Rt. 15/04 Kel. Bendungan Kec. Cilegon	517/3004/0608/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
8	CV. TITAN BOLTIN	Jl. Alamanda Asri Kay 202 Rt. 02/10 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	517/3004/0609/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
9	PT. MANDIRI TEHNIK SEJAHTERA	Komp. TCI Blok H10 No. 25 Rt. 02/05 Kel. Sumkalya Kec. Jombang	517/3004/0610/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
10	CV. KARYA LINTAS BAHTERA	Link. Pengairan Baru Rt. 003/008 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	517/3004/0611/BINUS/PPK/2013	03 September 2013
11	CV. MUCHAROM PUTRA	Jl. Buyut Arman No. 34 Rt. 01/01 Kel. Citaangkil Kec. Citaangkil	517/3004/0613/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
12	PT. LENTERA PUTRA UTAMA	Taman Cilegon Indah Blok H12 No. 43 Rt. 03/05 Kel. Sukmaja Kec. Jombang	517/3004/0614/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
13	PD. DUA PUTRI	Link. Baru Rt. 07/04 Kel. Tamansari Kec. Pulotanak	517/3004/0615/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
14	PT. BUMI CAKRAWALA INSPEKSINDO	Jl. LeJend R. Suprpto No. 49 Rt. 01/1004 Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	517/3004/0616/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
15	PD. HJ. MANIS	Jl. Kranggot Link. Telu Rt. 02/04 Kel. Jombangweton Kec. Jombang	517/3004/0618/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
16	PT. MAJU MERAH MAS	Gedung Artha Pura Jl. Raya Merak Km. 117 Kel. Gerem Kec. Pulotanak	517/3004/0617/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
17	CV. AGUNG KRAKATAU	Sunan Kudus Link. Kubangwetu Rt. 02/04 Kel. Samangraya Kec. Cibeber	517/3004/0619/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
18	DAVIN SPORT	Jl. SA. Tiriyasa simpang tiga Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	517/3004/0620/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
19	PD. TUNGGAL PUTRA	Jl. Sunan Ampel Link. Tegal Malang Rt. 01/02 Kel. Warasari Kec. Citaangkil	517/3004/0621/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
20	CV. SUMBER PEZEKI TEKNIK	Komp. PCI Blok D.109 No. 25 Rt. 006/004 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	517/3004/0622/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
21	PT. BELIAN MITRA NUSANTARA	Komp. PCI Blok E1F No. 12A Rt. 005/001 Kel. Kebondalem Kec. Cibeber	517/3004/0623/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
22	PT. BANGUN CIPTA SUKSES	PCI Blok B33 No. 06 Rt. 05/05 Kel. Kedaleman Kec. Cibeber	517/3004/0624/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
23	CV. GANESH INOVASI	Link. Kruceng Rt. 09/03 Kel. Kebonsari Kec. Citaangkil	517/3004/0625/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
24	CV. BAJA CILEGON MANDIRI	Jl. Kedung Kemiri No. 144 Kav Blok F Rt. 001/007 Kel. Chwuduk Kec. Cilegon	517/3004/0626/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
25	PT. ADI MAHA KUASA	Link. Kotak Malang Rt. 01/05 Kel. Sualaya Kec. Pulotanak	517/3004/0627/BINUS/PPK/2013	10 September 2013
26	CV. MUBAROK 33	Link. Kaligandu Bujang Baros Rt. 14/06 Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta	517/3004/0628/BINUS/PPK/2013	12 September 2013
27	TOKO YEGA	Jl. Arjuna Kav Blok J No. 1A Rt. 06/03 Kel. Bendungan Kec. Cilegon	517/3004/0629/BINUS/PPK/2013	12 September 2013
28	KLINIK UMUM DAN APOTEK TRIHUSADA	Link. Kaligandu Komplek Rt. 12/05 Kel. Purwakarta Kec. Cilegon	517/3004/0630/BINUS/PPK/2013	12 September 2013
29	ANEKA PLASTIK	Jl. A. Yani No. 113 Kec. Cilegon	517/3004/0631/BINUS/PPK/2013	12 September 2013
30	CV. BRAWIJAYA SUMBER SENTOSA	Jl. Laks RE. Martadinata Link. Sukamaju Rt. 06/06 Kel. Mekasari Kec. Pulotanak	517/3004/0632/BINUS/PPK/2013	12 September 2013
31	PT. JAYA SEMPURNA INDONESIA	Link. Barigil Rt. 01/04 Kel. Suralaya Kec. Pulotanak	517/3004/0633/BINUS/PPK/2013	12 September 2013
32	CV. CAHYA PRIBUMI	Link. Cirtu Rt. 001/006 Kel. Samangraya Kec. Citaangkil	517/3004/0634/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
33	CV. MULYA JAYA	Link. Sembirata Rt. 003/003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	517/3004/0635/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
34	PD. WIRA MOTOR	Jl. A. Yani No. 18A Kel. Jombangweton Kec. Jombang	517/3004/0636/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
35	CV. MAJU JAYA	Komp. PCI Blok D68 No. 20 Rt. 006/004 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	517/3004/0636/BINUS/PPK/2013	18 September 2013

36	CV. RIDO JAYA STEEL	Link, Tegai Tong Rt. 17/06 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	517/3004/0637/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
37	CV. SINAR MULYA	Komp. Jering Baru Permal No. 67 Rt. 02/03 Kel. Karang Asem Kec. Cibéber	517/3004/0638/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
38	MIREN	Ruko Cillegon Highway Rt. 05/06 Kel. Kedaleman Kec. Cibéber	517/3004/0639/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
39	X - GRAVIE	Link, Cidangiang Rt. 05/03 Kel. Bawaarum Kec. Grdgol	517/3004/0640/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
40	CV. HARKAT SEJATI	Perum BCK Blok C06/14 Rt. 003/010 Kel. Cibéber Kec. Cibéber	517/3004/0641/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
41	CV. MARINE ANGGA SAPUTRA	Jl. Raya Suralaya Link, Kotak Masing Rt. 001/005 Kel. Suralaya Kec. Pulonherak	517/3004/0642/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
42	CV. MUTIARA TEKNIK	Link, Kedung Rt. 002/004 Kel. Gedongdalem Kec. Jombang	517/3004/0643/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
43	TOKO INTEN	Jl. Raya Merak No. 23 Kel. Masjid Kec. Jombang	517/3004/0644/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
44	PT. PUTRA, ABADI SINERGI	Perum Metro Candana Blok M1 No. 7 Rt. 02/09 Kel. Kabondalem Kec. Purwakarta	517/3004/0645/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
45	PT. SAHAMI TEKINDO UTAMA	Jl. S. Gunung Jati Link, Cilandan Rt. 17/25 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwardan	517/3004/0646/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
46	CV. GEMILANG SETHING	Jl. Kopodang No. 104 Kav Blok H Rt. 03/05 Kel. Bendingan Kec. Cilegion	517/3004/0647/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
47	PT. KARUNIA AWAN NUSANTARA	Link, Cukurah Rt. 06/02 Kel. Kepuh Kec. Ciwipadan	517/3004/0648/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
48	PT. CITRA ADI PRIMA	Jl. Bukit Baja Raya Blok B1/8 Rt. 22/09 Kel. Cihaduk Kec. Cilegion	517/3004/0649/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
49	CV. OCEAN OPTIK	Link, Jombang Masjid Rt. 002/001 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0650/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
50	PT. QTE MATRIAL	Jl. Lembang Raya No. 13 Rt. 01/03 Kel. Citangkil Kec. Citangkil	517/3004/0651/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
51	PT. KABITA FYAH CONTINENTAL	Jl. Th. Ismail No. 42 Blok I Rt. 07/06 Kel. Bendingan Kec. Cilegion	517/3004/0652/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
52	CV. EKA JAYA TEKNIK	Komp. PCI Blok D78 No. 03 Rt. 02/05 Kel. Cibéber Kec. Cibéber	517/3004/0653/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
53	CV. ASIA KARYA MANDIRI	Link, Pacinan Rt. 03/01 Kel. Pabean Kec. Purwakarta	517/3004/0654/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
54	PT. OH SUNG FOOD KOREAN	Ruko Cillegon Business Square Blok B No. 17,20-22 Rt. 15/06 Kel. Kedaleman Kec. Cibéber	517/3004/0655/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
55	CV. BAHTERA ALAM	Kp. Maka Maja Rt. 03/05 Kel. Bawaarum Kec. Grdgol	517/3004/0656/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
56	CV. IDAMAN KREASI	Jl. Raya Anyer Kalentemu Barat No. 10 Rt. 01/11 Kel. Samangraya Kec. Citangkil	517/3004/0657/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
57	CV. PUTRA BATU PAYUNG MANDIRI	Link, Batu Payung Rt. 06/05 Kel. Lebak Gede Kec. Pulonherak	517/3004/0658/BINUS/PPK/2013	18 September 2013
58	PT. PUTRA CAKRA NUSANTARA	Jl. Raya Bojonegara Link, Karang Tengah Rt. 01/04 Kel. Kedaleman Kec. Cibéber	517/3004/0659/BINUS/PPK/2013	26 September 2013
59	PT. HAYKA PERSADA	Kp. Lebak Gede Rt. 03/07 Kel. Lebak Gede Kec. Pulonherak	517/3004/0660/BINUS/PPK/2013	26 September 2013
60	"RAJAWALI" RUMAH MAKAN	Jl. Raya Merak Kel. Gerem Kec. Grdgol	517/3004/0661/BINUS/PPK/2013	26 September 2013
61	CV. PUTRA PANCURAN MAKUMUR	Link, Pancuran Rt. 003/003 Kel. Suralaya Kec. Pulonherak	517/3004/0662/BINUS/PPK/2013	26 September 2013
62	PT. TIMAS MERAK	Jl. RE. Martadinata No. 04 Rt. 02/02 Kel. Sukajadi Kec. Pulomprak	517/3004/0663/BINUS/PPK/2013	26 September 2013
63	CV. SUMBER SAHABAT TEKNIK	PCI Blok D98 Rt. 03/05 Kel. Cibéber Kec. Cibéber	517/3004/0664/BINUS/PPK/2013	26 September 2013
64	CV. MEGA KARYA GLOBALINDO	Link, Wates Telu Rt. 13/05 Kel. Purwakarta Kec. Purwakarta	517/3004/0665/BINUS/PPK/2013	26 September 2013
65	CV. ABADI JAYA TEKNIK	Komp. PCI Blok D96 No. 07 Rt. 03/05 Kel. Cibéber Kec. Cibéber	517/3004/0666/BINUS/PPK/2013	26 September 2013
66	CV. CAHAYA BINTANG NUSANTARA	Jl. Fatahillah Link, Warungkara Rt. 19/03 Kel. Randakari Kec. Ciwanjdan	517/3004/0667/BINUS/PPK/2013	30 September 2013
67	PD. FAJAR BERSINAR	Link, Kranggot Rt. 11/04 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517/3004/0668/BINUS/PPK/2013	30 September 2013
68	CV. HAURA TRANSPORTASI	Link, Kadasung Rt. 13/07 Kel. Tambaru Kec. Citangkil	517/3004/0669/BINUS/PPK/2013	30 September 2013
69	CV. JAYA ABADI	Jl. Raya Anyer No. 27 Link, Pintu Air Rt. 04/04 Kel. Samangraya Kec. Citangkil	517/3004/0670/BINUS/PPK/2013	30 September 2013
70	CV. PUTRA PRATAMA MANDIRI	Komp. Puri Krakatau Hijau E6/33 Rt. 14/04 Kel. Kolasari Kec. Grogol	517/3004/0671/BINUS/PPK/2013	30 September 2013
71	CV. RUKUN DAMAI	Kp. Sukasari Rt. 01/01 Kel. Randakari Kec. Ciwanjdan	517/3004/0672/BINUS/PPK/2013	30 September 2013
72	CV. PUSAKA TEKNIK BINTANG JAYA	Cillegon Business Square Blok B01 Rt. 005/006 Kel. Kedaleman Kec. Cibéber	517/3004/0673/BINUS/PPK/2013	30 September 2013
73	CV. HAYATEK ABADI	Komp. Metro Cillegon Roko Blok B1 Kel. Pangunggrah Kec. Jombang	517/3004/0674/BINUS/PPK/2013	30 September 2013
74	TOKO NABILA EDI	Jl. KH. Arifudin Rt. 02/01 Kel. Citangkil Kec. Citangkil	517/3004/0675/BINUS/PPK/2013	30 September 2013
75	KOPPIINA	Jereng Ilir No. 123 Kel. Karangasem Kec. Cibéber	517/3004/0676/BINUS/PPK/2013	30 September 2013

76	CV. CALVINA PD. RITA PRIMA	Jl. A. Yani Ruko Cilegon Green Mega Blok E2/23 Kel. Cibeber Kec. Cibebber Jl. Gelatik Rt. 10/05 Kaw Blok I No. 161 Kel. Bendingan Kec. Cilegon	517/3004/0677/BINUS/PM/2013 517/3004/0678/BINUS/PM/2013	30 September 2013 30 September 2013
77	PM 1 PT. BIMBA WANGI JAYA 2 PT. DIGITAL HARMONI 3 PT. DERMA BEAUTICA MEDIKA 4 PT. KARYA WULAYA 5 PT. TRANS GLOBAL KARYA DERMAGA 6 PT. ANGEL PANAUH TAMBI 7 PT. MUDA DUAYA PERKASA 8 PT. DAUSY KALIMAYA SAMUDERA 9 PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE 10 PT. SRIJAYA SEGARA UTAMA 11 PT. KENZA PUTRA PRATAMA 12 CV. ANUGERAH MANDIRI 13 PT. TRI BINTANG MAJU BERSAMA 14 PT. LAKE LARA INDONESIA 15 PT. INTIMAS PAMURAH LIMBAH 16 PT. TOTAL GRAHA KONSTRUKSI 17 PT. TRI FOKUS 18 PT. CATURINDO PERMATA 19 PT. SULTAN HULUTISHA SARANA ABADI 20 PT. THREE WIN 21 PT. AKEAL ABADI INTERNASI	Link. Keserangan Rt. 02/04 Kel. Rawasarum Kec. Grogol Cilegon Green Mega Blok D3 No. 23 - 27 Kel. Cibebber Kec. Cibebber Ruko Cilegon City Square Blok C No. 17 & 18 Kel. Kedalemman Kec. Cibebber Jl. KH. Ishak Link. Semaja No. 45 Rt. 01/4/001 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Jl. S. Panran Km. 13 Link. Lijajar Rt. 01/9/006 Kel. Tegalaratu Kec. Chwandan Jl. Palembang Boulevard Blok L8 Rt. 06/03 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Link. Tegahwangi Sambi Payung Rt. 004/002 Kel. Rawasarum Kec. Grogol Komp. Arga Baja Pura Ji. Arga Raung B3 No. 31 Rt. 09/03 Kel. Kotasari Kec. Grogol Komp. ABP Ji. Arga Raung B3 No. 31 rt. 09/03 Kel. Kotasari Kec. Grogol Link. Ketelet Rt. 03/01 Kel. Samangraya Kec. Cibanting Jl. Temu Putih No. 84 Rt. 02/12 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang Jl. Palm Hill No. 8 Rt. 01/07 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Jl. Darma Kusuma No. 007 rt. 01/2/003 Link. Pegebang Kel. Kelilang Kec. Cilegon Komp. Uko Metro Cilegon Blok A No. 11 Kel. Panggungrawi Kec. Jombang Jl. Raya Cibebber No. 08 Rt. 01/01 Kel. Cibebber Kec. Cibebber Jl. Puskesmas No. 123 Rt. 01/66 Link. Tegahwangi Lama Kel. Rawasarum Kec. Grogol Link. Jombang Cernara Rt. 001/006 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang Perum BCK Blok D 12A No. 29 Kel. Cibebber Kec. Cibebber Wisma Permata No. 02 Rt. 05/04 Kel. Kebondalem Kec. Purwakarta Link. Cipliang Ilir Rt. 04/04 Kel. Grogol Kec. Grogol	517/3004/0239/BINUS/PM/2013 517/3004/0240/BINUS/PM/2013 517/3004/0241/BINUS/PM/2013 517/3004/0242/BINUS/PM/2013 517/3004/0243/BINUS/PM/2013 517/3004/0244/BINUS/PM/2013 517/3004/0245/BINUS/PM/2013 517/3004/0246/BINUS/PM/2013 517/3004/0247/BINUS/PM/2013 517/3004/0248/BINUS/PM/2013 517/3004/0249/BINUS/PM/2013 517/3004/0250/BINUS/PM/2013 517/3004/0251/BINUS/PM/2013 517/3004/0252/BINUS/PM/2013 517/3004/0253/BINUS/PM/2013 517/3004/0254/BINUS/PM/2013 517/3004/0255/BINUS/PM/2013 517/3004/0256/BINUS/PM/2013 517/3004/0257/BINUS/PM/2013 517/3004/0258/BINUS/PM/2013 517/3004/0259/BINUS/PM/2013	03 September 2013 03 September 2013 03 September 2013 03 September 2013 03 September 2013 12 September 2013 12 September 2013 12 September 2013 12 September 2013 12 September 2013 12 September 2013 12 September 2013 12 September 2013 12 September 2013 12 September 2013 26 September 2013 26 September 2013 26 September 2013 26 September 2013 278-september 2013 278-september 2013
	PB 1 PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE 2 PT. SUPER PLASTINDO UTAMA 3 PT. GUNA TEGUH ABADI	Ruko Green Mega Blok D3/16 Kel. Cibebber Kec. Cibebber Jl. Raya Anyer Km. 10 Kel. Tegalaratu Kec. Chwandan Jl. Bojonegara Rt. 01/04 Kel. Kebondalem Kec. Cibebber	517/3004/0622/BINUS/PM/2013 517/3004/0223/BINUS/PM/2013 517/3004/0224/BINUS/PM/2013	18 September 2013 18 September 2013 18 September 2013

Mengetahui, 31 September 2013
Kabid Perdagangan dan Pembinaan Pasar


H. MUHAMMAD SATIRI
NIP. 19600603 198403 1 017

Kasi Perdagangan Dalam Negeri

IKHSAN HASIBUAN, S.Sos., MM
NIP. 19660613 198703 1 011

DAFTAR PENERBITAN SIUP
BULAN AGUSTUS 2013

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NO. SIUP	TGL PENERBITAN
1	CV. GINA SELJAHTERA	Link, Krenceng Rt. 10/03 Kel. Kebonsari Kec. Krenceng	5173004/0560/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
2	NAGA MURNI WARNET	Jl. KH. Wasyid Ruko Pasar Baru Cilegon Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5173004/0561/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
3	CV. KRAKATAU TECHNICAL MANDIRI	Link, Sukamaju Rt. 01/004 Kel. Ramanuju Kec. Jombang	5173004/0562/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
4	CV. PUTRA KALIAGUNG	Link, Kaligandu bujang baros Rt. 14/06 Kel. Perwakarta Kec. Purwakarta	5173004/0563/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
5	CV. ERSA JAYA	Jl. Raya Anyer Link, Sukajaya No. 06 Rt. 04/02 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	5173004/0564/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
6	PT. GRAHA BUANA INDOJAYA LESTARI	Jl. Arga Merbabu Blok B No. 4 Kel. Kotasari Kec. Grogol	5173004/0565/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
7	PT. DEWAWADOH ALAM SETUNGGAL	Link, Sukasari Rt. 02/01 Kel. Lebak gede Kec. Puloarek	5173004/0566/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
8	CV. GLOBAL PRIMA PRATAMA	Link, Puloanda Rt. 02/01 Kel. Lebak gede Kec. Puloarek	5173004/0567/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
9	KEMBANG SALON	Jl. LeLend, R. Supripto Rt. 009/004 Link. Sukamaju Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta	5173004/0568/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
10	CV. KALIDWAN MANDIRI UTAMA	Link, Tegul Cabe Rt. 03/02 Kel. Citangkil Kec. Citangkil	5173004/0569/BINUS/PPK/2013	13 Agustus 2013
11	PT. INDOGOYA BANTEN PERSADA	Jl. A. Yani No. 136 Link, Gudang Rt. 01/03 Kel. Jombang wetan Kec. Jombang	5173004/0570/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
12	PT. ANUGRAH AGUNG MESSA	Jl. Gerpuh Kav Blok C Rt. 19/09 Kel. Tamanbaru Kec. Citangkil	5173004/0571/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
13	PT. DERUJO MULYA	Jl. Lotus Raya No. 39 Rt. 06/10 Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta	5173004/0572/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
14	CV. INSIAN, Q	Ruko Bonakarta A.30 Cilegon Rt. 02/02 Kel. Masigit Kec. Jombang	5173004/0573/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
15	CV. KARYA SEKAWAN	Jl. Mawar F.10/13 No. 61 BBS 8 Rt. 03/04Kel. Chwedus Kec. Cilegon	5173004/0574/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
16	CV. ANAM PUTRA GADING	Jl. Sunan Bonang Link, Cigading Pasar Rt. 01/02 Kel. Kubangstari Kec. Chwandan	5173004/0575/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
17	CV. DWI PUTRA MANDIRI	Link, Lingga Jati Rt. 02/01 Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil	5173004/0576/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
18	CV. PUTRA MILENIA	Perum BCK Blok B.7 No. 13 Rt. 02/11 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	5173004/0577/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
19	CV. DEWI GRAHA, ABADI	Perum BCK Blok E.15 No. 01 Rt. 03/09 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	5173004/0578/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
20	CV. SELJAM JAYA	Jl. Raya Merak Link, Gerem raya Rt. 02/04 Kel. Gerem Kec. Grogol	5173004/0579/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
21	RIM Ayam Tulang Lunak Ibu, Fird Dede Rusli	Link, Rokal Rt. 01/01 Kel. Jombang wetan Kec. Jombang	5173004/0580/BINUS/PPK/2013	21 Agustus 2013
22	CV. SEPTIANA PUTRI UTAMA	Link, Waring Juet Kel. Samang Raya Kec. Citangkil	5173004/0581/BINUS/PPK/2013	26 Agustus 2013
23	CV. ANGKASA TEKNIK UTAMA	Link, Rokal Rt. 01/01 Kel. Jombang wetan Kec. Jombang	5173004/0582/BINUS/PPK/2013	26 Agustus 2013
24	CV. HARZA COLLECTION	Jl. TB. Ismail Kav Blok I No. 225 Rt. 02/05 Kel. Bendungan Kec. Cilegon	5173004/0583/BINUS/PPK/2013	26 Agustus 2013
25	CV. DARANGDARA JAYA MAKKUR	Jl. Ganada Utama Perumahan Cibeber F.9 No. 43 Kel. Cibeber Kec. Cibeber	5173004/0584/BINUS/PPK/2013	26 Agustus 2013
26	CV. MANGGALA UTAMA	Komp. PCI Blok D. 88 No. 12 A Kel. Cibeber Kec. Cibeber	5173004/0585/BINUS/PPK/2013	26 Agustus 2013
27	CV. WANITA JAYA	Jl. S. Gumung Jati Link, Linggar Rt. 19/06 Kel. Tegalaratu Kec. Chwandan	5173004/0586/BINUS/PPK/2013	26 Agustus 2013
28	CV. TRI KUSUMA RAYA	Jl. PLTA Selorejo No. 28 Komp. Suralaya Kec. Puloarek	5173004/0587/BINUS/PPK/2013	27 Agustus 2013
29	CV. ARTA MANUNGGAL	Jl. Nasa Indah VI No. 05 Rt. 16/05 Kel. Chwedus Kec. Cilegon	5173004/0588/BINUS/PPK/2013	27 Agustus 2013
30	MENARA AGUNG CILEGON	PCI blok E.22 No. 21 Rt. 02/07 Kel. Kedatioman Kec. Cibeber	5173004/0589/BINUS/PPK/2013	27 Agustus 2013

31.	CV. ANDARU ENGINEERING	Puri Krakatau Hijau Blok E4 No. 01 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517300400590/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
32.	KOPKAR GITA SURALAYA	Jl. Balai Desa Kp. Kubang Kepuh Kel. Suralaya Kec. Pulomerak	517300400591/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
33.	CV. PUTRA KITA	Link. Berigil RL 01/04 Kel. Suralaya Kec. Pulomerak	517300400592/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
34.	CV. JAYA SEMPURNA	Link. Berigil RL 01/04 Kel. Suralaya Kec. Pulomerak	517300400593/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
35.	CV. BENTENG BANTEN	PCI Blok D.105 No. 1 RL 05/04 Kel. Cibeber Kec. Cibebber	517300400594/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
36.	CV. RINJANI MULYA	Jl. H. Agus Salim Link. Linggar Jati Kel. Lebak Demok Kec. Citangkil	517300400595/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
37.	CV. REMAJA GEMILANG DESIGN	Jl. Perumnas No. 24 Kel. Gerem Kec. Grogol	517300400596/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
38.	EXECUTIF GYM	Jl. Raya Anyer Warangkara Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	517300400597/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
39.	PT. SINA CIPTA JAYA	Jl. Sadewa No. 15 RL 10/05 Kel. Cihaduk Kec. Ciligon	517300400598/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
40.	PT. ALDEBU INDONESIA	Link. Kalentemu Barat RL 01/01 Kel. Samangraya Kec. Citangkil	517300400600/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
41.	CV. JAYA SAKTI	Kp. Jerang Ilir RL 02/03 Kel. Karangasem Kec. Cibebber	517300400601/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
42.	PD. BANGKIT JAYA			
	PM			
1.	PT. TAMARA MAKMUR ABADI	Jl. Arga Wellnang Blok B.6 No. 25 RL 05/03 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517300402117/BINUS/PM/2013	13 Agustus 2013
2.	PT. TERMINAL SARANA BANTEN UTAMA	Jl. S. Gunung Jati Link. Lijajar RL 19/06 Kel. Tegalaru Kec. Cihadan	517300402118/BINUS/PM/2013	13 Agustus 2013
3.	PT. BARANA MITRA SEJATI	Jl. Raya Anyer Km. 121 RL 001/001 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	517300402119/BINUS/PM/2013	13 Agustus 2013
4.	PT. GLOBAL PERDAMA INDONESIA	Jl. Arga Kawil Blok A.1 No. 14 RL 11/03 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517300402220/BINUS/PM/2013	13 Agustus 2013
5.	TOKO EMAS SINAR JAYA	Pasar baru Ciligon Kioe A/152 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517300402221/BINUS/PM/2013	13 Agustus 2013
6.	PT. SINAR ABADI MAKMUR	Link. Rawa Gondang RL 01/05 Kel. Citangkil Kec. Citangkil	517300402222/BINUS/PM/2013	13 Agustus 2013
7.	PT. DIMAS MANUNGKAL	Kp. Samangraya Timur RL 04/014 Kel. Kebondalem Kec. Purwakarta	517300402223/BINUS/PM/2013	13 Agustus 2013
8.	PT. TALENTA KARYA PRIMA	Jl. Sunan Demak Kp. Ciwandan rt. 05/02 Kel. Kepuh Kec. Ciwandan	517300402224/BINUS/PM/2013	13 Agustus 2013
9.	PT. AGUNG BANTEN JAYA	Jl. Temu Putih RL. B/14 BBS III Blok B4 No. 3 Kel. Cihaduk ec. Ciligon	517300402225/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
10.	PT. BUKIT INTAN PERKASA	Jl. Bukit Baja Grasha BBS III RL 02/05 Kel. Cihaduk Kec. Ciligon	517300402226/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
11.	PT. SEMESTA BAJA KONSTRUKSI	Link. Rokal RL 01/10 Kel. Jombang wetan Kec. Jombang	517300402227/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
12.	PT. WACANA RAGAM	Jl. Fatmahliah Link. Sri Tanjung RL 04/01 Kel. Randasari Kec. Ciwandan	517300402228/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
13.	PT. MUTIARA BANGUN SELJAHTERA	Link. Tegat Tong RL 11/06 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil	517300402229/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
14.	PT. TRIPUTRITAMA KREASINDO	Jl. Jend. A. Yani No. 05 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517300402230/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
15.	PT. USAHA PRIMA CILEGON	Jl. Kecubung Barat No. 03 RL 01/02 Kel. Cihaduk Kec. Ciligon	517300402231/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
16.	PT. ARTO MORO SENTOSA	Komp. Metro Villa Blok D2 No. 02 Kel. Gedongdalem Kec. Jombang	517300402232/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
17.	PT. BATU MULIA BANTEN	Puri Krakatau Hijau Blok C8 RL 19/06 Kel. Kotasari Kec. Grogol	517300402233/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
18.	PT. NANO FOOD INDONESIA	Ruko Cig Business Square Blok E.5-6-7 RL 05/01 Kel. Kedaleman Kec. Cibebber	517300402234/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
19.	PT. PIONIR BETON INDUSTRI	Jl. Raya Bojonegara Kel. Kedaleman Kec. Cibebber	517300402235/BINUS/PM/2013	21 Agustus 2013
20.	PT. RATU AZZALIA MANDIRI	Perum GCD Blok B.36 No. 01 RL 04/05 Kel. Kalilimbang Kec. Cibebber	517300402236/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
21.	PT. CENTRAL BERKAT INDONESIA	Jl. Australia I Kay H21 KEC Kel. Wamasari Kec. Citangkil	517300402238/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013
22.	CV. WEISA RAHAYU PERTWI	Jl. Jend. A. Yani Kel. Kedaleman Kec. Cibebber	517300402239/BINUS/PM/2013	27 Agustus 2013

PB
1 PT. PERDANA WINDO TEKNOLOGI

5177004/0021/BINUS/PBU/2013

13 Agustus 2013

Menggetahui, 31 Agustus 2013
Kesi Perencanaan dan Pembinaan Pasar



Kesi Perencanaan Dalam Negeri

BKHSAN HASIBUAN, S.Sos. MM
NIP. 19640613 198703 1 011

DAFTAR PENERBITAN SIUP
BULAN JULI 2013

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NO. SIUP	TGL PENERBITAN
1	PK CV. DEVAN NAJI PUTRA	Link Sebrang RT.0107 Lebukgede - Pulomerak	5173004/0495/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
2	CV. CIGADING MEDIKA	Jl. Raya Anyer RT.0104 Kubangsari - Ciwandan	5173004/0496/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
3	ROCKSTAR FAMILY KARAOKE	Jl. Rukan Cilegon Business Square Blok.E No.8,9,10,11 RT.05/06 Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	5173004/0497/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
4	CV. SUNDA HARUM	Jl. Pengaliran Baru No.54 Kotabumi - Purwakarta	5173004/0498/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
5	CV. ZAIRA ELEKTRIK	Jl. Angrek C.8 No.08 RT.04/04 Ciwedus - Cilegon	5173004/0499/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
6	CV. ANDRI MANDIRI	Jl. Pangeran Jayakarta No.68 RT.0103 Masigit - Jombang	5173004/0500/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
7	PT. PUTRI ANJAYA ANUGRAH	Link. Sukajaya RT.094/007 Kebonsari - Citanjak	5173004/0501/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
8	PT. MARTIN SINAR UTAMA	Jl. Raya Cakung - Cilincing Km.3 Jl.Pulodida , <i>Mindurip</i>	5173004/0502/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
9	CV. CITRA UTAMA ANUGRAH NUSANTARA	Jl. TB Ismail Blok.F 94 RT.002007 Chwaduk - Cilegon	5173004/0503/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
10	CV. SATRIA MUDA	Perumnas BCK Blok.C 17 No.29 RT.02/10 Cibeber - Cibeber	5173004/0504/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
11	CV. PRIMA UTAMA	Link. Sambirata RT.0503 Cibeber - Cibeber	5173004/0505/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
12	PT. RAFLESIA INDAH TEKNIK	BBS III Blok.A1 RT.1709 Chwaduk - Cilegon	5173004/0506/BINUS/PAK/2013	01 Juli 2013
13	CV. SELARAS ABADI MAKMIUR	Komp. Metro Cilegon Blok.P.2 No.2 Trupical Garden Jl.Kapt Piere Tendean	5173004/0507/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
14	PT. GEMILANG TEKNIK UTAMA	Jl. Mayjend. Sudoyo Km.7 No.131 RT.002/001 Rawasarum - Cigrogol	5173004/0508/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
15	CV. KARYA MUDA	Jl. Perumnas No.122 Link.Cikurut RT.01/04 Karang Asem - Cibeber	5173004/0509/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
16	CV. FAJAR GEMILANG TEKNIK	Link. Tegat Tong. RT.017/008 Kebon sarf - Citanjak	5173004/0510/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
17	CV. RAHYA PUTRA PRATAMA	Jl. Sutan Syahrir Link. Kubang Sepat RT.002/007 Citanjak - Citanjak	5173004/0511/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
18	PT. RESTU ENJENIRING KONTRUKSI	Jl. Ir Sutarni Link.Krenceng RT.10/03 Kebonsari - Citanjak	5173004/0512/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
19	KOP. DUMASARI SEJAHTERA	Komp.TCI Blok.J.4 No.07 RT.0905 Sukmajaya - Jombang	5173004/0513/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
20	KOP. RUSAMAS	Link. Ramanuju RT.01/04 Citanjak - Citanjak	5173004/0514/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
21	KKUB SWADHARMA EKA PUTRA	Jl. Jend Sudirman No.03 RT.07/111 Ramansuju - Purwakarta	5173004/0515/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
22	PD. ALD JAYA	Link. Cigading Pasar RT.01/02 Kubangsari - Ciwandan	5173004/0516/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
23	NUSA INDAH	Pasar baru Kranggot Sukmajaya - Jombang	5173004/0517/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
24	CV. METROMARF	Perum Metro Cilegon Ruko B.31 RT.01/0/III Panggungrawi - Jombang	5173004/0518/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
25	CV. SAM SURYA PUTRA	Link. Langan Indah RT.005/006 Taman sari - Pulomerak	5173004/0519/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
26	CV. NOVIS ANUGRAH PUTRI	Jl. M. Arif No.84 RT.05/01 Citanjak - Citanjak	5173004/0520/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
27	CV. MEN CELL JAYA	Jl. Sunan Drajat Link.Temugiring RT.14/01 Bnjarjagara - Ciwandan	5173004/0521/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
28	CV. CAHAYA ABADI PRATAMA	Jl. Sunan Giri Link Ciledan RT.18/05 Gunung sugih - Ciwandan	5173004/0522/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
29	CV. SURYA PRATAMA CILEGON	Jl. Ir Sutarni Link. Pelingang RT.15/01 Kebonsari - Citanjak	5173004/0523/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013
30	DEWI MULYA SNACK	Jl. KH. Arifin No.18 C RT.02/01 Citanjak - Citanjak	5173004/0524/BINUS/PAK/2013	03 Juli 2013

31	CV. CITRA NUSA	Jl. Perjuangan Kav. Blok. D No.64 RT.04/02 Chwaduk - Cillegon	517/3004/0525/BINUS/PPK/2013	03 Juli 2013
32	PT. WEDYA KARYA BERSEMI	Jl. Ir. Sutami Link. Kepuh Dendok RT.04/02 Lebak gedé - Citangkil	517/3004/0526/BINUS/PPK/2013	16 Juli 2013
33	PD. ALI	Link. Ramasaju RT.01/04 Citangkil - Citangkil	517/3004/0527/BINUS/PPK/2013	16 Juli 2013
34	CV. ANDARU	Jl. Link Warung Juet RT.03/02 Samangraya - Citangkil	517/3004/0528/BINUS/PPK/2013	16 Juli 2013
35	CV. BERKAH KARYA MANDIRI	Perum BCK Blok B.13 No.14 RT.06/0111 Cibebber - Cibebber	517/3004/0529/BINUS/PPK/2013	16 Juli 2013
36	TOKO EMAS BARI	Pasar Baru Cillegon Kios A 142 - 144 Sukmajaya - Jombang	517/3004/0530/BINUS/PPK/2013	16 Juli 2013
37	TOKO EMAS SINAR JAYA	Pasar Baru Cillegon Kios A 152 Sukmajaya - Jombang	517/3004/0531/BINUS/PPK/2013	16 Juli 2013
38	TOKO EMAS NAGA INDAH	Pasar Baru Cillegon Kios A147 Sukmajaya - Jombang	517/3004/0532/BINUS/PPK/2013	16 Juli 2013
39	MEBEL MEKAR JAYA	Ruko Pasar Baru Cillegon	517/3004/0533/BINUS/PPK/2013	16 Juli 2013
40	CV. MAJAJU 8.27	Jl. Raya Anyer No.56 Ramasaju Citangkil - Citangkil	517/3004/0534/BINUS/PPK/2013	18 Juli 2013
41	CV. EMPAT PILLAR BANTEN	BBS II Jl. Kemuning K.6/18 RT.026/005 Chwedus - Cillegon	517/3004/0535/BINUS/PPK/2013	18 Juli 2013
42	PT. CHEON HARI	Jl. A. Yazil Cillegon Cibebber - Cibebber	517/3004/0536/BINUS/PPK/2013	22 Juli 2013
43	TOKO EMAS MERAH	Pasar Baru Cillegon Kios A No.141 Sukmajaya - Jombang	517/3004/0537/BINUS/PPK/2013	24 Juli 2013
44	TOKO EMAS KRAKATAU	Pasar Baru Cillegon Blok A No.153 Sukmajaya - Jombang	517/3004/0538/BINUS/PPK/2013	24 Juli 2013
45	PT. GARDA SAHAMI	Jl. Sunan Giri Link Citodan RT.17/05 Kel.Gunung sugih Kec.Ciwandan	517/3004/0539/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
46	CV. DWI TUNGGAL PERKASA	Link. Barokah RT.03/013 Kel.Jombang wetan - Kec. Jombang	517/3004/0540/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
47	CV. MAJU JAYA	Jl. Sunan Kalijaga Link. Gambiran RT.12/03 Kel. Gunungugih - Kec.Ciwandan	517/3004/0541/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
48	CV. BINTANG MAZEA	Link. Pridok No.76 RT.06/03 Kel.Sukmajaya - Kec. Jombang	517/3004/0542/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
49	PT. TEGUH GUNA JAYA	Jl. Raya Merak Km.7 Link.Gerem Raya RT.002/04 Gerem - Grogol	517/3004/0543/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
50	KOP. KARYA LESTARI	Jl. Kubang Laban No.56 Panggungrawi - Jombang	517/3004/0544/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
51	CV. PANCA KIHARISMA	Link. Dellingwang RT.01/01 Kebonsari - Citangkil	517/3004/0545/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
52	PT. DAFI PUTRA PRATAMA	Jl. Raya Merak Km.116 Gg.Merak Link. Gerem Raya RT.02/04 Gerem - Grogol	517/3004/0546/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
53	TOKO DINDI	Link. Gambiang RT.04/01 Melarsari - Pulomerak	517/3004/0547/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
54	CV. BANGKIT KARYA	Link. Suka Senang RT.03/01 Tamarasari Pulo merak	517/3004/0548/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
55	AR-RAZAQ NET	Jl. Lembang Raya RT.02/03 Citangkil - Citangkil	517/3004/0549/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
56	PT. SHARP ELECTRONICS INDONESIA	Komp. PCI Blok A.15 No. 8 Rt. 01/06 Kel. Kedalemman Kec. Cibebber	517/3004/0550/BINUS/PPK/2013	25 Juli 2013
57	CV. BERKAH MAJU MANDIRI	Jl. Pintu Tol Cig Barat No. 9 Rt. 3/3 Link. Clora Gedé Kel. Grogol Kec. Grogol	517/3004/0551/BINUS/PPK/2013	29 Juli 2013
58	KKUB SWADHARMA EKA PUTRA	Pasar Baru Cillegon No. 03 Rt. 07/03 Kel. Ramasaju Kec. Purwokarta	517/3004/0552/BINUS/PPK/2013	29 Juli 2013
59	TOKO EMAS NAGA INDAH	Jl. Jend. Sudirman No. 03 Rt. 07/03 Kel. Ramasaju Kec. Jombang	517/3004/0553/BINUS/PPK/2013	29 Juli 2013
60	CV. INTI PRATAMA	Pasar Baru Cillegon Kios A147 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	517/3004/0554/BINUS/PPK/2013	29 Juli 2013
61	CV. YUDISTIRA ADI PERKASA	Jl. Al-Islah Ruko 55 Link. Pegantungan Baru Kel. Jombang wetan Kec. Jombang	517/3004/0555/BINUS/PPK/2013	29 Juli 2013
62	UD. MAMKUR SAKTI	Jl. Pala Blok A1 No. 26 Rt. 09/10 Kel. Chwaduk Kec. Cillegon	517/3004/0556/BINUS/PPK/2013	29 Juli 2013
63	KKUB KARYA BAKTI MANDIRI	Jl. Pagebangan No. 16 Kel. Jombangwetan Kec. Jombang	517/3004/0557/BINUS/PPK/2013	29 Juli 2013
64	CV. TUBAGUS RAYA	Kp. Belacu Rt. 03/02 Kel. Tegal bundar Kec. Purwokarta	517/3004/0558/BINUS/PPK/2013	29 Juli 2013
		Jl. Buyut Arman Rt. 01/01 Kel. Citangkil Kec. Citangkil	517/3004/0559/BINUS/PPK/2013	29 Juli 2013

PT. GURMYONG INDONESIA PT. KRAKATAU PERBENGGKELAN DAN PERAWATAN PT. WINDO ENERGI	Jl. Raya Merak Km. 117 No. 45 Kel. Gerem Kec. Grogol Jl. Raya Anyer Kav A01 Kawasan KIEC Kel. Wamaasari Kec. Cilangkil Ciligon City Square Blok C.02 Rt. 05/06 Kel. Kedalaman Kec. Cibebber	51730040018BINUS/PB/2013 51730040018BINUS/PB/2013 51730040020BINUS/PB/2013	01 Juli 2013 04 Juli 2013 29 Juli 2013
--	---	--	--


 Menerima, 31 Juli 2013
 Kabid Perdagangan dan Pembinaan Pasar
 M. MUHAMMAD SATIRI
 NIP. 15500503 198603 1 017

Kasli Perdagangan Dalam Negeri

 IKHSAN HASBUAN, S.Sos, MM
 NIP. 19660613 198703 1 011

DAFTAR PENERBITAN SIUP
BULAN JUNI 2013

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NO. SIUP	TGL. PENERBITAN
1	PT. KARYA LIMA SEKAWAN	Kav. Blok J No.33 A Kel.Bendungan Kec. Cilegon	5173004/0435/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
2	PO. JAMJURI	Link, Kubang Karu RT.08/03 Kel. Grogol Kec.Grogol	5173004/0431/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
3	CV.PANCA PRAKARSA	Jl. Nangka EB-25 Pangembangan RT.05/08 Kel.Ciwaduk Kec. Cilegon	5173004/0432/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
4	CV. DWINDA PERSADA MANDIRI	Jl. Flamboyen No.56 Bukir Patem Kel. Kobbumi Kec.Purwakarta	5173004/0433/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
5	CV. WIRA JAYA TEKNIK	Jl. Jaha Blok. A No.22 BBS II RT.007/006 Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon	5173004/0434/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
6	PT. MULTI CARGO ENERGI	Jl. Arga Brieno Blok. A.6 No.23 RT.1/03 Kel. Kotassari Kec. Grogol	5173004/0435/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
7	KOPKAR PT. KW TOPPRATAMA	Jl. Industri No.05 RT.09/04 Kel.No.05 RT.09/04 Kel. Ramanju Kec.Purwakarta	5173004/0437/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
8	CV. ONE GOLF	Ruko Cilegon City Square Blok. I Kel.Kedaleman Kec.Cibeber	5173004/0438/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
9	CV. MITRA TEKNIK SEJATI	Jl. Arga Malabar Blok.D9/23 Kel.Kotassari Kec. Grogol	5173004/0439/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
10	PRITAKOPAL LANA BANTEN	Jl. Yos Sudarso No.1 Kel. Taman Sari Kec. Pulomerak	5173004/0440/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
11	CV. SENTRA TEKNIK PERKASA	Komp. TCI Blok. H.10 No.27 RT.002/005 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5173004/0441/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
12	CV. DIANA SARI	Jl. R. Suprpto No.34 Kel.Ramanju Kec.Purwakarta	5173004/0442/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
13	CV. HOHAN JAYA	Jl. Raya Anyer Km.03 No.21 RT.11/06 Kel.Kebonsari Kec.Citangkil	5173004/0443/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
14	CV. RASYATAMA SWARGALOKA	Link. Cibero RT.003/003 Kel. KaliTimbang - Cibeber	5173004/0444/BINUS/PG/2013	03 Juni 2013
15	PT. KALIYTA JAYA	Komp. Metro Villa Blok. D.15 No.12 Kel. Gedung Dalem - Jombang	5173004/0445/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
16	CV. TABAH	Jl. Kenangan RT.01/04 Masjid - Jombang	5173004/0446/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
17	PT. ONA GANA INDONESIA	Ruko Cilegon Business Square Blok.C 20 RT.005/006 Kedaleman - Cibeber	5173004/0447/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
18	PT. CAHAYA NABAWI	Ruko Cilegon City Square Blok. H No.09 RT.005/006 Kedaleman - Cibeber	5173004/0448/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
19	CV. APENA SEJAHTERA	Link. Tegai Tong RT.08/06 Kebonsari - Citangkil	5173004/0449/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
20	PT. INDOHARMA HARAPAN UTAMA	Komp. PCI Blok. B 17 No.8-9 RT.005/009 Kedaleman - Cibeber	5173004/0450/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
21	CV. EMBUN KHADAFI	Link. Senoja No.244 RT.002/001 Sukmajaya - Jombang	5173004/0451/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
22	CV. MULYA AGUNG	Link. Gerem Keagungan RT.01/06 Gerem - Grogol	5173004/0452/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
23	CV. MARINA PARADISA	Jl. S Gunung Jati Lijajar RT.01/06 Tegairatu - Chwandan	5173004/0453/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
24	PT. FRESHMART INDOMART	Jl. A. Yani No.135.C Kel. Sukmajaya - Jombang	5173004/0454/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
25	CV. ERIKA BAKSIT ESA	Jl. Faus No.47 Kav Blok.C RT.001/006 Masjid - Jombang	5173004/0455/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
26	BAR BAR GYM	Komp. PLN Lebak Gede RT.003/009 Lebak Gede - Pulomerak	5173004/0456/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
27	PT. SEMESTA HARAPAN USAHA	Jl. Mayor Jend.S Parman Km.13 Link. Lijajar RT.13/05 Tegairatu - Chwandan	5173004/0457/BINUS/PG/2013	05 Juni 2013
28	UD. INTAN JAYA	Link. Panauan RT.01/01 Kubangsari - Chwandan	5173004/0458/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013
29	CV. MARINE ANGGA SAPUTRA	Jl. Raya Suralaya RT.01/05 Link. Kotak Malang Kel. Suralaya - Pulomerak	5173004/0459/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013
30	CV. REKATAMA JAYA	Jl. Masjid Agung No.7 RT.00/01 Kel.Citangkil Kec.Citangkil	5173004/0460/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013
31	PO. ADITYA CELULLAR	Mall Ramayana Cilegon Lt.1 Blok.A No. 52 RT.05/03 Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	5173004/0461/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013
32	PO. ANUGRAH	Pasar Kawling Blok.F Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon	5173004/0462/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013
33	PO. ACC	Jl. Piere Tendean No.165 RT.02/06 Kel.Jombang wetan - Jombang	5173004/0463/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013
34	CV. TARA PERBAGI	Jl. Flamboyen No.10 Tempusutih Kel.Taman baru Kec.Citangkil	5173004/0464/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013
35	CV. HIDAYAT JAYA MAKMUR SENTOSA	Jl. TB buang cikuaa No.12 RT.02/01 Gerem - Grogol	5173004/0465/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013
36	PT. INDRJI ABDI SENTOSA	Jl. Gelatik Blok. H No.157 RT.10/05 Bendungan - Cilegon	5173004/0466/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013
37	CV. BRILLIAN ABADI	BBS II Jl. Pala A.2 No.79 Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon	5173004/0466/BINUS/PG/2013	07 Juni 2013

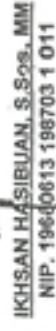
38	CV. RATU BELQIS	Link. Pabuanan RT.06/005 Kel. Rawaanun - Grogot	5173004/0467/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
39	PT. ARAFAH PUTRA	Jl. Pangeran Jayakarta Link. Acing Baru No.09 RT.001/007 Kel.Masigit Kec.Jombang	5173004/0468/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
41	PD. ABADI JAYA	Link. Pegantungan Baru RT.02/014 Kel. Jombang wetan - Kec. Jombang	5173004/0469/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
42	CV.KARYA TEKNIK MANDIRI	Link. Kreceng RT.03/03 Kel.Kebonsari Kec.Citangkil	5173004/0470/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
43	ART BREZEE	Komp. PCI Blok D.30 No.20 RT.002/004 Cibeber/Cibeber	5173004/0471/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
44	KOP. KARYAWAN PT. SIEMENS	Jl. Eropa I Kav 123 Kawasan KEC. Wamaseri - Citangkil	5173004/0472/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
45	CV. FTHATHIN SINAR MANDIRI	Link. Cipact RT.001/002 Kel. Bulakau Kec. Cibeber	5173004/0473/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
46	CV. TOKO ALIM	Jl. Pasar Baru No.04 RT.01 Kel. Jombang Wetan - kec. Jombang	5173004/0474/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
47	CV. TERUS JAYA	Jl. KH. Wasyid No.8 Link.Barokah Jombang wetan - Jombang	5173004/0475/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
48	JAYA VULKANIN	Jl. Raya Serang No.09 RT.03/05 Sukmajaya - Jombang	5173004/0476/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
49	CV. GAPIURA BAKTEN	Link. Kedung RT.01/04 Gedong Dalem - Jombang	5173004/0477/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
50	PD. MITRA JAYA	Link. Palas RT.01/1/02 Bendungan - Cilegon	5173004/0478/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
51	RM. QUEEN	Jl.Jend.A.Yani RT.06/03 Sukmajaya - Jombang	5173004/0479/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
52	UD. YAYU GEMI	Jl. Puz Kavling Blok C No.02 RT.01/06 Masigit - Jombang	5173004/0480/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
53	CV. PUTRA BAKTEN MANDIRI	Jl. Cikeral No.02 RT.04/03 Kalitimbang - Cibeber	5173004/0481/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
54	TOKO SEMBAKO IHSAN	Jl. Kenagot Link.Barokah RT.002/013 Jombang wetan - Jombang	5173004/0482/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
55	CV. PUTRA AIRLANGGA MANDIRI	Jl. Cikeral No.02 RT.04/03 Kalitimbang - Cibeber	5173004/0483/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
56	PT. HEKSA PUTRA DAN WJAYA	Jl. Raya Serang No.29 Jombang wetan - Jombang	5173004/0484/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
57	PT. PANDU AGUNG PRASETYA	Link. Kubang Sepat RT.003/007 Citangkil - Citangkil	5173004/0485/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
58	CV. TERUS MAJU JAYA	Jl. Teuku Umar No.20 Link. Kalang anyar RT.002/001 Kedaleman - Cibeber	5173004/0486/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
59	CV. KARISMA AFRILIO	Jl. Agra Malangbong C.2 No.07 RT.09/03 Kobasari - Gregot	5173004/0487/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
60	CV. PERINTIS	Link. Kubang Welling RT.07/03 Purwakarta - Purwakarta	5173004/0488/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
61	CV. CAMAYA ANANDA PUTRA	Link. Kranggot RT.03/04 Surajaya - Pulomarak	5173004/0489/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
62	CV. NUR LINDA	Link. Kranggot RT.01/004 Sukmajaya - Jombang	5173004/0490/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
63	PD. MI CELL	Jl. A. Yani No.12 C RT.09/03 Sukmajaya - Jombang	5173004/0491/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
64	CV. GEMILANG SETTING	Jl. Keponding No.104 Kaw.Blok. H RT.09/05 Kel.Bendungan Kec.Cilegon	5173004/0492/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
65	PT. ULUN PANDU PERKASA	Jl. Buyur Arman No.72 RT.01/01 Kel.Citangkil - Kec.Citangkil	5173004/0493/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
66	PT.ASA TEKNIKA UTAMA	Jl. Flamboyen No.19 RT.21/05 Kel.Ciwedus Kec.Cilegon	5173004/0494/BINUS/PM/2013	19 Juni 2013
PM				
1	PT. FLOMACO INDONESIA	Jl. Taman Cilegon Indah Blok. J.8 No.16 A RT.04/05 Kel.Sukmajaya Kec.Jombang	5173004/0167/BINUS/PM/2013	03 Juni 2013
2	PT. BANGKIT JAYA TEKNIK	Komp. Metro Cilegon Cluster Florida Blok.L3 No.45 RT.04/06 Kel.Panggungrawi Kec.Jombang	5173004/0168/BINUS/PM/2013	03 Juni 2013
3	PT. GALUH NAHAR REKSA	Komp. PCI Blok. D.33 Ho.07 RT.01/04 Kel.Cibeber Kec.Cibeber	5173004/0169/BINUS/PM/2013	03 Juni 2013
4	CV. TIGA PILAR MANDIRI	Kav. Blok.J No.207 RT.006/005 Kel.Bendungan Kec.Cilegon	5173004/0169/BINUS/PM/2013	03 Juni 2013
5	CV. HAMPARAN SAMUDRA	Link. Cibeber Cipucang No.01 RT.01/01 Kel.Cibeber Kec.Cibeber	5173004/0161/BINUS/PM/2013	03 Juni 2013
6	PT. BEKEN INTI TEKNIINDO	Jl. Kecubung V Blok G 6/7 RT.23/05 Kel.Ciwedus Kec.Cilegon	5173004/0162/BINUS/PM/2013	03 Juni 2013
7	PT. BERCA GEMILANG	Jl. Angrek 16 Kav Blok. I RT.07/06 Kel.Bendungan Kec.Cilegon	5173004/0163/BINUS/PM/2013	03 Juni 2013
8	PT. BUANA SAMUDRA ATLANTIK	Jl. Sunan Gunung Jati No.23. Link. Lijajar RT.19/006 Kel.Tegalratu Kec.Ciwabdan	5173004/0164/BINUS/PM/2013	03 Juni 2013
9	PT. HAFIS NURYATAMA	Jl. R. Supratno No.08 RT.02/02 Samangraya - Citangkil	5173004/0165/BINUS/PM/2013	05 Juni 2013
10	PT. MUTIARA KASHI	Jl.S.A Tirtayasa No.06 RT.05/02 Ramangju - Purwakarta	5173004/0166/BINUS/PM/2013	05 Juni 2013
11	PT. SOLO MANDIRI PRATAMA	Link. Pegantungan Baru RT.02/14 Jombangwetan - Jombang	5173004/0167/BINUS/PM/2013	05 Juni 2013
12	PT. DAEAH & C INDONESIA	Ruko Mega Cilegon Blok.A No.14 RT.06/02 Kel.Ramanuju Kec.Purwakarta	5173004/0168/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
13	PT. GRAND MANGKU PUTRA	Jl. Akses Tol Cilegon Timur Link. Kedjipaten Kedaleman - Cibeber	5173004/0169/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013

14	PT. HOTEL MANGKU PUTRA MERAH	Jl. RE. Martadinata Km.118 Mekarsari - Pulomarak	5173004/0176/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
15	PT. KOSTEC PRIMA BAJA	Jl. Antartika II kav.B4 KIEC Kotasari - Grogot	5173004/0173/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
16	KOP. RUSAMAS	Komp. PLTU Surabaya Kel.Surabaya Kec.Pulomarak	5173004/0173/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
17	PT. ELECTRONIC CITY IND	Jl.Jend A. Yani RT.065/003 Mall.Ramayasa Cig LLI UETR 35-36 Sukmajaya - Jombang	5173004/0173/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
18	CV. SELAT NUSA INDAH	Jl. Raya Pelabuhan Merak Link.Sukajadi RT.02/022 Kel.Mekarsari Kec.Pulogenerak	5173004/0174/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
19	PT. MUTIARA HITAM TUNGGAL PRAKARSA PUSAT	Jl. Raya Anyer Km.10 Kel. Kepuh Kec.Ciwandian	5173004/0175/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
20	PT. INDO SEVEN OCEAS	Link. Pulorinda RT.03/01 Lebakgede- Pulomarak	5173004/0176/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
21	PT. BESTON BANTEN PERKASA	Jl. Bratasena Kav. No.4 Blok.E RT.015/006 Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon	5173004/0177/BINUS/PM/2013	07 Juni 2013
22	PT. CITRA PUTRA ABADI	Jl. Hiu No.44 Kav. Blok C RT.19/09 Taman baru - Citahgaji	5173004/0178/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
23	PT. CIPTA KARYA SAPUTRA	Jl. Raya Anyer SPBU Krenceng , Wamasari Citangkul	5173004/0179/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
24	PT. BHETA YARD NUSANTARA	BBS III Blok.D 3 No.4 RT.019/009 Ciwaduk - Cilegon	5173004/0180/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
25	CV. BINTANG ARDI PELAGU	Perum BCK Blok. 8.03/17A RT.03/06 Cibeber - Cibeber	5173004/0181/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
26	PT. LICOS INTAN PERMATA	Jl. S Gunung Jati Link.Lijajar RT.03/06 Tegalaratu - Ciwandian	5173004/0182/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
27	PT. HOLLYWOOD INDONESIA	Jl. Raya Bojonegara Link.Serdil RT.001/003 Kedaleman - Cibeber	5173004/0183/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
28	PT. VISI INSANI	Perum BCK Blok. C16 No.16 RT.002/019 Cibeber - Cibeber	5173004/0184/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
29	CV. LAUTAN TEDUH	Jl. S Derajat Link.Cirihab RT.17/02 Kel.Banjir Negara - Kec.Ciwandian	5173004/0185/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
30	CV. REKA ARTHA MANDIRI	Komp. Serang Baru Permal RT.05/03 Kel.Karang asem Kec. Cibeber	5173004/0186/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
31	PT. SUCOFINDO (PERSERO)	Komp. PCI Blok. D 121 No.01 RT.007/004 Cibeber - Cibeber	5173004/0187/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
32	PT. AIFA CITRA GEMILANG	Jl. Raya Serang NO.106 Kel. Sukmajaya - Kec.Jombang	5173004/0188/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
33	CV. BANTEN JAYA PRATAMA	Jl. Raya Anyer Link.Rombonja RT.01/01 Kel.Kejuh Kec.Ciwandian	5173004/0189/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
34	CV.BERSAUDARA NIGRAT MANDIRI	Link. Komp. PLTU Surabaya No.18 RT.03/01 Surabaya - Pulogenerak	5173004/0190/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
35	PT. BISHNIS MUARA ANGKASA	Link. Perum GCD Blok.B 07 No.02 RT.01/06 Kel.Kali Timbang Kec.Cibqber	5173004/0191/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
36	PT. SUMUR JAMBU JASA	Jl. Raya Anyer Cilegon Km.7 Kubangsari- Ciwandian	5173004/0191/BINUS/PM/2013	10 Juni 2013
1	PT. KRAKATAU BLUE WATER	Wisma Permata JI.KH Yasin Beji No.02 Kel.Kedaleman Kec.Purwakarta	5173004/0014/BINUS/PB/2013	04 Juni 2013
2	PT. AGRINO TRINAGA	Ruko Cilegon Business Square Blok.D No.09 RT.06/06 Kel.Kedaleman - Kec. Cibeber	5173004/0015/BINUS/PB/2013	07 Juni 2013
3	PT. BANTEN INTI GASINDO	Jl. Arga Baja Pura Blok.D.9 No.17.A Kotasari - Grogot	5173004/0016/BINUS/PB/2013	07 Juni 2013
4	PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDRA	Jl. Raya Anyer Km.13 Tegalaratu - Ciwandian	5173004/0017/BINUS/PB/2013	07-Jun-13

Mengetahui, 30 Juni 2013
Kabid Perdagangan dan Pembinaan Pasar


M. MUHAMMAD SATRIO
NIP. 19600503 198403 1 017

Kasi Perdagangan Dalam Negeri


IKHWAN HASIBUJAN, S.Sos, MM
NIP. 19640613 198703 1 011

**DAFTAR NAMA-NAMA GRUB/SLSH YANG TELAH MEMERIKSA
KEMADANNYA PADA BADAN RESKAM:INMAS ROTA CILEGON
SAMPAI DENGAN JANUARI 2014**

A. DAFTAR LSM / GRUBS YANG MEMILIKI SRT

NO	NAMA GRUBS / LSM	ALAMAT SEKRETARIAT	TANGGAL PERIKSAAN	SUSUNAN PRIBUMUS	NOMOR SRT
1	2	3	4	5	6
1	KORPRIK Kedua Mangrove dan Beranda Kedung Masul	J Raya Arjos Lela, Kedung Masul RT 01 / 04 Kel Sawang Rajat kec. Cawang 081231371394 081231360314	25 October 2011	Ormas : ARJUNA, S.P.U Spart : Forum Lela, S.P Bendah : Nabel	249/ 01 /Jong.Kedung/2012
2	GRUB/DAI RT/TA (PUBLI / SRT) Mula beraktif tm 2011 dan Telah di perpanjang kembali	J. Umar Tegal No 23 Kay Bakti RT 009/005 Cajuratan Berombang Kecamatan Cawang	01 November 2011	Ormas : H. Nurhan Spart : H. Subono Bendah : H. Iman Kurnia	249/ 02 /Jong.Kedung/2012
3	GRUB Kadua Sungai Benguhda Indonesia	Kadua Muntaha BDA E 23 No 23 RTI Cakur Cawang 08123137313	20 September 2011	Ormas : Hq. En Hartanti SE Spart : Hq. Saori Dava B.Sc Bendah : Eni Terawan SE	249/ 03 /Jong.Kedung/2012
4	GRUB Kadua Berombang Kadua Indonesia	Kadua Muntaha BDA E 23 No 23 RTI Cakur Cawang 081231360000	22 November 2011	Ormas : Hq. En Hartanti SE Spart : Hq. Saori Dava B.Sc Bendah : Saori Dava B.O	249/ 04 /Jong.Kedung/2012
5	Berombang Beranda Muntaha BDA Cawang	Jl. Cak Mula Dera no 23 Lela, Berombang Prujat kec. Beranda Cawang	20 November 2011	Ormas : H. Arif Furtona Spart : Bayu Parahajana, S.Pd Bendah : Anand A. Hutan, SE	249/ 05 /Jong.Kedung/2012
6	GRUB Kadua Kadua Beroga	Jl. B. Sukma RT 1 lula, Lela Kadupa RT 04127 Lela Beranda Cawang	20 November 2011	Ormas : Mulyana Spart : Dini Alqam Bendah : Nurroddin	249/ 06 /Jong.Kedung/2012
7	GRUB/DAI Forum Tengg Benga Kadua Cawang	Lela Muntaha RT 01 RT Kel Sawang Rajat kec. Cawang Kadua Cawang 081231362507 / 081231361812	20 November 2011	Ormas : Ferry Kuru Spart : SO Ferryan Bendah : Saohi	249/ 07 /Jong.Kedung/2012
8	GRUB Kadua Berombang dan Berombang Lela Cawang	J. Kaye, Pene Tondan RT/ Berombang Kaye Kecamatan Berombang, 10254 9140129112 07344200815	20 November 2011	Ormas : H. Safran Anjad, S.Aq Spart : H. Anas Harwang Prujat Bendah : B. H. Anas Anjad	249/ 08 /Jong.Kedung/2012
9	GRUB Kadua Beranda Pene Cawang	J. Pene Beranda Beranda Kad. Berombang Weyan Kec. Berombang 081231365333	5 Januari 2012	Ormas : Subanta Spart : Sofyan Bendah : Subana	249/ 09 /Jong.Kedung/2012
10	GRUB/DAI Lembaga Pengembangan Perikanan Muntaha (Beranda)	J. P. Jayakanta RT 01 RT 03 Lela, Muntaha Kecamatan Muntaha, Kecamatan Berombang 081231360314	8 Februari 2012	Ormas : Muhammad Rizky S.Aq. M.L.Sy Spart : Nur Zahri Ananda Bendah : Fauzandi	249/ 10 /Jong.Kedung/2012

11	MAJALAH Alumni Indonesia Dengan Lungkungan Kopi Cikarang	J. B. Sadana Lina, Gempeng No. 56 Kecamatan Cibungkil, 08011180444	09 February 2012	Korlap Sektor Bendah Korlap Sektor Bendah	Subsidiar Yandi Aron, S.H. Subsidiar Ihsanul Amul Firdaus	24/01/11/ing.korlap/2012
12	LSM LAGUNA Lingkungan Hidupku Pungkurdi Rumah Kuning Sukrali	Unit Kegiatan RT 03/002 kec. Kembangan kec. Cakber Kota Cikarang 08159632700	02 April 2012	Korlap Sektor Bendah	Yeni Subhan M. Saad Sigitra	24/01/12/ing.korlap/2012
13	SMK POPS Gereja Mada Forum Komunitas Pura Pura Purawarman dan Pura - Ayu Tri Pura	J. Jend. Sudirman No. 3 Cikarang 0294 711884 - 025-7111857	02 April 2012	Korlap Sektor Bendah	AD. Nurwan Oval Subijyo	24/01/11/ing.korlap/2012
14	OPD LSPP Desain Ponggal Daerah Satekasi Rupa Pura Bangsa	J. Pangdajene No. 20 RT 20 RW 03 kel. Candaia	05 Agustus 2012	Korlap Sektor Bendah	M. Saad Dadang Nurhan Lia Nurhan	05-11-01/04/11/01/2012
15	LSM KOPHIT Komunitas Menikmati Wisata Berhijab	J. KH Saad No. 57 Unit Kelung Mada RT 02 RW 04 Kebunran Kebon Dawa	18 September 2012	Korlap Sektor Bendah	Putri Zahra Nurhan, ST Icha Agustin	05-11-01/04/10/2012
16	LSM CEM Cikarang Education Watch	Unit Kelung No. 011 Gedung Duta Jombang Jem. Cempug/Prakarsan Ng. 0811294444	01 October 2012	Korlap Sektor Bendah	DEVI NIDHI DINA AB Nurhan Nadi	05-11-01/16/12/2012
17	PROCA PROSERTUWA STANDA KEBAYA CIBUNGA	J. Soema Unit Tiga Tong No. 12 Kelung Cikarang 0294653404/0810344444	01 October 2012	Korlap Sektor Bendah	M. Yaman Andhyana Samsi	05-11-01/12/01/2012
18	MAKSI Pengurus Pendidikan Sekolah Indonesia	J. RT Surabaya Mada Cikarang 0815963008 1087724028	09 October 2012	Korlap Sektor Bendah	Ayon Mardika, S.H. PH Ariandhi Saen Evely Nurhan	05-11-01/18/12/2012
19	LSPP Lingkungan Pengabdian dan Peningkatan Kualitas Pendidikan	J. TB Jend. BDA 1 No. 52 RT 002/007 Cimahi 0254 314022 k@pencapaianpda.com	24 October 2012	Korlap Sektor Bendah	Lina Ihsan, S.Sos Nurhan Mada, S.Pd Oval Nurhan a.S.Pd	05-11-01/19/12/2012
20	PMK Peraturan Widyadana Kupa Indonesia	J. P. Jend. Soediro No. 25 C. Tanjung Tiga Kupa Kedukaan Kupa Kupa Kecamatan Purabaya	11 December 2012	Korlap Sektor Bendah	Dr. Nurhan Mada Dr. H. Syarif Nurhan	05-11-21/02/11/2012
21	PMK Poda Lungkungan Rindu	J. RT Sasandawa No. 86 Unit. Kumbang Tiga Pda Jombang wetan	01 Januari 2013	Korlap Sektor Bendah	H. Faisal Luthi H. Yudiant Nurhan	05-11-21/02/11/12/2012
22	PMK Pengaruh Pendidikan Kuning Tengah	Unit. Benda RT 01 RW 13 kel. Jombang Insan Kebunran Kumbang	11 September 2012	Korlap Sektor Bendah	Ari Akbarhan Bawal Ng. Yanti Annisa Lyan	05-11-21/02/21/11/2012

23	IPM Forum Rembuk Peta Peta Rumnawitan dan Peta Peta (P2R)	B. Ardiat Subianto No. 3 Kota Cilegon Peta Cilegon	10 April 2013	Sekeloa Sekeloa : Drs. H. Dede Subi, MH Branch : B. H. Muhammad Ruzid	00-36-720002/10/2013
24	SONOOR NTB (P2R) Sentra Komunikasi Kota Cilegon	B. Samud Teguh No. 4 Kay Blos di 1 000/200 Kebudayaan Berwingsan Kecamatan Cilegon	02 Juli 2013	Kusua Sekeloa : H. Mohan Branch : H. Subiarno	00-36-720002/11/2013
25	APRIL Aksiaksi Persepsi Lintasi Donorita dan Terdapat Kota Cilegon	Kumpulka Bako Heger Cilegon Blok A No 11 Kabupaten Panggang Kusi Kecamatan Jombang	28 Juni 2013	Kusua Sekeloa : Triyan Ardiat Hurnab Branch : Eddy Purjono	00-36-720002/12/2013
26	P2R Forum Komunikasi Pemuda Kabupaten Jepara Cilegon	B. Yis Sudama No. 20 Kali Lelaik Cemer Kecamatan Jepa Merta	21 Agustus 2013	Kusua Sekeloa : Subiant Branch : Subi Nisnang	00-36-720002/10/2013
27	OPRI Diskusi Pemuda Petak Lempungan	B. Pradita Lark, Sekolah ST 007 00 000 Banda Pari Kecamatan Ciamis	18 Juli 2013	Kusua Sekeloa : H. Subiarno, SE Branch : Zennal Arif	00-36-720002/10/2013
28	LAR (P2R) Persepsi Rumnawitan dan Warkub dan Peta Cilegon Cilegon	B. Ardiat Subianto No. 3 Cilegon	30 Desember 2013	Kusua Sekeloa : Subiarno Branch : Peta Peta	00-36-720002/11/2013



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

5. Pejabat . . .

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
10. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
11. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- 4 -

BAB II

PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN BADAN PUBLIK

Pasal 2

- (1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik.
- (2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

BAB III

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu

Pengklasifikasian Informasi

Pasal 3

- (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
- (2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
 - c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
 - d. Jangka Waktu Pengecualian;
 - e. alasan pengecualian; dan
 - f. tempat dan tanggal penetapan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan

Pasal 5

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 6

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.
- (3) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
- (4) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.
- (5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.

(3) Informasi . . .

- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuka jika:
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Perubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi.

Pasal 11

- (1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan.
- (3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 14

- (1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 - d. penetapan . . .

- 9 -

- d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat fungsional di Badan Publik yang bersangkutan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH BADAN PUBLIK NEGARA DAN PEMBEBANAN PIDANA DENDA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara

Pasal 16

- (1) Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Ganti rugi . . .

- 10 -

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara.
- (3) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

Pasal 17

- (1) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Publik Negara dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, pembayaran ganti rugi dimasukkan dan dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Pembebanan Pidana Denda

Pasal 19

- (1) Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pidana . . .

- 11 -

- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pejabat Publik dan tidak menjadi beban keuangan Badan Publik jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 20

Putusan pengadilan yang membebaskan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pejabat Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
- (2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 99



WALIKOTA CILEGON

**KEPUTUSAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR : 060.05/Kep. 562-Ocg/2012**

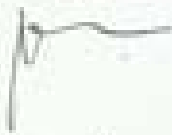





TENTANG

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA CILEGON**




WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon perlu dipersiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kota Cilegon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Cilegon melalui Keputusan Walikota Cilegon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

LEKAR HADIR BIMBINGAN

ID	HARI/TGL	URAIAN	TTO
	24/01 2014	Acc Seminar	
	29/8-2014	Acc untuk forum lapangan Pulau H.Q. mengenai proposul penelitian seperti yg berkaitan/disamping	
	21/08 2014	- perbani aqasi - validasi populasi teras dulu	
	26/8/14	Acc lapangan	
	33/09 2014	- Ceramah Lantahi Qesing - Acc Lycop	
	18/09 2014	- perbani: Orde Diagram - " Interpretasi hasil - " Deskripsi dan Sara	

IFTAR HADIR BIMBINGAN

NO	HARI/TGL	URAIAN	TTD
	20/9/14	Perbaiki redaksional	
	22/09	Perbaiki nama dinas ACC Edy.	
	22/09	ACC Sidang	

DAFTAR RIWAYAT PENELITIAN



Peneliti dilahirkan di Serang, pada tanggal 01 November 1989 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari keluarga pasangan Bapak Safrawi dan Ibu Sukanah. Sebelum menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Peneliti telah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) KAMPUNG BARU mulai tahun 1995. Menempuh Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Anyer mulai tahun 2001 dan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Anyer mulai tahun 2004. Selanjutnya peneliti mengikuti Seleksi Ujian Masuk Mandiri (UMM) pada tahun 2010 dan berhasil terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2013-2014, peneliti melakukan penelitian guna menyusun skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.